Rakyat Bengkulu

LAPORAN INVESTIGASI SURATKABAR TERBAIK IPMA 2020

SELASA, 29 DESEMBER | TAHUN 2020 — Pilihan Utama — TERBIT 16

LIMBAH DI SUNGAI HITAM

LAPORAN INVESTIGASI

RIO/RB

KONTRADIKTIF: Berbeda dengan di hulu sungai yang tidak dilintasi air limbah PT Bengkulu Sawit Lestari, masih jernih.

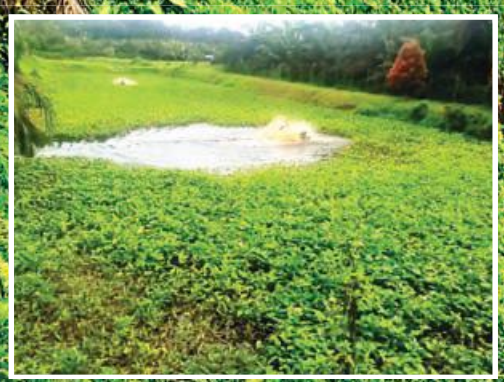

DIENDAPKAN: Kolam-kolam penampungan limbah PT BSL sebelum dibuang ke Sungai Mertam.

Sungai Mertam di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) sekarang berwarna hitam dan mengeluarkan bau busuk. Diduga kuat tercemar oleh limbah pabrik di wilayah tersebut. Berikut laporan investigasinya.

Baca LIMBAH...Hal 7

HASIL LAB AIR SUNGAI MERTAM DESA SUKAJAYA

Ciri	Ambang Batas Nilai	Hasil Lab
pH	6-9	7.3
Temperature	-	28.4
BOD5	100	25.20
COD	350	68.10
TSS	250	82
Oil/Grease	25	<1.0
Ammonia	-	8.7
Nitrite	-	<0.015
Nitrate	-	1.72
Nitrogen	-	1.50

HASIL LAB LIMBAH PT.BSL

Parameter	Standar Kulitas Limbah	Hasil Lab
pH	6-9	9
Bod	30	26
TSS	30	28
Oil & Greace	5	1.2
Temparatur	-	28.5
COD	100	82
Ammonia(NH3-N)	10	2.1
N-Total	-	1.8

Dibuang Sebelum Memenuhi Syarat

MASIH PEKAT: Limbah cair PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) masih keruh saat pembuangan ke Sungai Mertam.

RIO/RB

MENGHITAM: Kondisi Sungai Mertam di Desa Sukajaya sudah menghitam sejak adanya PT Bengkulu Sawit Lestari.

RB mendapatkan bocoran dokumen hasil labolatorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Menguatkan dugaan Sungai Mertam telah tercemar.

Pihak DLHK BS pun mengakui standar Ph limbah 6-9. Namun limbah yang dikeluarkan dan dialirkan ke sungai Mertam di angka 9 (lengkapnya lihat grafis). Seperti N-Total 1.8 dan temeperatur 28.5. Inilah yang membuat sungai Mertam tercemar sehingga airnya berubah warna menjadi hitam dan berbau busuk. Hasil lab menyebut kandungan ammonia mencapai 8.7, nitrate 1.72, nitrogen 1.50.

Ditanya soal hasil labolatirum tersebut, Kepala DLHK BS Ir.Jonior Hafis didampingi Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLHK BS Maemson Victory, S.Sos dan staf Ria mengakui Sungai Mertam berwarna di hulu pabrik. Hal ini disebabkan oleh dampak pembuangan limbah PT BSL.

Baca DIBUANG...Hal 7

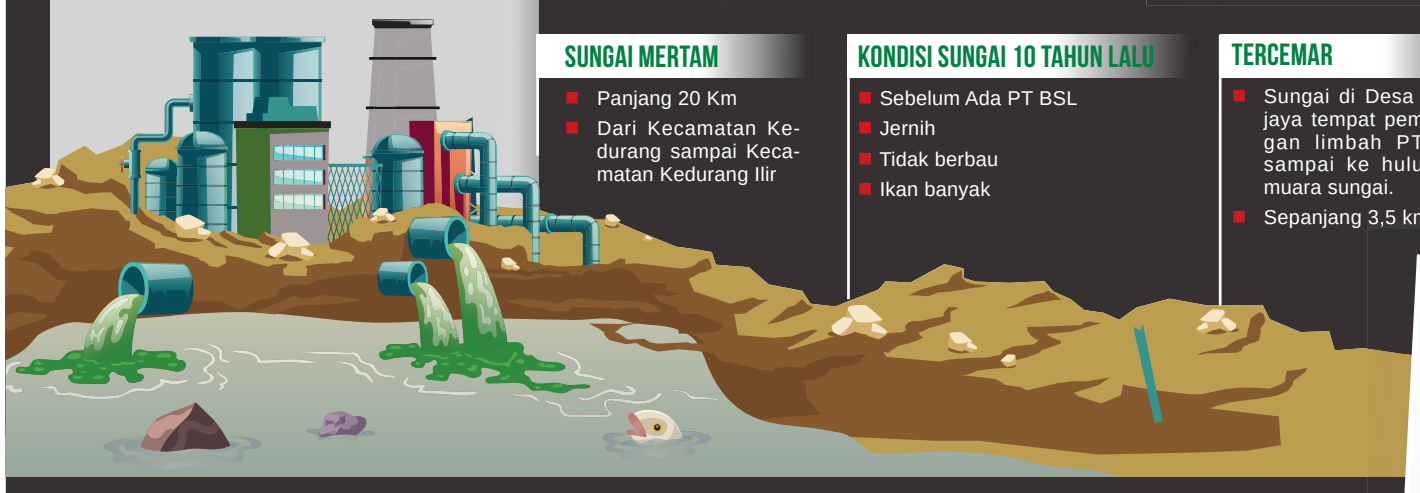

SUNGAI MERTAM
- Panjang 20 Km
- Dari Kecamatan Kedurang sampai Kecamatan Kedurang Ilir

KONDISI SUNGAI 10 TAHUN LALU
- Sebelum Ada PT BSL
- Jernih
- Tidak berbau
- Ikan banyak

TERCEMAR
- Sungai di Desa Sukajaya tempat pembuangan limbah PT BSL sampai ke hulu atau muara sungai.
- Sepanjang 3,5 km.

KONDISI SUNGAI
- Warna Hitam Pekat
- Bau busuk
- Banyak ikan mati

Setiap Hari Ikan BERGELIMPANGAN

TIGA kali RB mendatangi Sungai Mertam yang tercemar di hulu Desa Sukajaya, selalu menemukan ikan mati bergelimpangan. Itupun tidak harus dicari. Penemuan ikan-ikan mati di sungai tercemar ini didokumentasikan melalui foto maupun video. Bisa dilihat di chanel Youtube RB, https://youtu.be/EoBmzIvCtzA.

Dikatakan Sopian, pemancing dari Kota Manna, dirinya dan beberapa temannya setiap kali pergi memancing selalu menemukan ikan yang mati di tengah Sungai Mertam. Ikan yang mati tersebut diduga kuat diakibatkan berubahnya warna sungai Mertam dan bau sungai.

Disebutkannya, sepanjang Sungai Mertam dari pabrik sawit PT BSL hingga muara sungai air sungai sudah sangat berubah dibandingkan sembilan tahun lalu. Dimana air masih jernih dan ikan di muara masih sangat mudah didapatkan oleh para pemancing dari berbagai daerah.

"Kalau mancing pasti ada saja ikan yang mati, kadang di tepi sungai ada yang baru mati, ditengah sungai seperti itu," ungkap Sopian

Senada disampaikan pemancing lainnya Win, dia menduga kuat ikan yang banyak mati tidak lain akibat perubahan air sungai.

Baca SETIAP...Hal 7

PUNAH: Setiap hari ditemukan ikan mati di Sungai Mertam dekat pembuangan limbah PT BSL.

Eceran Rp 6.000/eksemplar. Langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim

Dilarang Mengganti Pejabat

BENGKULU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Melalui SE ini, pemda diingatkan untuk tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat kepada mendagri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Diah Irianti, menerangkan SE Mendagri Nomor 820/6923/SJ tertanggal 23 Desember, dan baru-baru ini diterima oleh pihaknya. Tertera dalam SE tersebut, bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemda di lingkungan pemda provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, gubernur, bupati, dan walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya gubernur, bupati, walikota terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020.

"Pasca pilkada ini harus tetap ada persetujuan dari mendagri untuk melakukan mutasi. Itupun hanya untuk mengisi kekosongan jabatan, tidak boleh mengganti pejabat. Sesuai SE mendagri," kata Diah.

Lanjut Diah, saat ini di lingkungan Pemprov Bengkulu banyak kekosongan jabatan eselon III dan IV. Baik ditinggal ASN karena pensiun, dan ada juga yang meninggal dunia. Apabila sekedar untuk mengisi kekosongan, pemda diperbolehkan untuk melakukan mutasi. Hanya saja tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari mendagri.

"Izin harus tetap diperoleh sampai 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020," tegas Diah.

Sementara itu Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah mengatakan belum akan melakukan mutasi pejabat, terlebih lagi mengganti pejabat yang ada. Untuk itu dirinya meminta kepada ASN untuk fokus bekerja dan segera menyiapkan perencanaan untuk kegiatan tahun depan. Sehingga kegiatan bisa segera dilaksanakan pada triwulan I.

"Mutasi bisa kapan saja tapi karena gubernurnya sama, aromanya gak beda. Iyakan gak berubah semua, gubernur juga gak berubah. Kabinet nya gak akan pegawai ini ganti dengan orang dari provinsi lain," tukas Rohidin. **(key)**

Indonesia Lockdown Selama Dua Pekan

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akhirnya menaruh perhatian terhadap keberadaan varian atau strain baru virus SARS-CoV-2 penyebab pandemi Covid-19. Langkah ekstrim yang diputuskan pemerintah adalah tidak menerima kedatangan WNI dari manapun selama dua pekan atau 14 hari.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Presiden kemarin (28/12) sore. Retno didampingi Jubir pemerintah penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan hasil Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) sekaligus arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ratas 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara (dari kedatangan WNA, Red) dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021," katanya. Keputusan itu diambil setelah muncul pemberitaan mengenai strain atau varian baru virus Covid-19. Retno mengatakan dari informasi tersebut dinyatakan bahwa menurut berbagai data ilmiah strain baru Covid-19 memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat.

Retno lantas menjelaskan bagi WNA yang tiba di Indonesia hingga 31 Desember 2020 diberlakukan ketentuan sesuai adendum Surat Edaran Covid-19 nomor 3 tahun 2020. Di dalam surat edaran itu diatur bahwa WNA harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang berlaku 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Dokumen tersebut dilampirkan saat WNA memproses dokumen pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia. Setelah tiba di bandara, WNA harus melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, WNA harus menjalani karantina wajib selama lima hari.

"Kemudian setelah karantina wajib lima hari, WNA kembali menjalani RT-PCR," jelas Retno. Apabila hasil RT-PCR tersebut negatif maka WNA dapat meneruskan perjalanannya di Indonesia. Retno juga menyampaikan ketentuan penutupan akses kedatangan bagi WNA itu dikecualikan bagi pejabat tinggi setingkat menteri ke atas. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Retno juga menyampaikan selama periode pelarangan kedatangan WNA itu, para WNI tetap diizinkan kembali ke Indonesia. Prosedurnya WNI harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan.

Kemudian setelah tiba di Indonesia harus menjalani RT-PCR kembali. Jika dinyatakan negatif, WNI harus menjalankan kewajiban karantina mandiri di akomodasi yang sudah disiapkan pemerintah. Setelah itu WNI harus kembali menajlani RT-PCR. Apabila hasilnya negatif mereka dipersilahkan melanjutkan perjalanan di Indonesia.

Sementara itu, dengan semakin meningkatkan kasus Positif, sebanyak 6 Kabupaten di Jawa Tengah memutuskan menutup semua destinasi wisata di daerahnya selama libur tahun baru. Penutupan destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan kasus Covid-19 dan menimbulkan klaster baru.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Sinoeng N Rachmadi menerangkan, keenam Kabupaten yang menutup semua destinasi wisata adalah Rembang, Purworejo, Wonogiri, Kudus, Jepara dan Demak. Sementara, dua Kabupaten lain yakni Klaten dan Pemalang melakukan penutupan sebagian obyek wisata.

"Ada delapan Kabupaten/Kota yang menutup total dan menutup sebagian destinasi wisatanya selama libur akhir tahun dan tahun baru. Kami mengapresiasi langkah itu karena ini untuk menjaga timbulnya klaster baru penularan Covid-19 di tempat-tempat wisata," kata Sinoeng kemarin (28/12).

Sinoeng menerangkan, Kabupaten Demak yang memiliki dua daya tarik wisata, semuanya ditutup. Diikuti Jepara dengan 9 daya tarik wisata yang ditutup semuanya, Kudus dengan 17 tempat wisata semua ditutup, Purworejo dengan 27 obyek wisata semua ditutup, Rembang 10 daya tarik wisata ditutup, serta Wonogiri dari 17 daya tarik wisata juga ditutup total.

"Pemalang ditutup sebagian yakni dari 19 daya tarik wisata, ditutup tiga dan Klaten yang juga ditutup sebagian. Total ada 86 dari 690 daya tarik wisata di Jateng yang ditutup," jelas Sinoeng.

Ia menjelaskan, penutupan itu dilakukan di destinasi wisata yang dikelola pemerintah. Sementara untuk destinasi lain yang tidak ditutup termasuk destinasi yang dikelola swasta, Sinoeng meminta semuanya disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Semuanya harus ketat dalam penerapan protokol kesehatan. Masyarakat silahkan melaporkan kami jika menemukan ada destinasi wisata yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak dilakukan pembatasan pengunjung, sarana prasana tidak dipenuhi dan ketaatan protokol kesehatan diabaikan. Pasti akan kami tindaklanjuti dan dilakukan tindakan tegas berupa penutupan," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat acara keramaian saat libur tahun baru. Masyarakat dihimbau tetap di rumah saat perayaan pergantian tahun itu.

"Kita semua sudah sepakat, bahwa tahun baru tidak boleh ada perayaan. Semuanya saya minta di rumah, dan kepolisian sudah sepakat akan melakukan tindakan tegas jika masyarakat masih melakukan aktivitas yang menimbulkan keramaian itu," katanya.

Ganjar juga meminta masyarakat untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan bertahan diri di rumah. Pasalnya, saat ini kasus Covid-19 masih ada peningkatan tinggi.

"Ayo kita jaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara tetap di rumah. Bupati/Wali Kota saya ucapkan terimakasih karena selama ini sudah aktif dengan menutup tempat-tempat keramaian dan memperketat protokol kesehatannya. Saya minta juga para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk terus sosialisasi agar tidak ada acara ramai-ramai di akhir tahun ini. Itu akan sangat membantu untuk kita bisa mengatasi persoalan yang ada saat ini," pungkasnya.

Sementara itu tingkat keterpakaian ranjang di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) terus menipis dengan semakin tingginya kasus positif Covid-19.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir memproyeksikan kenaikan pasien rumah sakit 25 hingga 40 persen pada masa liburan Natal dan Tahun baru ini. "Tentunya kita mencurigai akan adanya kenaikan yang lebih besar lagi. Maka dari itu harus mampu melakukan antisipasi untuk menangani penigkatan pasien," jelas Kadir kemarin (28/12)

Kadir menjelaskan, Tingkat BOR nasional saat ini berada pada 64,10 persen. Meski demikian, sudah terdapat 9 daerah dengan tingkat BOR yang mengkhawatirkan. Yakni Provinsi Banten dengan BOR berada di 85 persen. DKI Jakarta 84 persen. Jabar 83 persen, Yogyakarta 82 perse, Kalteng 79 persen Jatim 77 persen, Jateng 76 persen, serta Sulsel 69 persen. "Ini daerah-daerah yang zona merah. BOR nya Zona merah, ada peningkatan sedikit saja RS akan kewalahan," katanya.

Kadir menjelaskan keterisian BOR diatas 70 persen di beberapa RS ini tentunya akan berdampak bahkan bisa ada kemungkinan pasien yang tidak bisa dirawat. "Implikasi lain adalah tenaga kesehatan yang akan capek (fatigue) dan kelelahan erdampak pada pelayanan yang tidak optimal, tidak maksimal dan akan menyebabkan angka kematian tinggi," paparnya.

Khusus untuk DKI Jakarta, Kadir menjelaskan kondisinya bahwa tempat tidur isolasi Covid-19 sudah berada pada keterisian 85,16 persen. Meski demikian, temuan Kemenkes terbaru menunjukkan bahwa ternyata tingkat kepadatan utility BOR ini tidak merata. Ada beberapa RS seperti RS TNI dan Polri, RS BUMN, RS milik Pemda dan beberapa RS swasta yang masih memiliki tempat tidur yang cukup.

"Kita harapkan rumah sakit-rumah sakit yang masih kurang utility BOR nya masih rendah, agar dapat menampung lemparan pasien dari Rumah-Rumah sakit yang penuh," pinta Kadir

Untuk itu, Kadir mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada kepala dinas kesehatan serta direktur-direktur rumah sakit seluruh Indonesia untuk melakukan penambahan tempat tidur berkisar hingga 30-40 persen dari tempat tidur yang ada. "Meliputi juga penambahan ruangan isolasi dan ruangan ICU," katanya.

Sementara itu, usai dikeluarkannya izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 24 Desember 2020 lalu, GeNose langsung diserbu oleh pembeli. Setidaknya, 100 alat telah ludes terjual. Tidak hanya itu, pihak luar negeri pun sudah mulai melirik produk hasil penelitian tim dari Universitas Gadjah Mada tersebut. Salah satunya, dari Singapura.

"Sudah ada pesanan dari salah satu perusahaan besar di Singapura," ujar salah satu tim peneliti GeNose dr. Dian Kesumapramudya Nurputra dalam acara peluncuran GeNose dan CePad oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek), kemarin (28/12).

Meski begitu, Dian memastikan, bahwa untuk saat ini, GeNose akan diproduksi khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Sehingga, kemampuan deteksi Covid-19 juga bisa semakin membaik.

Kapasitas produksi GeNose saat ini memang masih terbatas. Di awal Januari, produksi akan digejot hingga 2 ribu unit perbulan. Kemudian, ditargetkan bisa naik lagi hingga 5 ribu unit per bulan pada bulan selanjutnya.

Wajar saja GeNose jadi rebutan. Mengingat, dari uji diagnostik yang dilakukan di 8 Rs di Indonesia dengan sekitar 2 ribu subyek selama dua bulan, alat ini ternyata terbukti memiliki akurasi tinggi. Tercatat, GeNose memiliki sensitivitas sekitar 90-92 persen, spesifisitas 95-96 persen, dan akurasi 93 persen. Uji diagnostic ini pun dilakukan berbarengan secara head to head dengan swab PCR.

"Kami diuji langsung oleh dirjen farmalkes. Kemudian, dari hasil 1476 subjek, Kemenkes minta tambahan 500 lagi untuk memastikan skrining bebas pada populasi umum," paparnya.

Mengenai harga, GeNose dibandrol dengan harga Rp 62 juta. Pihaknya akan memberikan pelatihan khusus untuk mengoperasikan alat yang bisa dipakai 150 ribu kali tersebut. Selain itu, dapat digunakan secara bersamaan untuk menguji beberapa sample. Itu pun nantinya, setelah mencapai angka maksimal, tidak akan terjadi turun mesin. Hanya perlu dikalibrasi kembali. Karenanya, harga tes Covid-19 dengan GeNose bisa sangat terjangkau dibandingkan dengan tes lainnya. **(jpg)**

Limbah di Sungai Hitam

Sambungan dari halaman 1

ERVA (43) warga Desa Sukajaya termenung memandang Sungai Mertam. Dia teringat kondisi Sungai Mertam sangat berbeda sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu air sungai masih jernih. Banyak ikan. Sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga setempat.

Namun sekarang wajah Sungai Mertam berubah drastis. Setelah pabrik sawit PT. Bengkulu Sawit Lestari (BSL) beroperasi persis sekitar sungai tersebut. Dulunya, cerita Erva, Sungai Mertam tidak pernah mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Warga pun sekarang enggan terlalu bersentuhan dengan sungai. Mereka takut dapat membahayakan kesehatan.

"Warnanya (air sungai,red) berubah sejak adanya perusahaan sawit ini. Apalagi saat hujan. Airnya sangat hitam yang berasal dari hilir sungai lokasi pabrik," kata Erva Minggu (20/12) lalu.

Warga pernah protes terhadap PT BSL lantaran diduga mencemari sungai. Namun lama-kelamaan protes warga mengendor. Diantaranya mulai tidak berani protes. Menurut Erva, karena mereka dipekerjakan di pabrik PT BSL.

"Ngak ada yang mau protes lagi kini. Yang bicara juga tidak ada yang berani. Kalau sungai itu dipastikan jelas tercemar," ujarnya.

Senada juga dipertegas Nana (34), juga warga Desa Sukajaya. Dia membeberkan dampak tercemarnya sungai dirasakan semua warga setempat. Dulunya warga masih sangat sering mendapatkan ikan dari sungai. Namun sekarang sangat langka.

Bahkan warga mulai enggan mencari ikan di sungai karena bau airnya yang sudah tidak sedap. "Jarang, warga setempat sudah sangat jarang ke sungai itu sekarang," cetus Nana.

Sejak sungai tercemar, Nana mengaku warga tidak berani lagi menggunakan air sungai untuk minum dan mandi. "Tidak layak lagi. Nggak pernah digunakan untuk mandi apalagi minum," terang paparnya.

Tomi (45) mengaku dulunya sebelum adanya pabrik sawit, ikan di sungai masih sangat mudah didapatkan. Tomi menilai dampak pabrik sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan spesies Sungai Mertam. Buktinya, banyak ikan yang mati dan mengapung.

Ia menduga kuat, pihak pabrik membuang limbah ke Sungai Martam. Sedangkan limbah yang dibuang belum sepenuhnya steril. Apabila kondisi hujan sungai Mertam sebut Tomi, warnanya lebih hitam pekat. Karena diyakini kolam penampungan limbah sudah penuh dan dibuang dengan sengaja ke sungai tanpa disaring.

"Dulu tidak seperti itu, sekarang ikan sudah susah dan airnya memang sangat berubah. Diduga kuat ini pengaruh pabrik dan limbahnya," jelas Tomi.

Dari keterangan warga sekitar, RB mencoba mendatangi PT BSL. Pabrik ini mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO). Lokasinya berada di Desa Sukajaya. Di sana terdapat 11 kolam penyimpanan limbah dari pabrik. Ada dua kolam yang menampung limbah pabrik hingga boleh dibuang ke Sungai Martam. Versi PT BSL, limbah berupa cairan sudah benar-benar bersih dari zat berbahaya.

Penelusuran RB di lokasi, limbah dibuang PT BSL melalui pipa langsung ke Sungai Mertam. Limbah dibuang masih berwarna keruh dan cokelat pekat. Berbau. Dari tempat pembuangan limbah hingga muara atau hulu sungai, air berwarna hitam dan berbau sangat pekat. Panjang sungai diduga tercemar itu sekitar 3,5 km.

Panjang Sungai Mertam sebenarnya sekitar 20 km. Mulai dari Kedurang sampai Kedurang Ilir. Faktanya sungai berwarna hitam hanya 3,5 km dari titik sungai dibuang limbah PT BSL di Desa Sukajaya hingga muara sungai.

Dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten BS menyebut kondisi Sungai Mertam memang berubah warnanya dan juga bau. Namun demikian pihal DLHK enggan menyebut secara langsung kalau itu berasal dari limbah pabrik. Pihaknya setiap tiga bulan sekali melakukan cek limbah dan kadar baku mutu air.

Namun diakui Kepala DLHK Jonior Hafis, pihaknya satu kali menemukan pihak perusahaan membuang limbah secara langsung ke Sungai Mertam. Saat itu konidisi hujan deras dan masyarakat melapor langsung ke Sekda BS Yudi Satria. Setelah dilakukan pengecekan jelas Jonior, benar adanya kolam penampungan limbah tumpah langsung ke sungai. Namun versinya setelah dicek, tetap limbah dibuang tidak melebih baku mutu standar.

"Ya sekali kami dengan Sekda mengetahui limbah itu tumpah langsung ke sungai, yakni enam bulan lalu tapi ya itu meskipun tumpah baku mutu tidak melebihi," jelas Jonior.

Kendati demikian pihaknya selalu memantau proses pembuangan limbah tersebut, bahkan Jonior siap mendatangi langsung perusahaan dan melakukan pengecekan apabila ada temuan masyarakat. "Kalau ditemukan limbah dibuang secara sengaja kami siap datangi perusahaan," ujarnya.

Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK melalui Kanit Tipidter Ipda.Priyanto, SH mengatakan Sungai Mertam yang tercemar tersebut merupakan akibat dari hulu sungai. Disana terdapat pabrik sawit PT.BSL yang mempunyai limbah bekas pengolahan sawit menjadi CPO .

Meskipun secara langsung pihaknya belum bisa membuktikan limbah itu dibuang dengan sengaja ke sungai, tapi kandungan air sungai hilir sangat berbeda dengan kandungan sungai di hulu pabrik. Hal inilah yang memperkuat bahwa Sungai Mertam tercemar oleh limbah pabrik PT.BSL.

Selain itu Priyanto mengaku, berbagai spesies penghuni sungai Mertam yakni ikan sudah terbukti ada yang mati, bahkan ikan sudah langka. Ini menunjukkan bahwa sungai tersebut sudah tidak layak bagi ikan-ikan.

"Hasil laboratorium sering menunjukkan di bawah ambang batas, namun sebenarnya sungai itu memang sudah tercemar limbah. Itu sudah jelas dan kasat mata, sungai hitam, bau dan ikan mati," tegas Priyanto.

Sedangkan dari penjelasan Humas PT.BSL Idius Safari, SH didampingi Asisten IPAL mengatakan, untuk proses pembuangan limbah pihaknya membantah dibuang secara langsung ke sungai Mertam. Akan tetapi dijelaskannya limbah itu melalui proses 11 kolam. Dimana kolam terakhir itu sedimen, yakni semua zat diendapkan dan setelah bersih maka dibuang ke Sungai Mertam. Untuk jarang pipa pembuangan ke sungai yakni berjarak 3,5 km.

"Secara singkatnya kami selalu laporan per triwulan ke LHK, Kabupaten hingga Provinsi. Setiap harinya kadar ataupun semua yang berkaitan dengan limbah selalu dicek sebelum dibuang ke sungai Mertam," jelas Idius.

Pihak PT.BSL juga mengklaim bahwa Sungai Mertam itu sungai kelas III. Bukan untuk minum dan mandi. Versinya, diperbolehkan membuang limbah yang sudah steril. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu Beni Ardiansyah mengaku bingung dengan penilaian yang diberikan pada PT.BSL yang baru keluar 11 Desember lalu. Dimana perusahaan ini dapat Proper Biru. Padahal jelas Beni perusahaan ini belum ada indikator perbaikan.

"Itu yang kemaren kita agak aneh perusahaan ini dapat biru sedangkan mereka belum ada indikator perbaikan," kata Beni.

Oleh sebab itu Beni mengaku dalam waktu dekat pihak Walhi Bengkulu akan turun ke sungai Mertam dan dan mengecek indikator perusahaan PT.BSL yang mendapat dapat proper biru.

Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Bengkulu Hendri Satrio meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan pencemaran Sungai Mertam. Menurutnya bila terbukti PT BSL mencemari sungai, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kami yakin bisa aparat penegak hukum profesional. Bisa mengungkap kasus ini secara transparan dan adil," kata Hendri.

Hasil kajian Bidang Hukum PGK Provinsi Bengkulu perusahaan pelaku pencemaran lingkungan bisa diancam hukuman pidana. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 60 UU PPLH menyebut setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Lalu Pasal 104 UU PPLH bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Selain pidana karena pembuangan limbah, juga bisa dimasuk dalam pasal pidana pencemaran lingkungan. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan misalnya membuang limbah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar.

Lalu jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.

"Tinggal lagi nanti hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Pasal mana yang akan dikenakan," demikian Hendri. **(tek)**

Dibuang Sebelum Memenuhi Syarat

Sambungan dari halaman 1

PT BSL disebutkan Jonior sengaja membuang limbah ke Sungai Mertam, dengan alasan limbah telah memenuhi syarat. Akan tetapi kenyataannya, limbah yang dibuang oleh perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan sungai tercemar.

"Ya berdasarkan kasat mata sungai sudah berubah. Dan memang limbah yang disalurkan langsung ke sungai Mertam, yang jadi masalah limbah itu belum memenuhi syarat dan langsung dibuang dan menyebabkan pencemaran," ujar Jonior

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD BS Holman, SE mengaku apabila benar pihak perusahaan tidak memenuhi syarat dalam pembuangan limbah dan mencemari lingkungan, maka dengan tegas dewan mengecam perusahaan PT BSL.

Selama ini sebut Holman PT BSL selalu bermasalah. Dimana terakhir bermasalah masalah tanah dan apabila kembali bermasalah dengan lingkungan maka dewan sangat kecewa.

"BSL jangan nambah-nambah masalah, bila memang limbah yang dibuang itu belum pas maka jangan buat berdampak ke lingkungan," tegas Holman. **(tek)**

Setiap Hari Ikan Bergelimpangan

Sambungan dari halaman 1

Soal ikan yang mati, dia memastikan itu bukan ulah manusia ataupun racun dan lainnya. Namun akibat limbah pabrik yang mengendap di dasar sungai dan mengakibatkan ikan mati.

"Tidak ada penyebab lain selain akibat sungai itu berubah, jadilah dugaan kuat ikan mati karena limbah," tegasnya

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan BS Novianto, M.Si menanggapi banyaknya ikan mati seperti disampaikan warga dan para pemancing pihaknya akan melakukan pemeriksaan atas banyaknya ikan-ikan mati itu.

Dia berharap warga pro aktif melaporkan kejadian yang merusak spesies penghuni sungai agar pihak terkait dapat merespon dan melakukan tindakan.

"Kalau benar banyak yang mati kita turun dan buktikan. Kalau penyebabnya limbah maka pabrik harus bertanggung jawab," ujar Novianto.**(tek)**

Lintas

Komen FPI, Kena Tonjok

BENGKULU – Edy Rifai (54) warga Jalan Danau RT 07 Kelurahan Jembatan Kecil menjadi korban pemukulan. Mukanya ditonjok pria dikenal melalui facebook, membuat hidungnya berdarah.

Apa yang melatarbelakangi pemukulan ini? Dalam laporan Edy Rifai di Polda Bengkulu, penganiayaan terjadi lantaran komennya di facebook menanggapi postingan akun facebook atas nama Samsudin, Sabtu (26/12) siang. Samsudin mengomentari soal FPI dan Habib Rizik. ''Habib Rizik dan Organisasi FPI diproses. Kenapa menteri korupsi tak diproses" cuit Samsudin.

Dipostingan itu Edy Rifai memberi tanggapan "Jangan Asal Omong,". Ternyata komentar itu membuat Samsudin tersinggung. Lalu menanyakan alamat korban, untuk bertemu.

Singkatnya, tak berapa lama korban memberi alamatnya, Samsudin mendatangi kediaman korban. Saat bertemu terjadi cekcok mulut mempertahankan argumen masing-masing. Puncaknya, tanpa diduga korban, pelaku melayangkan kepalan tangan kanannya yang tepat menyasar ke hidung korban.

Korban pun meringis kesakitan, darah segar mengucur dari hidungnya. Sedangkan pelaku usai melayangkan bogem, seketika pergi. Sayangnya saat dikonfirmasi RB, korban tidak berada dirumah. Namun Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes. Pol. Sudarno, S.Sos. MH membenarkan kejadian tersebut, sedang diusut. "Kita lihat dari laporan memang ada kejadian tersebut. Saat ini sedang ditangani anggota," sampainya.(**wij**)

Dikeroyok, Pemuda Luka Robek

BENGKULU – Nasib malang dialami AP (17), warga Kelurahan Malabero. Ia harus mengalami luka robek di kepala lantaran menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda. Terjadi saat korban berada di kosan miliknya di Kelurahan Kebun Kenanga, Minggu (27/12).

Kronologi pengeroyokan, korban sedang tidur di kosan miliknya, datang pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang langsung mendobrak pintu kosan. Melihat korban yang setengah sadar lantaran sedang tertidur dan kaget karena didobrak, pelaku kemudian secara bersamaan memukuli korban mengunakan botol, kayu dan besi.

Para pelaku diduga memiliki dendam dan sakit hati terhadap korban hingga nekat melakukan penyerangan. Akibatnya korban mengalami luka lecet di kepala, luka di bahu dan lengan bagian kiri. Tak terima, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung.

Kapolres Bengkulu AKBP. Pahala Simanjuntak, S.Ik melalui Kapolsek Ratu Agung, Iptu. Noviaska, MH mengatakan sedang melakukan penyelidikan, melacak keberadaan pelaku pengeroyokan itu. "Benar ada laporan dugaan pengeroyokan. Anggota saat masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku," ujarnya.(**tok**)

Investasi Bodong, Rugi Rp 1,7 Miliar

BENGKULU - Niat untuk menambah penghasilan dengan cara investasi, malah berujung rugi besar. Dialami Syahril (45), wiraswasta warga Desa Taba Pasema, Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah. Dia menjadi korban penipuan. Pelaku berinisial Ku, warga Kota Bengkulu menawarkan kerja sama jual beli uang digital. Ternyata investasi yang ditawarkan Ku, bodong alias palsu. Alhasil, Syahril harus menanggung kerugian cukup besar, mencapai Rp 1,7 miliar lebih

Syahril melaporkan Ku ke Polda Bengkulu belum lama ini. Kepada petugas dia menceritakan penipuan ini berawal bulan Juni lalu, Ku mengajak menjadi agen Seven Day Profit (SDP). Dikemukakan Ku dalam meyakinkan korban, bisnis ini bergerak di bidang jual beli uang digital. Dimana kewajiban korban merekrut member atau agen lainnya. Dengan catatan setiap agen akan mendapatkan beberapa akun. Setiap akun akan mendapatkan keuntungan setiap harinya.

Dari sinilah awal ketertarikan Syahril dalam bisnis tersebut. Dia berhasil merekrut 420 agen dengan uang yang telah disetorkan oleh masing-masing pemilik akun mencapai Rp 1,739 miliar. Semua uang itu disetorkan Syahril ke Ku.

Dalam perjalanannya, belum lagi mendapat pembagian keuntungan, usaha tersebut macet. Kontan saja para member atau pemilik akun yang sudah menyetor uang ke Syahril meminta modalnya dikembalikan.

Panik atas banyaknya permintaan itu, Syahril menemui Ku. Pertemuan berlangsung pada November lalu di Jalan Raden Patah, Kelurahan Pagar Dewa. Syahril mendesak Ku agar mengembalikan semua uang yang telah ia setorkan. Saat itu Ku menyatakan bersedia, hanya saja meminta tempo dua minggu.

Setelah dua minggu berlalu, Ku tak kunjung memenuhi janjinya. Korban merasa telah ditipu akhitnya memutusakan untuk menyelesaikan kasus ini ke jalur hukum.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes. Pol. Sudarno, S.Sos. MH mengatakan, untuk korban dalam kasus ini tidak hanya warga Bengkulu. ''Kasus seperti ini sudah sering terjadi, ini yang dilaporkan baru satu agen. Kasus ini masih kita proses, '' singkat Sudarno.(**wij**)

SHANDY/RB

SOAL NELAYAN: Rapat lintas sektoral terkait konflik antar nelayan yang dihadiri Bupati Bengkulu Utara, Ir. Mian, Direktur Polair Polda Bengkulu, Kapolres dan Dandim BU, kemarin (27/12).

Usut Pembacokan dan Penembakan Nelayan

Pemkab BU Bahas Permasalahan Trawl

ARGA MAKMUR – Polres Bengkulu Utara (BU), kemarin (28/12) melakukan pertemuan dengan nelayan tradisional. Terutama nelayan di Kecamatan Air Napal dan Batik Nau. Tak hanya persoalaan pemblokiran jalinbar yang sempat dilakukan massa, tetapi juga konflik berdarah antar nelayan Pulau Baai dengan nelayan BU yang terjadi Jumat (25/12) lalu.

Bentrok tersebut telah mengakibatkan tiga nelayan asal Pulau Baai Bengkulu luka Bacok, baik di kepala maupun di bagian tubuh lainnya. Sedangkan nelayan BU juga menjadi korban karena mengalami luka tembak senapan angin.

Direktur Polisi Air Polda Bengkulu, AKBP. Eric Sartani Marbun, S.IK yang hadir dalam pertemuan tersebut menuturkan kalau nelayan BU maupun nelayan Pulau Baai sepakat untuk dilakukan penegakan hukum. Sehingga dipastikan akan ada satker-satker yang akan menangani pelanggaran hukum tersebut. "Termasuk keiinginan dari nelayan tradisional dari pertemuan kita tadi (kemarin,red)," ujar Eric.

Dikemukakan Eric, penegakan hukum nantinya bukan hanya terkait alat tangkap trawl yang digunakan oleh nelayan Pulau Baai uang menjadi sumber konflik. Namun juga terkait kejadian penganiayaan, dimana ada korban di kedua belah pihak. "Ada dua tindak pidana yang akan kita proses. Pertama terkait alat tangkap, kedua perbuatan yang menyebabkan orang lain luka," tegas Marbun.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian yang juga hadir dalam acara pertemuan kemarin meminta kedua pihak terutama nelayan asal BU untuk saling menahan diri. Sehingga tidak lagi terjadi bentrokan. "Jangan sampai kejadian ini terulang lagi," tegas Mian.

Disisi lain, menyoal program kelautan yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Pemkab BU juga akan melayangkan surat. Meminta untuk diterbitkan aturan yang jelas sehingga bisa melindungi semua pihak dalam beraktivitas. "Kewenangan kelautan ini di Pemprov," ujar Mian.

Selain Bupati, Kapolres dan Dir Polair, hadir juga Dandim 0423 BU Letkol. Inf. Agung Pramudyo Saksono, M.Si. Termasuk Kepala DKP Provinsi Bengkulu, Sri Hartati.

Terpisah, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes. Pol. Sudarno, S. Sos. MH membenarkan pasca bentrok antar nelayan ini, dilakukan proses penegakkan hukum. Apalagi nelayan Pulau Baai yang menjadi korban pembacokan melapor ke Polda Bengkulu. Setelah nelayan tradisional Bengkulu Utara menjadi korban penembakan melapor ke Polres Bengkulu Utara. ''Ya dua dugaan tindak pidana yang sama-sama kita proses. Soal alat tangkap trawl, itu ditangani oleh Tipidter. Sedangkan dua kasus penganiayaan (pembacokan dan penembakan, Red) ditangani Ditresmum. Semuanya masih proses pemeriksaan," sampai Sudarno.

Selain soal tidak pidana, Polda Bengkulu dan Polres Bengkulu Utara, juga melakukan upaya mediasi kedua belah pihak yang berkonflik. ''Hari ini (kemarin) sudah ada rapat untuk mencari titik temu yang dipimpin oleh Kapolres Bengkulu Utara," ujarnya.

Terkait patroli yang dilakukan polisi di laut mengantisipasi bentrok antar nelayan dan membasmi penggunaan alat tangkap ilegal, diakui Sudarno selama ini belum maksimal. Patroli hanya dapat dilakukan di garis pantai, lantaran keterbatasan kemampuan kapal patroli yang dimiliki Polda Bengkulu. ''Kapal yang ada baru tipe C. Sementara kita ini kan samudera lepas. Jadi saat ini baru sebatas patroli di garis pantai atau di bibir pantai," pungkasnya.(**qia/wij**)

WINDI//RB

SAMPAIKAN: Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandu Pramono Kartika menyampaikan perkembangan penyidikan perkara korupsi proyek pengaman banjir Sungai Bengkulu.

Akhir Tahun, Kejati Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Korupsi Proyek Pengendali Banjir

BENGKULU – Target penyidik Kejati Bengkulu, dilakukan penetapan tersangka korupsi proyek pengendali banjir Sungai Air Bengkulu tahun 2019 senilai Rp 6,9 miliar di akhir tahun ini, tak kesampaian. Penyidik beralasan terkendala belum didapati hasil audit BPKP Bengkulu, memastikan besaran kerugian negara dalam dugaan korupsi ini.

Sebagaimana diakui Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandu Pramono Kartika, SH, MH. Paling cepat gelar perkara untuk penetapan tersangka baru bisa dilakukan di awal tahun depan. '' Finalnya nanti kita tunggu hasil proses BPKP untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kita tunggu hasilnya," ujarnya.

Dikemukakan Pandu, dari awal proyek ini sudah tidak tidak benar, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kerugian negara yang tak kecil. ''Kita sudah melakukan uji lab dan sudah minta keterangan ahli konstruksi, menyatakan proyek ini tidak sesuai," jelas Pandu.

Hasil tiga kali uji laboratorium yang dilakukan serta pendapat saksi ahli kontruksi menyatakan mutu hasil kegiatan pembangunan pengendali banjir Sungai Air Bengkulu tahun 2019 tidak sesuai yang diharapkan. "Memang dari awal proyek ini sudah tidak benar. Kita sudah lakukan uji laboratorium sebanyak tiga kali, menyatakan kalau proyek ini tidak sesuai dengan harapan," sampainya.

Dalam penyidikan dugaan korupsi pengendali banjir Sungai Air Bengkulu tahun 2019, tim penyidik Pidsus Kejati telah memeriksa 15 saksi. Diantaranya, Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani Toha, Aprizon Nazardi selaku KPA dan Isnani selaku Direktur CV Merbin Indah. Juga Ibnu Suud Konsultan Pengawas, Herdi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta KPA Penganti, Septi Erwandi.

Adapun pembangunan pengendali banjir Sungai Air Bengkulu dari penghitungan internal Kejati ada potensi kerugian negara mencapai Rp 537 juta. Kerugian negara tersebut berasal dari konstruksi beton yang tidak sesuai spek dan sejumlah item pekerjaan lainnya.(**wij**)

Tertangkap Maling Kipas dan Gorden di Sekolah

WINDI//RB

AMANKAN: Dua pemuda diamankan polisi setelah kedapatan melakukan pencurian di SMA 4 Muhammadiyah, kemarin (28/12).

2 Pemuda Ditahan Polsek Teluk Segara

BENGKULU – Belajar secara daring dari di rumah yang diterapkan seluruh sekolah untuk mengantisipasi penularan Covid-19, membuat kondisi sekolah sepi. Keadaan demikian dimanfaatkan dua pemuda berbuat tak benar. Adalah RN (19) dan DN (19) warga Kelurahan Kampung Bali, terekam CCTv SMA 4 Muhammadiyah sedang beraksi mengambil barang-barang di ruangan belajar (kelas) yang kosong.

Ulah dua pemuda tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Teluk Segara. Gerak cepat Polsek Teluk Segara, kemarin (28/12) siang, RN dan DN berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing. Saat ini kedua tersangka pencurian ini harus mendekam di sel Polsek Teluk Segara.

Staf SMA 4 Muhammadiyah Bengkulu, Dewi ditemui RB membenarkan adanya pencurian itu. Terbongkar setelah pihak sekolah mendapati barang-barang di dalam kelas banyak yang hilang. Ketika dilakukan pengecekan di rekaman CCTv, rupanya barang tersebut dicuri dua pria tersebut. "Kita mulai curiga karena barang-barang di dalam kelas banyak hilang seperti kipas angin dan kain gorden," ujarnya.

Ditambahakn Dewi, berharap tidak ketahuan kedua pelaku merusak kamera CCTv. Sedikitnya dua CCTv yang dirusak. Hanya saja aksi keduanya masih terekam di CCTv lainnya. "Walau merusak CCTV masih ada rekamannya. Dari rekaman inilah kita tahu ada pencuri yang masuk ke sekolah pada siang hari saat sekolah sepi. Rekaman ini kita sampaikan ke polisi sehingga bisa diidentifikasi kedua pelaku tersebut. Tadi anggota Polsek Teluk Segara telah menangkap kedua pelaku," jelasnya.

Pengakuan salah satu tersangka RN, nekat mencuri untuk keperluan sehari-hari. Barang hasil pencurian rencananya dijual melalui forum jual beli di media sosial. "Barang-barangnya belum di jual. Memang ada rencana mau dijual di forum jual beli. Uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari," ujar RN.(**wij**)

Shandy/rb

AKTIFITAS LANCAR: Nampak lalu lintas kendaraan yang mulai melintasi jembatan baru di Desa Tanjung Agung.

Truk di Atas 15 Ton Diimbau Tak Melintas

ARGA MAKMUR – Harus menunggu empat tahun untuk arus lalu lintas Desa Tanjung Agung menuju Arga Makmur lancar. Kini jembatan baru yang mulai dibangun sejak 2019 lalu sudah bisa dilintasi dan membuat akses dari Bengkulu Tengah maupun Kota Bengkulu menuju Arga Makmur kembali lancar.

Pukul 05.30 WIB pagi kemarin, Polisi bersama tenaga teknis kontraktor membuka jembatan yang untuk bisa dilintasi oleh kendaraan. Sedangkan jembatan darurat belly yang selama ini digunakan ditutup dan memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Septi Erwadi menuturkan jika jembatan tersebut sudah bisa dilintasi oleh pengendara. Namun ia meminta untuk kendaraan dengan bobot total di atas 15 ton untuk tidak melintasi jembatan tersebut.

"Karena memang jembatan tersebut tidak dibangun untuk kendaraan yang memang beratnya mencapai di atas 15 ton , apalagi lebih," katanya.

Ia mengakui jika dalam pemantauannya, memang banyak kendaraan angkutan berat terutama angkutan material dengan menggunakan kendaraan besar beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Ia meminta untuk tidak melintasi jembatan tersebut menghindari kerusakan yang lebih cepat dari perkiraan.

"Apalagi memang jembatan ini baru dibangun. Kita tidak ingin terjadi kerusakan akibat aktifitas lalu lintas kendaraan yang melebihi tonase kemampuan jalan dan jembatan tersebut," terangnya.

Sementara Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melalui Kasat Lantas Iptu. Yenni Puspita, SH menuturkan jika kemarin polisi sudah melakukan pembukaan badan jalan. termasuk melakukan pengaturan lalu lintas agar kendaraan melintasi jembatan tersebut.

"Kita sudah copot semua pemberitahuan penutupan dan sehingga kendaraan ktia arahkan untuk melintasi jembatan," terangnya.

Dibukanya akses jembatan tersebut juga mengurai kepadatan yang selama ini terjadi di jalur Lais – Arga Makmur termasuk Jalan Lintas Barat (Jalinbar) menuju Bengkulu. Ini lantaran seluruh kendaraan angkutan melintasi jalan Lais menuju Jalinbar. Apalagi sejak jembatan belly ditutup akibat rusak, seluruh kendaraan melintasi jalan tersebut.

"Dengan sudah bisa difungsikannya jembatan, artinya bisa mengurai kemacetan karena masyarakat dari arah Bengkulu dan hendak menuju Arga Makmur bisa kembali melintasi Desa Tanjung Agung Palik," pungkas Kasat. **(qia)**

Shandy/rb

KESEMBUHAN MENINGKAT: Kabid P2P Dinkes Ujang Ismail saat memaparkan kondisi Covid-19 di BU. Termasuk terus meningkatnya angka kesembuhan.

Angka Kesembuhan 75 Persen

Tiga Kasus Positif Corona, Dua Meninggal

ARGA MAKMUR – Kemarin (28/12) di Bengkulu Utara (BU) bertambah tiga kasus positif Covid-19. Tak hanya itu, ada dua lagi kasus meninggal yang merupakan warga BU. Hingga jumlah kasus meninggal di BU menjadi 14 orang dan 219 kasus positif.

Dari jumlah kasus positif tersebut, 151 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Ini artinya saat ini masih ada 54 kasus aktif atau warga yang dinyatakan positif.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Ujang Ismail, SKM, M.Ph menuturkan jika dua tambahan kasus meninggal dunia tersebut sudah meninggal seminggu lalu. Namun memang saat ini hasil lab swab jenazah baru terbit dan hasilnya negatif.

"Jadi memang bukan baru meninggal. Sudah meninggal hanya saja saat itu belum berstatus positif," terangnya.

Namun meskipun saat meninggal belum berstatus positif Covid-19, proses pemulasaran dan pemakaman sudah dilakukan sesuai protokol kesehatan. Hal ini lantaran saat pasien dirawat memang menunjukan gejala-gejala layaknya terjangkit Covid-19.

"Sehingga memang kita tidak khawatir. Karena sudah proses pemulasaran dan pemakaman sudah seusai prokes," terangnya.

Ia menuturkan saat ini ada 54 orang yang masih berstatus kasus aktif. Ini artinya kesembuhan di BU mencapai 75 persen dari jumlah kasus yang ada di BU. Ia juga menuturkan secara medis RSUD Arga Makmur siap dan mampu melakukan penanganan medis bagi pasien terjangkit.

"Namun penanganan medis di RSUD baru dilakukan jika memang ada keluhan medis. Namun saat ini yang melonjak kasusnya adalah Orang Tanpa Gejala (OTG) sehingga memang tidak perlu melakukan perawatan medis dan hanya perlu melakukan isolasi mandiri," pungkas Ujang. **(qia)**

Tetap Daring, Dana BOS untuk Pulsa Siswa

ARGA MAKMUR – Terus meningkatnya kasus Covid-19 di Bengkulu Utara (BU) membuat Pemkab BU sepertinya akan mengambil keputusan tetap melaksanakan belajar online atau dalam jaringan (Daring). Sesuai jadwal, siswa akan mulai belajar kembali empat Januari mendatang.

Kadis Pendidikan Dr. Agus Haryanto, MM keputusan ini diambil dengan pertimbangan terus meningkatnya kasus Covid-19 di BU. Sehingga sangat membahayakan pelajar dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan baik itu guru hingga wali murid.

"Sehingga memang dengan kondisi penyebaran saat ini. Sangat berisiko jika memang siswa kita kembalikan ke sekolah. Sehingga kemungkinan kita akan tetap melakukan pembelajaran secara daring," terangnya.

Ia menuturkan jika memang belajar secara daring masih dilakukan, maka sekolah tetap bisa memberikan bantuan pulsa atau paket data pada siswa. Dananya tetap akan diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Dana BOS tetap bisa untuk membantu aktifitas belajar daring siswa. Selagi daring masih diberlakukan, maka itu tetap bisa diberikan," terangnya.

Saat ini seluruh aktifitas masyarakat sudah terdapat klaster penyebaran Covid-19. Termasuk klaster pendidikan atau klaster pelajar. Terutama penyebaran yang bersumber dari klaster keluarga lalu menularkan pada kelaurganya yang memang keluarga besar pendidikan.

"Sehingga memang saat ini rantai penyebaran sudah sangat menyebar. Sehingga memang kita lebih mempertimbangkan terkait kesehatan masyarakat dalam hal ini tenaga pendidikan dan siswa," pungkas Agus. **(qia)**

Shandy/rb

BANDEL: Tim Satgas saat mendatangi lokasi masyarakat yang membandel lantaran masih melakukan pesta pernikahan. Ini bertentangan dengan SE Bupati terkait larangan keramaian.

Kerumunan Pesta Pernikahan Masih Terjadi

ARGA MAKMUR – Meskipun sudah satu minggu diterapkan, nyatanya warga masih saja membandel tidak mematuhi Surat Edaran Buapti terkait larangan keramaian. Buktinya, hingga kemarin (28/12) masih saja ada warga yang menggelar pesta pernikahan lengkap dengan pentas musik dan hidangan prasmanan.

Parahnya lagi, kejadian ini terjadi di wilayah Kota Arga Makmur. Sedangkan Kota Arga Makmur kini menjadi penyebaran terbesar kasus Covid-19 di BU.

Pukul 16.00 WIB kemarin, tim Satgas Covid-19 mendatangi lokasi pesta pernikahan di Desa Karang Suci. Meskipun undangan menggunakan masker saat tim Satgas tiba, namun tidak sedikit undangan yang duduk tanpa mengindahkan jarak sesuai SE Bupati.

Selain itu, tamu undangan juga masih secara bergantian menyanyi dengan mic yang sama. Termasuk masih dilakukan aktifitas bersalaman dengan pengantin dan makan secara prasmanan.

Uniknya, Saat tim Satgas meminta agar acara dihentikan panitia meminta waktu satu jam lagi untuk melakukan aktifitas pesta. Bahkan, belum lagi tim Satgas keluar dari lokasi pesta, acara nyanyi bersama sudah kembali dilanjutkan.

Kabid Satpol PP Edi yang juga Ketua Tim Penindakan Satgas Covid-19 yang kemarin datang berniat membubarkan pesta menuturkan jika ia sudah memperingatkan agar tidak boleh melakukan pesta pernikahan. Masyarakat hanya boleh melakukan akad nikah, itupun dengan total warga yang hadir maksimal 20 orang.

"Namun memang masih kita temukan pelanggaran, makanya kita hari ini (Kemarin, red) turun untuk meminta acara dihentikan," terangnya.

Ia mengakui jika memang panitia acara meminta waktu satu jam hingga pukul 17.00 WIB untuk menghentikan acara. Satgas sendiri belum mengambil langkah tegas dengan menghentikan langsung acara. Namun ia memastikan kedepannya Satgas akan lebih tegas lagi.

"Kita tidak mengizinkan waktu untuk permintaan waktu satu jam tersebut. Namun memang dengan pertimbangan mereka mempersiapkan untuk menghentikan acara," ujar Edi. **(qia)**

1.000 Lebih Kuota PPPK Khusus Guru

ARGA MAKMUR – Bengkulu Utara (BU) infonya mendapatkan kuota 1.000 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK tersebut khusus tenaga pendidikan alias guru yang kini sudah berstatus non PNS dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BK-PSDM) BU Drs. H. Setyo Budi Raharjo, M.Pd menuturkan jika perekrutan PPPK yang rencananya dilaksanakan 2021 khusus untuk tenaga guru. Sehingga tidak ada PPPK untuk tenaga teknis dan kesehatan.

"Program PPPK untuk guru tersebut adalah program Kemendikbud dari program Sejuta Guru 2021. Sehingga memang khusus guru dan tidak ada tenaga lainnya," terangnya.

Diharapkan dari program sejuta guru tersebut bisa mengangkat guru-guru non PNS yang sudah bertugas dan tidak memenuhi syarat umur lagi untuk menjadi CPNS. Termasuk yang memang ingin menjadi PPPK dan memenuhi syarat.

"Jadi memang diperuntukan bagi guru. Nantinya dalam setahun ini bisa jadi dilaksanakan lebih dari satu kali tes. Sampai terpenuhi satu juga untuk kuota nasional," terangnya.

Ia menuturkan untuk tenaga non guru masih akan dibuka untuk pelaksanaan CPNS. Sedangkan kemungkinan besar tidak ada lagi kuota guru jika memang dilakukan tes CPNS 2021 mendatang lantaran diganti dengan perekrutan P3K.

"Karena memang sesuai arahan Kemendikbud, usulan kuota CPNS tenaga pendidikan sementara diganti dengan usulan kuota pendidikan untuk PPPK. Ini terkait kemungkinan tidak adanya kuota guru dalam tes CPNS," terangnya.

Terkait dengan kuota, ia menuturkan jika Pemkab BU belum mendapatkan kejelasan. Pemkab BU juga masih menunggu petunjuk teknis dan waktu pelaksanaan perekrutan PPPK dari Kemendikbud.

"Kita masih menunggu teknis pelaksanaannya seperti apa. Karena memang masih akan ada rakor-rakor selanjutnya dengan Kemendikbud," pungkas Budi. **(qia)**

YUDI/RB

SEPI: Lokasi wisata Pantai Seluma sepi pengunjung.

Dukung Penutupan Lokasi Wisata

SELUMA - Selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru (Nataru), seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Seluma ditutup sementara. Penutupan destinasi wisata ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Seluma. Mengingat saat hari libur, kawasan wisata selalu ramai dipadati pengunjung.

Penutupan lokasi wisata ini mendapatkan respon positif berbagai pihak. Kades Pasar Seluma, Hertoni mengatakan jika berkaca pada hari libur sebelumnya, masih banyak pengunjung yang mendatangi lokasi pantai walaupun di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Dengan demikian membuat resah warga sekitar karena hal itu tidak mengikuti imbauan dari pemerintah. Bahkan, mereka terpaksa membuat keputusan untuk melakukan pengusiran dan penutupan akses ke lokasi pantai.

Oleh karena itu, Hertoni sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah menutup sementara lokasi wisata saat hari libur tahun baru nanti.

"Jika memang itu kebijakan dari pemkab maka kita siap mendukung. Di tengah pandemi seperti ini kita juga khawatir apabila ada wisatawan dari luar," ungkapnya.

Ia juga menceritakan saat hari libur lebaran lalu, pihaknya juga bekerjasama dengan TNI-Polri melakukan penutupan lokasi wisata Pantai Seluma. Mengingat walaupun di tengah pandemi, sangat banyak pengunjung yang datang sehingga meresahkan warga desanya.

Hertoni berharap kebijakan ini bisa didukung dan dipatuhi semua pihak. Sehingga tak hanya sebatas kebijakan saja namun juga memang ada ketetapannya. "Kita harap ada upaya pemda untuk melakukan penjagaan," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, S.IK memastikan polisi akan menggelar patroli rutin dan membubarkan kerumunan bila ditemukan. Selain itu, untuk lokasi wisata sendiri akan juga dilakukan pemantauan. Kapolre berpesan agar masyarakat selalu taat dalam mengikuti protokol kesehatan.

"Jika ditemukan kerumunan dan tidak mematuhi prokes akan kita bubarkan. Saya harap bisa dimaklumi, karena pemutusan penyebaran virus corona itu harus dilakukan bersama-sama," tuturnya.**(cup)**

Pemeliharaan Lampu Jalan Nihil Anggaran

SELUMA - Lampu penerangan jalan yang terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Seluma tampaknya tidak akan terawat lagi. Usulan pemeliharaan lampu jalan pada tahun 2021 nanti tidak terealisasi.

Pengajuan anggaran untuk perawatan lampu jalan dinilai sangat penting karena kondisi lampu jalan saat ini sudah perlu dilakukan perbaikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihaan dan Pertamanan (DLHKP) Seluma, Hadi Susanto, S.Sos, MM melalui Kabid Pertamanan, Joko Handoyo, SKM menjelaskan tahun 2021 mendatang, pihaknya telah mengajukan beberapa usulan ke Komisi II DPRD Seluma. Yakni pengajuan usulan untuk pemeliharaan lampu jalan, pengadaan lampu jalan, serta usulan pemasangan videotron dan taman kota di area lokasi Simpang Enam Tais. Hanya saja, dari usulan yang telah diajukan tersebut ternyata ada beberapa yang tak bisa terealisasikan. Seperti anggaran pemeliharaan lampu jalan.

"Untuk pemeliharaan lampu jalan menurut kita sangat penting sebagai penerangan kota. Jika tak direalisasikan, apabila ada kerusakan pada lampu, ya tidak bisa diperbaiki," sesalnya.

Padahal diketahui, setiap tahunnya pajak lampu jalan yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Yakni mencapai sekitar Rp 6 miliar setiap tahunnya. Dengan perolehan pajak lampu tersebut, seharusnya dapat disisihkan untuk pengadaan pemeliharaan lampu jalan. Mengingat lampu jalan sendiri berguna untuk menambah penataan kota terutama pada penerangan kota saat malam hari. "Yang kita usulkan kemarin itu untuk pemeliharaan lampu jalan sebesar Rp 200 juta, pengadaan lampu Rp 200 juta, tapi tak ada terealisasi," beber Joko.

Untuk usulan pengadaan lampu jalan, menurutnya, sangat penting karena kondisi lampu jalan saat ini sudah banyak yang mengalami kerusakan. Terutama pada kondisi lampu jalan yang sudah lama. Joko mengharapkan pihak terkait nantinya dapat melakukan pengkajian terkait usulan yang telah disampaikan tersebut.**(cup)**

YUDI/RB

SOSIALISASI: BPJS Kesehatan Seluma menggelar sosialisasi kepada peserta Jamkesda, Senin (28/12).

Nonaktifkan 3.990 Peserta Jamkesda

SELUMA - Pemkab Seluma menonaktifkan 3.990 peserta BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai tahun 2021 mendatang. Hal ini setelah Pemkab Seluma melakukan rapat pembahasan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Seluma.

Tahun 2021 nanti yang masih tercover Jamkesda Pemkab Seluma hanya sebanyak 8.000 peserta saja. Selain itu, untuk anggaran BPJS Jamkesda sendiri tahun 2021 hanya sebesar Rp 3,8 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Seluma, Ricco Hanggara membenarkan hal tersebut. Jumlah itu diketahui setelah menerima surat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma terkait jumlah peserta Jamkesda tahun 2021. Dalam surat itu, hanya 8.000 orang yang diajukan menjadi peserta Jamkesda terhitung 1 Januari - 31 Desember 2021. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 3.990 peserta dari jumlah sebelumnya pada tahun ini yaitu 11.990 peserta. Pengurangan itu sendiri sesuai Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 dan No 64 Tahun 2020 dimana masyarakat miskin dan tidak mampu didaftarkan sebagai peserta PBI JK oleh pemerintah pusat dengan fokus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Tahun 2021 ada pengurangan sebanyak 3.990 peserta, terhitung TMT penonaktifkannya 1 Januari nanti," kata Ricco.

Ricco menambahkan DTKS yang selama ini ditanggung Pemkab Seluma sebanyak 2.592 peserta, data PBPU menunggak kelas III sebanyak 1.373 peserta, domisili di luar Kabupaten Seluma sebanyak 18 peserta dan data NIK kosong sebanyak 7 peserta. Sehingga, 3.990 peserta itu telah dinonaktifkan dan apabila di bulan Januari 2021 nanti ada yang sakit, maka dapat dipastikan tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lagi. "Sebagian dari mereka sudah dianggap mampu, juga ada NIK kosong," ujarnya.

Untuk itu, masyarakat yang merasa peserta Jamkesda agar dapat mengecek keaktifan kartunya. Dimana data tersebut juga sudah dikirimkan ke masing-masing puskesmas dan TKSK. Masyarakat juga bisa memeriksakan keaktifan kartunya melalui chat WhatsApp Chika BPJS Seluma dengan nomer kontak 0811-8750-400. Selain itu, nantinya juga akan ada sosialisasi kepada masyarakat yang telah dinonaktifkan kartunya.**(cup)**

YUDI/RB

ANTIGEN: Warga yang kontak dengan pasien positif Covid-19 saat mengikuti rapid tes antigen di RSUD Tais waktu lalu.

RSUD Sudah Bisa Rapid Test Antigen

Tapi Belum Untuk Umum

SELUMA - RSUD Tais saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melakukan rapid test antigen Covid-19. Rapid tes antigen atau swab antigen ini sangat berguna karena hasilnya bisa diketahui lebih cepat. Namun rapid test tersebut belum dibuka untuk umum.

Rapid test antigen ini masih terbatas untuk suspek atau pasien terduga Covid-19 serta kontak pasien positif. Direktur RSUD Tais, dr Wiwin Herwini mengakui hal tersebut. Pihaknya memang telah melakukan pemeriksaan dengan rapid tes antigen sejak beberapa waktu lalu. Hal ini setelah mereka mendapatkan hibah beberapa rapid test antigen dari Dinkes Seluma.

Meskipun demikian, untuk saat ini pemeriksaan rapid test antigen masih berfokus kepada suspek dan kontak pasien positif. Sementara itu untuk masyarakat umum, masih belum bisa dilakukan. Dikarenakan pemeriksaannya gratis, maka sejumlah pertimbangan dilakukan dan diprioritaskan untuk masyarakat dengan kondisi tertentu saja bukan umum. "Sudah bisa rapid test antigen, tapi untuk kondisi tertentu, untuk masyarakat umum masih belum bisa," ujarnya.

Ia menambahkan, pengambilan sampel untuk rapid tes ini menyerupai tes swab PCR. Maka dari itu, banyak yang menyebut rapid test antigen ini sama dengan swab antigen. Hasil pemeriksaan rapid tes antigen lebih cepat diketahui. Sehingga apabila ada yang terindikasi terpapar virus corona dapat langsung diambil langkah pencegahan penyebarannya. Adapun hasilnya sendiri paling lama 30 menit sudah bisa diketahui.

"Untuk hasilnya itu paling lama 30 menit sudah bisa diketahui, jadi memang ini upaya cepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujarnya.

Menurut Wiwin, pihaknya juga mengusahakan pada tahun 2021 nanti akan membuka pemeriksaan rapid test antigen untuk umum. Namun hal ini masih akan menunggu kebijakan dari Pemkab Seluma. Sedangkan untuk kesiapan RSUD Tais, ia memastikan sudah 100 persen. "Kita tunggu dulu kebijakannya, kalau sudah ada nanti tentu akan kita buka untuk umum," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Seluma mendapat bantuan sebanyak 2.000 rapid test antigen dari pemerintah pusat. Rapid test ini didapatkan melalui bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dengan tujuan mempercepat pemeriksaan Covid-19. Rapid tes antigen ini sebagian telah dibagikan ke RSUD Tais.**(cup)**

ADD Dua Desa Belum Juga Cair

Tunggu Kebijakan Bupati

SELUMA - Pemerintah Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) masih belum bisa tenang. Soalnya, dua desa tersebut masih belum dapat kejelasan kapan dilakukan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menjelang akhir tahun 2020, penyaluran ADD sejak bulan Januari 2020 masih belum juga terealisasi. Hal ini dikarenakan proses pencairan ADD masih menunggu kebijakan dari Bupati Seluma. Plt. Kepala Dinas PMD Seluma, Drs Agus Jun Fadhillah mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mengingat ADD di dua desa tersebut tidak bisa dilakukan proses pencairannya karena berkas pengajuannya tidak sesuai persyaratan.

Dinas PMD masih mengupayakan pencairan ADD sebelum tanggal 31 Desember nanti. Untuk berkas pengajuan dari desa tersebut sudah diterima Dinas PMD. Namun tetap saja masih menunggu kebijakan Bupati Seluma.

Agus menambahkan, dalam permasaahan ini Dinas PMD Seluma tidak bisa mengeluarkan rekomendasi pencairan. Oleh karena itulah pihaknya membuat surat ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Seluma karena pencairan ADD ini sifatnya kebijakan. Dibayarkan atau tidak nantinya masih menunggu kebijakan dari Bupati. Selain itu, hasil koordinasi yang dilakukan ke Dirjen Bina Desa masih belum diterima Dinas PMD.

"Kita tidak bisa keluarkan rekomendasi pencairan, karena ini sifatnya kebijakan, jadi kita tunggu dulu," ujarnya.**(cup)**

INFO HOTEL

HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX/ HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	JL. Bakti Husada No. 88 Kel Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	JL. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

RIO/RB

LAPOR: Dipi (55) warga Pematang Bangau mendatangi Mapolres BS untuk melaporkan HE yang telah merusak tanah miliknya, Senin (28/12).

Tanah Diserobot, Lapor Polisi

KOTA MANNA – Dipi (55) warga Pematang Bangau, Kota Manna melaporkan seorang warga bernama HE ke Mapolres Bengkulu Selatan, Senin (28/12). Dalam laporannya, Dipi menyebut kalau tanah miliknya diserobot dan dirusak oleh HE.

Diceritakan korban, dirinya selama ini tetap sabar menghadapi ulah HE. Selama ini diungkapkan korban, HE selalu cari masalah soal tanah tersebut. Dimana HE diduga ingin mengambil alih tanah milik pelapor. Padahal diceritakan Dipi tanah tersebut adalah benar miliknya.

Dipi membuktikan bahwa tanah itu miliknya, sebab dia membeli tanah tersebut dengan almarhum orangtua HE beberapa tahun silam. Bahkan korban menunjukkan bahwa tanah itu telah dibuatkannya Surat Keterangan Tanah (SKT).

Namun demikian, diungkapkan Dipi, HE tidak pernah mengerti dan tidak menerima bahwa tanah itu adalah milik dia. Tanah itu dijual orangtua HE saat masih hidup.

"Selama ini saya biarkan, tapi kemarin pagar dirusak, tanaman juga. Jadi ini akan saya bawa ke ranah hukum," terang korban saat mendatangi Mapolres BS

Bahkan korban akan tetap menuntut HE ke penegak hukum, meskipun HE mengakui perbuatannya. Sebab korban telah kesal akan ulah HE.

Sementara itu Kapolres BS AKBP Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK disampaikan Kanit Pidum Ipda. M.Bintang Azhar mengatakan, pihaknya menerima laporan korban. Namun demikian pihaknya tidak langsung menetapkan tersangka ataupun siapa yang salah. Karena masih akan memeriksa keterangan beberapa saksi.

"Yang jelas laporan sudah kami terima, tinggal memeriksa dulu perihal masalah korban dan pelapor ini," jelas Kanit Pidum.**(tek)**

Penjabat Kades Tidak Maksimal, Diganti

KOTA MANNA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) mengingatkan seluruh Penjabat Kepala Desa (Kades) di 77 desa saat ini untuk berkerja maksimal jelang Pilkades April 2021 mendatang. Bahkan DPMD mengecam akan mengganti Penjabat Kades yang tidak maksimal dalam berkerja.

Saat ini ada 77 desa yang dijabat oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati beberapa waktu lalu. Untuk itu, dari beberapa penjabat kades selalu dievaluasi kinerjanya. Bahkan tidak sedikit mereka yang diganti dan ditunjuk penjabat baru.

Kepala DPMD BS, Hamdan Syarbaini S.Sos melalui Kabid Pemdes Rustam Affandi ME mengatakan, tugas penjabat kades tidak berbeda dengan tugas kades. Hanya saja penjabat merupakan PNS yang ditugaskan oleh pemerintah daerah sambil menunggu adanya kades definitif.

Oleh sebab itu DPMD menuntut Penjabat Kades untuk berkerja secara maksimal bersama perangkat desa. Selain itu selalu aktif menjalin komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan tentang desa.

Dari seluruh penjabat kades yang ada saat ini, pihak DPMD telah mengganti dua penjabat kades dari hasil evaluasi yang dilakukan. Dua Penjabat tersebut kades di Bunga Mas dan satu penjabat Kades di Kedurang. Sedangkan yang lainnya tetap diperpanjang sampai terpilihnya Kades baru atau sampai pelaksanaan Pilkades serentak tahun depan.

"Bagi penjabat kades yang kinerjanya tidak baik atau bermasalah dan mengundurkan diri, atas usulan BPD diketahui camat sewaktu-waktu bisa diganti," terang Rustam.**(tek)**

RIO/RB

BEBAS: Kepala BB Manna Mulkan saat pelaksanaan Rapid Test yang dilakukan Senin (28/12).

Bank Bengkulu Bebas Covid-19

Seluruh Pegawai Rapid Test

KOTA MANNA – Demi memberikan keamanan dan meyakinkan masyarakat Bengkulu Selatan (BS), Bank Bengkulu Cabang Manna memastikan seluruh pegawai dan staf bebas Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil rapid test 33 pegawai dan staf Bank Bengkulu, kemarin (28/12).

Meningkatnya kasus konfirmasi Covid-19 di BS saat ini menjadikan masyarakat BS ragu untuk mendatangi tempat umum. Bahkan kantor-kantorpun menjadi tempat atau klastes baru penyebaran virus Corona.

Tidak ingin nasabah takut dan ragu pergi ke Bank Bengkulu, pihak bank melakukan rapid test secara rutin di kantor. Hal ini untuk memastikan seluruh karyawan dan staf bank bebas Covid-19.

Kepala Bank Bengkulu Cabang Manna Mulkan mengatakan, pihaknya secara rutin memeriksa kesehatan dan selalu mentaati peraturan protokol kesehatan. Namun hal itu terangnya belum menjamin semuanya aman. Sebab pegawai dan staf bank tidak hanya berdiam diri di kantor, namun ada juga yang ke lapangan.

Oleh sebab itu dia meyakinkan bahwa Bank Bengkulu aman Covid makanya dilakukan rapid test secara serentak semua pegawai dan staf Bank Bengkulu.

"*Au aman galau* Alhamdulillah, 100 persen negatif 33 pegawai dan staf BB," terang Mulkan.

Dengan hasil ini, Mulkan mengajak para nasabah BB untuk tidak takut mendatangi kantor BB. Sebab semuanya bebas Covid. Namun demikian dia mengharapkan setiap warga yang datang tetap mentaati peraturan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak aman.

"Yang pastinya setiap orang yang datang selalu cek suhu tubuh, patuh protokol kesehatan. BB Selalu terapkan itu jadi masyarakat jangan ragu datang ke kantor kami," ajak Mulkan.**(tek)**

DLHK Tangani Sampah dengan Peralatan Seadanya

KOTA MANNA – Anggaran minim, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) terpaksa harus menimbun sampah di TPA Kayu Arau di Padang Gilang, Kecamatan Manna dengan cara manual dan alat seadanya.

Dalam penimbunan sampah yang masuk, DLHK kelola seefektif mungkin dengan tidak mengeluarkan dana daerah. Hal ini sudah sudah dilakukan sejak awal tahun 2020 lalu, dengan menggunakan peralatan alat sendiri. Inovasi pengelolaan TPA yang dilakukan petugas DLHK ini tetap berlanjut di tahun 2021 mendatang.

Kepala DLHK Kabupaten BS Ir Jonior Hafis mengatakan, memanfaatkan fasilitas yang ada dalam penimbunan sampah di TPA Kayu Arau merupakan cara berinovasi pihak DLHK sekaligus menekan beban anggaran daerah. Sebab Jonior mengakui, anggaran untuk DLHK BS tahun 2021 terbilang sangat minim. Padahal kinerja penanganan sampah sangat berat dan banyak.

"Selama ini operasional biaya penimbunan sampah bisa menghabiskan dana Rp 300 juta setahun, jadi dengan minimnya anggaran tahun depan kita akan selalu berinovasi dan tidak mengandalkan APBD saja," jelas Jonior

Dikatakan Jonior, persoalan anggaran menjadi hal yang tak dapat terpisahkan dalam menggapai suatu pencapaian kegiatan diinstansi pemerintahan. Pola menghemat anggaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dilakukan petugas TPA ini bisa dipertahankan guna menekan beban daerah.

"Tetap, kita akan selalu mendukung program pemerintah, dan tidak selalu bergantung ke APBD. Salah satunya dengan cara penghematan tadi," terangnya.

Namun demikian, Jonior mengakui pihaknya akan selalu fokus terhadap penataan kota dan pengangkutan sampah ke TPA. Sehingga Kabupaten BS kembali meraih sebagai kabupaten bersih ditahun 2021 mendatang, seperti yang pernah diraih BS pada tahun 2019 lalu.

"Persoalan sampah dan penataan wajah kota masih fokus utama DLHK," sebut Jonior. (tek)

36 Warga BS Sembuh dari Covid

KOTA MANNA – Dinas Kesehatan (Dinkes) BS mencatat meskipun kasus terkonfimasi Covid-19 bertambah. Namun untuk tingkat kesembuhan warga terus meningkat. Hal ini kabar baik bagi semua masyarakat BS.

Dari 80 warga yang terkonfirmasi Covid-19 hingga (28/12), 36 diantaranya dinyatakan telah sembuh total. Sedangkan yang masih menjalani isolasi mandiri 34 orang dan yang dinyatakan meninggal dunia 7 orang selama tahun periode Maret hingga Desember.

Bahkan terbaru tiga orang warga yang dirawat di rumah sakit satu diantaranya kemarin telah diperbolehkan pulang ke rumah karena kondisi terus membaik. Hal ini menandakan perkembangan kesehatan terus meningkat.

Kabid P2P Dinkes BS Ns Elfa Sari, S.Kep, M.Kes mengatakan, meskipun angka kasus Covid terbilang tinggi di Kabupaten BS, namun hal itu tidak serta-merta selalu ada lonjakan kasus. Sebab kasus warga yang sembuh sebut Elfa selalu ada setiap harinya.

Saat ini diterangkan Elfa, warga yang sembuh mencapai 36 orang. Hal ini menandakan tingkat kesembuhan warga terus membaik. "Jadi perkembangan tingkat kesembuhan itu selalu ada setiap hari, bahkan ada yang tidak sampai 14 hari sudah dinyatakan sembuh," terang Elfa.

Adapun penyebabnya dijelaskan Elfa karena warga yang terkonfirmasi tersebut menjalankan pemulihan dengan baik dan menaati semua anjuran tim medis yang merawat. Sehingga proses kesembuhan berjalan baik dan cepat.

Selain itu tambahnya penyakit penyerta warga yang sembuh tidak terlalu parah, karena rata-rata yang lama sembuh lantaran ada komplikasi dan membuat tingkat kesembuhan jadi lebih lama dari yang diperkirakan.

"Yang pastinya yang sudah sembuh itu menjalankan pemulihan dengan baik, dan rutin berolahraga dan tidak selalu dilanda cemas," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan (BS) Rifai Tajudin beberapa waktu lalu yang sempat terpapar virus Corona, tidak sampai 14 hari dinyatakan sembuh. Rifai menceritakan, dirinya selama masa pemulihan selalu menjalankan apa yang dianjurkan medis. Namun selain itu ia rutin mengkonsumsi makanan herbal dan tradisional. Sehingga imun tubuh kembali kuat dan virus hilang.

"Tidak butuh waktu lama, karena selain berdoa, ya disertai usaha bagaimana agar tubuh ini selalu kuat dan tidak merasa sedih," ungkap Wabup.**(tek)**

Kejari Lanjutkan Program Jaksa Berayak

KOTA MANNA – Selama tahun 2020 ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) mencatat telah mendatangi 48 desa dalam program Jaksa Berayak (Jaksa Sosialisasi). Untuk itu tahun 2021 mendatang Kejari akan melanjutkan program ini dan menargetkan 142 desa didatangi oleh Jaksa.

Lantaran akibat dampak pandemi Covid-19 yang ikut melanda Kabupaten BS sepanjang tahun 2020, membuat program Jaksa Berayak yang digagas oleh Kejari BS menjadi terhambat. Program ini merupakan bentuk sosialisasi jaksa kepada masyarakat. Dengan tujuan memberikan pemahaman hukum pada warga.

Dari total 142 desa di 11 Kecamatan BS, Kejari BS mengakui hanya dapat mendatangi 48 desa yang dimulai sejak Januari hingga Desember 2020. Hal ini tentu belum mencapai setengah dari jumlah desa yang ada di Kabupaten BS.

Oleh sebab itu pada tahun depan, Kejari BS kembali akan melanjutkan program ini, dengan cara mendatangi semua desa.

Kasi Intel Kejari BS M. Ichsan, SH, MH mengatakan, program Jaksa Berayak merupakan bentuk hadirnya jaksa di tengah masyarakat. Selama ini sebut Ichsan nama jaksa ataupun kejari di tengah masyarakat masih sangat awam, apalagi di desa. Sehingga pihaknya berinisiatif melakukan kunjungan ke desa.

Adapun materi yang disampaikan jelas Ichsan berupa pemahaman hukum pada warga. Karena tidak sedikit warga yang belum tau hukum dan sadar hukum. Sehingga dengan adanya pemahaman ini Ichsan berharap masyarakat BS dapat memiliki ilmu dan pengetahuan lebih dari jaksa BS.

"Lanjut lagi tahun depan, selama ini terkendala Covid, sebenarnya kami mau melalui daring tapi namanya di desa terkendala sinyal. Jadi fokus tahun depan semua desa didatangi," jelas Kasi Intel.

Selain program diatas, Ichsan menyebutkan program lainnya akan tetap berlanjut ditahun 2021. Seperti Jaksa Menyapa dan Jaksa masuk sekolah.

Ichsan menambahkan, Jaksa masuk sekolah tidak kalah pentingnya dari program lain. Karena ini dapat memberikan minat dan pemahaman pada para pelajar. Apalagi pelajar SMA akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

"Kejari konsisten akan memberikan pemahaman hukum pada semua lapisan masyarakat BS," ujarnya. **(tek)**

RIO/RB

JAKSA: Program Jaksa Berayak Kejari BS akan dilanjutkan tahun 2021 dan menargetkan 142 desa didatangi.

LINTAS

Akhir Tahun, 40 Bintara Polres Kaur Naik Pangkat

KOTA BINTUHAN – Tidak hanya perwira, akhir tahun ini 40 bintara Polres Kaur juga naik pangkat setingkat lebih tinggi. Upacara kenaikan pangkat akan dilaksanakan serentak awal Januari 2021 yang akan datang di Mapolres Kaur. Rinciannya, dari Aipda ke Aiptu sebanyak 4 orang, Bripka ke Aipda 6 orang, Brigpol ke Bripka 8 orang, Briptu ke Brigpol 5 orang, Bripda ke Briptu 17 orang dan Bharatu ke Bharaka sebanyak 3 orang.

Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kabag Ops AKP Fahrul Ikhwan membenarkan selain tiga perwira yang naik pangkat di jajaran Polres Kaur, ada 40 bintara yang juga serentak naik pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat ini merupakan prestasi bagi anggota Polres Kaur untuk tetap menjalankan tugas dengan lebih baik lagi. Diharapkan bisa menjadi contoh bagi anggota yang lain untuk lebih giat bekerja dalam menjalankan tugas.

"Untuk pelantikan bintara akan dilaksanakan tanggal 4 Januari 2020 yang akan datang rencananya. Kegiatan akan kita laksanakan serentak nantinya dan kepada yang naik pangkat ini diharapkan jadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing," pungkas Kabag Ops Polres Kaur.

Sebelumnya Kabag Ops juga menyampaikan kalau ada tiga perwira yang naik pangkat pada akhir tahun 2020. Mereka adalah Kapolsek Muara Sahung, Yevi Mulyadi dari pangkat Ipda naik pangkat menjadi Iptu. Kemudian Kapolsek Kaur Selatan yaitu Johny Silain yang sebelumnya pangkat Iptu naik menjadi AKP dan terakhir Kasat Narkoba yaitu Rasi Ginting Samura yang sebelumnya pangkat Iptu naik menjadi AKP. **(cik)**

Ist/rb

PERSONEL: Nampak personel Polres Kaur yang siap menjalankan tugas pengamanan Pilkada beberapa waktu yang lalu.

Sinyal Ponsel di Pagu Lancar

KOTA BINTUHAN – Lagi kerjasama antara Telkomsel dan juga Pemkab Kaur akhir tahun 2020 ini berhasil membangun satu tower jaringan ponsel Telkomsel. Dengan telah dibangunnya tower baru di Kecamatan Padang Guci Hulu tersebut, maka dipastikan kesulitan sinyal yang selama ini dikeluhkan masyarakat Pagulu dan sekitarnya bisa teratasi. Bahkan kalau tidak ada halangan saat ini tower Telkomsel yang berada di Desa Bungin Tambun II sudah beroperasi.

Untuk itu pihak Telkomsel dan Pemkab Kaur berharap agar masyarakat juga dapat menjaga agar tower tersebut bisa terus aktif. Karena tidak hanya dapat menggunakan sinyal ponsel yang kencang. Dengan berdirinya tower tersebut maka masyarakat pun akan lebih mudah mengakses internet dari ponsel.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kaur Asmansuhadi kepada **RB** kemarin. Menurutnya satu persatu wilayah yang sulit sinyal saat ini telah dibangun tower. Kalau sebelumnya Pagulir dan Muara Sahung, saat ini giliran Pagulu yang sudah dibangun. Dan ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk membangun dalam bidang Telekomunikasi di Kabupaten Kaur. "Alhamdulilah sejak tanggal 27 Desember 2020 yang lalu, jaringan tower Telkomsel yang dibangun di Bungin Tambun Kecamatan Pagulu telah operasi. Ini merupakan komitmen dari Bupati Kaur Gusril Fauzi bersama dengan telkomsel untuk mengembangkan pembangunan telekomunikasi di Kaur. Namun tidak bisa serentak dan memang harus bertahap kita bangun," terang Asmansuhadi.

Untuk diketahui sebelumnya Pemkab Kaur dengan Telkomsel juga telah menyelesaikan beberapa tower lainnya yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Karena sulitnya sinyal sehingga perekonomian juga ikut terhambat, untuk itu Pemkab Kaur komitmen untuk terus membangun jaringan telekomunikasi di Kaur. Lima tower yang sudah dibangun di Kaur kerjasama Telkomsel dan Pemkab Kaur adalah di Kecamatan Lungkang Kule.

Kemudian di Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Muara Sahung. Kemudian di Kecamatan Maje tepatnya di Benteng Harapan dan Kecamatan Nasal di Tebing Rambutan. Sementara untuk di wilayah Babat Kecamatan Tetap, sebelumnya juga telah dilakukan pengecekan dan penguatan sinyal oleh telkomsel namun tidak dibangun tower sementara ini. **(cik)**

ALBERTUS/RB

PLAT: Nampak plat papan reklame yang ada di depan gerbang pintu masuk Pemkab Kaur banyak lepas dan membahayakan pengguna jalan.

Lagi, Kakek Hamili Anak di Bawah Umur

Enam Kali Digauli, Korban Hamil 7 Bulan

KOTA BINTUHAN – Kasus pencabulan anak di bawah umur dengan pelaku berusia uzur kembali terjadi di Kabupaten Kaur. Am (66) warga Kecamatan Maje diamankan Unit PPA Polres Kaur, karena dilaporkan melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap Mawar (15) bukan nama sebenarnya, yang merupakan tetangganya sendiri.

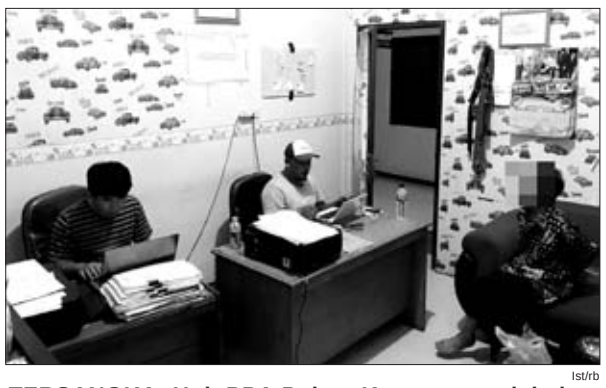

Ist/rb

TERSANGKA: Unit PPA Polres Kaur saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus kakek cabul.

Tidak hanya sekali, pencabulan sudah terjadi enam kali yang membuat Mawar saat ini hamil 7 bulan. Pencabulan itu terjadi dalam rentang waktu April hingga Juni lalu. Perbuatan pertama kali terjadi di rumah tersangka. Saat itu korban disuruh mengambil beras ke rumah Am oleh orangtuanya. Namun Am meminta korban menemaninya tidur.

Untuk memuluskan niatnya, Am mengambil uang dalam kantong bajunya dan diberikan ke Mawar. Setelah itu Am menarik tangan Mawar kemudian menidurinya.

Setelah selesai, korban pun pulang. Kasus ini terus berulang hingga lima kali di rumah tersangka dan satu kali di rumah korban.

"Untuk tersangka sendiri sudah kita amankan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi tersangka dan korban sudah mengakui kejadian yang menimpa korban hingga hamil 7 bulan. Korban sendiri masih anak di bawah umur. Modus tersangka dalam menggauli korban memberikan uang Rp 100 ribu setiap kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut," kata Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono,S,IK didampingi Kasat Reskrim AKP Apriadi melalui Kanit PPA Aipda Andi Sujarmoko,SH.

Tersangka sendiri ditangkap Minggu 27 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya. Tersangka dijerat tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dengan Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Dan ini merupakan tersangka kedua kakek-kakek cabul yang kita amankan. Sebelumnya Mu (75) warga Kaur Selatan dan yang terbaru ini Am (66) warga Nasal. Kasus ini terungkap karena kedua korban hamil dan ini menjadi perhatian bagi orang tua yang mempunyai anak gadis. Untuk selalu waspada karena banyak kasus pencabulan adalah orang dekat korban sendiri," pungkas Kanit PPA Polres Kaur. **(cik)**

Papan Reklame Membahayakan Penggunaan Jalan

Plat Banyak Lepas Diterpa Angin

KOTA BINTUHAN – Angin kencang disertai hujan yang terjadi di Kabupaten Kaur saat ini tidak hanya membuat berbagai pohon tumbang. Tetapi juga merusak papan reklame yang terpasang di Kabupaten Kaur. Bahkan ada satu papan reklame besar di depan jalan masuk komplek perkantoran Padang Kempas yang sangat membahayakan pengendara.

Sebab plat seng yang menempel pada besi papan reklame tersebut mulai copot lantaran ditiup angin. Beruntung sampai saat ini belum ada korban. Warga berharap agar pemerintah atau pemilik papan merek tersebut dapat memperbaiki plat seng tersebut. Agar tidak membahayakan pengendara yang melintas.

"Papan merek yang depan pintu masuk Pemda Kaur saat ini platnya banyak yang jatuh karena ditiup angin kencang. Kami takut kalau plat seng tersebut menimpa pengendara motor untuk itu kami sangat berharap ini menjadi perhatian pemerintah. Untuk mencopot atau memperbaiki plat yang banyak ingin lepas tersebut," ungkap Kiki warga Desa Sekunyit.

Kepada RB, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kaur Asmansuhadi saat dikonfirmasi mengakui kalau papan reklame tersebut adalah milik pihak ketiga dan bukan milik dari Kominfo Kaur. Untuk itu pihaknya mengaku tidak bisa memperbaiki plat seng yang banyak berjatuhan lantaran ditiup angin kencang tersebut.

"Untuk papan reklame itu bukan milik kita Kominfo, itu milik pihak ketiga. Selama ini kita hanya sewa saja," pungkas Asmansuhadi. **(cik)**

Baru Nikah 9 Bulan, Sudah ke Polisi

KOTA BINTUHAN – Baru 9 bulan menikah, pasangan suami istri di Kecamatan Nasal harus terpisah karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ira Murti (19) yang mengaku selama menikah sudah beberapa kali mendapatkan tindakan KDRT dari suaminya Ba (22) warga Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal. Sehingga dia memutuskan melaporkan suaminya itu ke Mapolres Kaur.

Pada pertengahan Desember 2020 yang lalu, setelah melakukan pemeriksaan Unit PPA Polres Kaur pun menangkap Ba, Minggu (27/12) malam di rumahnya. Saat ini Ba pun telah diamankan karena diduga telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Kejadian KDRT yang dialami korban terjadi Minggu (29/11) sekitar pukul 11.00 WIB di rumah mereka di Desa Bukit Indah. Saat itu korban dan tersangka ribut hingga tersangka sempat membantingkan galon tempat cuci tangan.

Saat bersamaan, tersangka Ba mengaku mengemasi pakaian dan ingin pergi ke rumah orangtuanya. Saat itu lah korban bergantung kepada kaki kiri suaminya. Karena tidak dilepaskan tersangka pun menyeret tubuh istrinya dengan kaki sepanjang 4 meter. Kejadian ini pun akhirnya berbuntut panjang, karena tidak terima korban pun melaporkan kasus ini ke Mapolres Kaur.

"Bukan sekali saja pak, saya mengalami KDRT sudah beberapa kali bahkan pernah dicekiknya. Dan saya sudah tidak ingin balik lagi dan ingin langsung di talak tiga saja biar sudah. Dan saya ingin merantau saja cari kerja saja kalau begini caranya (tersangka, red) terhadap saya," terang Ira kepada **RB** di Unit PPA Polres Kaur kemarin.

Tidak hanya itu, menurut korban kalau dirinya dan tersangka ini sudah pacaran sejak dia duduk di bangku SMP. Setelah tamat SMA, keduanya menikah, pada saat itu korban mengaku baru memasuki usia 19 tahun. Berjalannya waktu korban tidak terima karena sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung ke Mapolres Kaur.

Terkait dengan kasus KDRT ini, pihak Polres Kaur juga membenarkan kalau Ba sudah diamankan. Karena dari pemeriksaan korban, saksi dan sebagainya Ba terbukti salah dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Ba dijerat dalam pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Untuk kasus KDRT di Nasal sudah kita amankan tersangkanya. Untuk saat ini kita juga melakukan pemeriksaan saksi dan korban. Termasuk juga tersangka sudah mengakui perbuatannya dan saat ini tahap pemberkasan," pungkas Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono,S,IK didampingi Kasat Reskrim AKP Apriadi melalui Kanit PPA Aipda Andi Sujarmoko,SH. **(cik)**

Kami Keluarga Besar
dr. H.M Zayadi Hoesein, SpOG

TIARA SELLA HOSPITAL
Graha Bernoza

Mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah terlibat langsung merawat Ayahanda dan Ibunda kami tercinta.

Terima kasih kami haturkan kepada Gubernur Bengkulu yang telah melepas Jenazah Ayahanda kami, Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah, Alim ulama, sanak saudara, dan handai taulan yang telah membantu dan mendukung keluarga melakukan kewajiban fardu kifayah terhadap Almarhum dr. Zayadi Hoesein hingga selesainya pemakaman.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh Pemerintah Daerah, Keluarga, Sahabat, Kolega atas ucapan belasungkawa dan kiriman karangan bunga yang kami terima sebagai berikut:

- H. Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu
- Pemerintah Kota Bengkulu (Pemkot)
- DR. Ir. Hidayatullah Sjahid M.M IPU & Netti Herawati. S.Sos (Bupati & Wakil Bupati Kepahiang)
- DR. H. Ferry Ramli, SH. MH (Bupati Bengkulu Tengah)
- Wawan Fernandez.SH.M.K,n (Wakil Bupati Lebong)
- Gusnan Mulyadi, SE. MM (Bupati Bengkulu Selatan)
- H.Bundra jaya (Bupati seluma)
- H. Sayed Jafar Alaydrus. SH (Bupati Kotabaru)
- PEMKAB. BUPATI. WAKIL BUPATI. SEKDA REJANG LEBONG
- Hj. Elva Hartati Murman (Anggota DPR RI)
- H. Mohammad Saleh, S.E (Anggota DPR RI FRAKSI GOLKAR)
- H. Ahmad Kanedi. SH. MH (Bangken) Anggota DPD RI/ MPR RI
- DR. dr. H. Bayu Wahyu. Sp. OG. MPHM. MHKes. MM (Direktur BPJS Kesehatan)
- H. Herwan Antoni, SKM. SKM. M. Kes, Msi & Kel besar Dinkes Prov BKL
- Sekwan & Staff DPRD Prov. BKL
- Ketua DPRD Prov.Bengkulu Ihsan Fajri S.Sos.MM
- Agung Toyota (Ibu Meriani)
- Alumni Dokter dr. Gigi Unand Plus (Urang awak)
- Alumni FK Unsri Th 71
- Alumni SMP PGRI CURUP angkatan 70,71,72
- Angkasa Motor
- Apotek Mila Farma Tanah Patah
- Aqobah Travel Haji & Umroh JKT
- Athena Variasi Bengkulu
- Bagian / KSM OBGIN FK UNSRI RSMH
- Bank Mandiri Syariah - Area Jambi
- Bank Mandiri Syariah Kc. BKL
- Baznas Prov BKL
- BCA Kcu Bengkulu
- Bengkel Mobil – Langgeng Jaya Services
- BNI Cab Bengkulu
- BPH yayasan Dehasen BKL DR.Bando Amin C Kader.MM
- BPJS KESEHATAN KC. BKL
- Cendana Elektronik
- CV. Insan Mandiri Importir Resmi Mesin Fotocopy Cab. BKL
- Dexa Medica
- Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah
- Dinas P3A dan PPKB Prov. BKL
- Direksi & Segenap Karyawan PT Meprofarm
- Direksi & Segenap karyawan/ti BNI Syariah
- Direksi & staff PT.Global Rancang Selaras
- Direksi dan karyawan /ti RSUD dr. M. YUNUS
- DPW Partai Nasdem Prov Bengkulu. Ketua DR. H. FERRY RAMLI. SH, MH
- Expedisi CV. Jasa Mulia km 6.5 (Dedi Cahyadi)
- Fahrenheit
- Galuh Wedding Organizer
- Harian Rakyat Bengkulu (GM. Marsal Abadi. SE)
- Ibu IIDI Cab BKL
- IDI Cab Seluma
- IDI Cab. Kota BKL
- Instalasi Farmasi RS Tiarasella
- J&T Express Bengkulu
- Joni Marsius – KPw. Bank Indonesia Prov Bengkulu
- KAKAO OBGIN UNSRI
- Kalbe Nutrionals PT Sanghuang Perkasa
- Karumkit Bhayangkara beserta staff
- Karyawan Gohalalgo & Patuna BKL
- Kel. Besar Alumni SMPNI angkatan 97
- Keluarga Ikatan Dokter Anak Indonesia cab BKL
- Ketua & pengurus Jalasenastri Cab 4 Lanal BKU
- KitaRO AMDK Agus Tropis
- Klinik Asy Syifa
- Klinik Pratama Abdi – Hj. Nurlela Nawawi, SKM. MM
- Komisaris Direksi & Karyawan/ti Bank Bengkulu
- Laurent resto
- LP3i Bengkulu
- M. Imam Saputera & Kary.BPJS ketenagakerjaan
- Management & seluruh karyawan RS Tiara Sella
- Matahari Furniture
- May Bank Bengkulu
- Momstories Jakarta
- Narendra Dewa Yoga (NDY)
- Nutricia Sarihusada
- Ottopharm
- Paguyuban Purna Tugas Kesehatan Prov BKL
- PAOGI OBGIN FK UNSRI
- PD IBI Prov BKL
- Pengda Kagama Bengkulu – DR. drh. H Rohidin Mersyah. MMA
- Pengurus BKOW BKL
- Pengurus Masjid Raya & Pengajian Majelis Taklim Baitul Izah Bengkulu
- Pengurus Pusat POGI
- PERKI cab BKL
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cab Bkl (POGI)
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cab Bengkulu
- Persatuan Golf Indonesia (PGI) PB BKL
- Pimpinan & Karyawan/ti Bank BTN KC. Bengkulu
- PJ Hexpharm Jaya
- PKK kab. Bengkulu Selatan
- POGI Cab BKL
- POGI SUMATERA SELATAN
- Pondok Maria
- PPDS OBGIN Unsri Jan 19
- Prodia BKL
- PT Inti Medika Sentosa
- PT Novel Devisi Beta
- PT Seltech Utama Mandiri
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Area Head Bengkulu (Abdul malik)
- PT. Bengkulu Dispo Farma (BDF)
- PT. Beta Medical JKT
- PT. Bumi Daya Plaza Cab. BKL
- PT. Bumi Gasindo Sumatera
- PT. Centula gading Medika (RS Gading Medika)
- PT. Desain Sarana Intermatra JKT
- PT. Enseval
- PT. Fima Internasional TBK
- PT. Guardian Pharmatama
- PT. Interbat
- PT. Kalbe Farma
- PT. Lapi Laboratories
- PT. Mandika Atus Gratia
- PT. Nestle Indonesia
- PT. Permata Kencana Mulia
- PT. Purna Karya Medikalindo (H. Ency, SE)
- PT. Sanbe Farma " Ethical"
- PT. Sanbe Farma, Tbk divisi Ethiprom & OGB
- PT. Seguring Kecil Sentosa
- PT. Sinergi Integra Services
- PT.Antar Mitra Sembada
- PT.Bernofarm
- PT.Global Dispomedika
- PT.Gracia Pharmaindo
- PT.Medihop Triton
- RB TV Piham Pino (GM)
- Rm. Makan WRG BAMBOE Si Kabayan
- Ronaldo Nasution Pemimpin Cab.BRI BKL
- RS Hana Charitas – Argamakmur
- RSU Ummi Bkl PT.Ridho Mandiri
- Segenap Pimpinan & Karyawan Penggadaian Syariah (Simpang Skip)
- Segenap Pimpinan dan Karyawan Unit Usaha Syariah PT. Penggadaian (Persero)
- SEMBAM ikan Marola
- SIMEX
- Stikes Tri Mandiri Sakti – Drs. H. S. Effendi. MS
- Street Boba BKL
- Sumpit Mas Restaurant
- SWEETS FKG Trisakti 00
- Toko Kenzo Jaya Panorama BKL
- Toko Keramik Indah
- Toko SW Bangunan
- Toko Vanilla & Anggrek
- WIRA computer
- XTRA Hotel Bengkulu
- YAKES TELKOM Palembang
- Yayasan & RS. Rafflesia BKL
- Yayasan Baitul Izzah Bengkulu
- Besan - Kel. Besar H. Ismail Ibrahim Jakarta
- Besan - Kel H. Kemas Djohan Arifin
- Besan - Bpk. Capt. H. Hm Lasiono M. Mar – Kel Besar Cirendeu Jakarta
- Alkendo Ferdiansyah (CEO PT. Pelayaran bayu segara pratama)
- Alung Toko Timur Jaya Electronic BKL
- Andriana, Cherry, Sarah, Sherly
- Ariel, Dayven, Jojo, Jeje, Brian, Brandon, Nathan
- Asui & Momoy (Idola 2)
- Atik – Batik
- BASE CAMP Suzan & Ationg
- Bella SP, Michelle, Clara, Vanessa, Vina, Marbel
- Bima dan Keluarga Jakarta
- Chika, Amel, Vivian, Putri, Auliya, Karen, Lisa
- Direktur BEMG – Sukatno, M.Si
- Dokter & Perawat IGD RS Tiarasella
- Dokter Gigi Poli Gigi RS Tiara sella
- dr. Abla Ghani, Sp. THT. KL & Irwan Effendi
- dr. Aminullah Djuang, Sp. OG (Klinik Caesar Curup)
- DR. Anzori Tawakal. ST.M,si
- dr. Boby prima. Sp. PD & dr. Gita Dianty. Sp.OG
- dr. David (R.Clinic)
- dr. Dini Medyani. Sp. OG & Keluarga
- dr. EEN – Lang Lang Buana
- dr. Faisal Reza. Sp, Rad & dr. Listy
- dr. Ferdi Iskandar M.H, M.K,n
- dr. H. Abul Khair. Sp.A
- DR. H. Dani Hamdani. M. Pd. & Sefty Yuslinah, S.Sos. MAP
- DR. H. Herawansyah Ikram
- dr. H. Rusdi Damiri, Sp.OG & Kel – Palembang
- dr. H.Taufiq Ramadhan, Sp.OG
- DR. HC. Miswari Pimp. Umum Qorien Centre
- dr. Heru Kurniawan. Sp. THT & dr. Vini Restu Insani
- DR. IR. H. M. Imron Rosyadi, MM. M,si
- dr. Joko Prasanto, Sp. OG & dr. Purwanto, Sp. OG
- dr. Juen Yardona, Sp.OG(K) & Kel
- dr. Letini WIN, MS. SP.PK
- dr. Liza Amelia,Sp.BS
- dr. M. Iman Indrasyah. Sp. S
- dr. Muhammad Fauzi
- dr. Nanda Iskandar, Sp.OG
- dr. Novitrian Eka Putra, Sp. OG (Ka. KSM OBGYN RSUD PROV BANTEN)
- dr. Nuraini, Sp.An
- dr. Rini Kemala Sari, Sp.A. M.Kes
- dr. Rudy Tirtadjaja
- dr. Siti Amanah Septiana, Sp.A & Kel
- dr. Sulastri Panjaitan, Sp. Rad. & Team Radiologi Tiara sella
- dr. Suryo Bantolo, Sp. S & Kel. Besar H. Barlian Tine
- dr. Syabriansyah ,Sp.THT-KL
- dr. Violita, Sp.OG & Kel
- dr. Yoza firdaoz. Sp.Og & dr. H. R.Soeyapto. Sp,OG
- dr.Didon, Sp.OG & dr.Elsi (solo)
- dr.Erlina Sulaiman & dr.M.Genta Jagad Akadianto
- dr.H. Hasymi Hanafiah.Sp.S & Kel
- Drs. H. Zahdi Taher. M. H.I (Ka. Kanwil Kemenag Prov BKL)
- Ervan, Achie, Keiko, & Kiara (Malang)
- Fadli & Tyas
- Frans Simanjuntak (Ona – Oni Butiq)
- GM BE TV - Susanto, S. TP
- Gugus Prudential
- H.Herman Mayori.ST.MT & Kel Kepala dinas PUPR kab.Banyuasin
- Hadi & Lili (Le Petit)
- Helmi & Putri Djang Jaya
- Hj. Djusmalinar, SKM,M.Kes (Ketua Stikes Sapta Bakti BKL)
- Ir. Ali Berti, MM & Kel
- Ir. Avicenna M. Saniputera. MT. MH – Kepala Dinas PU Sumber daya air Kab. Malang.
- Ir. Mulyani
- Ir. Patriana Sosialinda & Kel
- Irjen.Pol(P)Drs. Supratman.MH
- Kapten CKM dr. Asep Sulaeman. Sp. OT
- Kel Besar Aminah Syamsul Bahri
- Kel Besar drg.H. Mixon
- Kel Besar Drs. H. Salman Rupni
- Kel Besar RSIA Melinda Kediri (NY. Melly Sulaiman Iskandar)
- Kel Besar Zulkarnain Kasim (Jakarta)
- Kel Ir. Mahmudi Janto,SH
- Kel. Alm. dr. H. Syartil Arfan M. Sp.A bintaro Jaya – Tangsel
- Kel. Alm. H. WN Djangjaya
- Kel. Besar dr. Kabar Sitepu
- Kel. Besar H. Darmanhuri Daid. SE. M,si
- Kel. Besar H. Dodo Rasyada, S.H
- Kel. Besar Prof. DR. Juanda S.H. MH
- Kel. Besar Sanusi Chan (curup)
- Kel. Besar Yepi Anwar Talang Benih Curup
- Kel.Besar drg H.Edriwan Mansyur.MM
- Keluarga Drs.H.Sonny Adnan Nala Sea Side Hotel
- Keluarga Irsan Setiawan SH.MM
- Keluarga Kurniem Soekadi
- M. Fikri Thobari. SE (Ketua DPD Himperra Prov. BKL)
- Mam echy & Team
- Mbaknya florist & Team
- Merry PD. Ratu Agung Niaga
- Riko RB (Cabe Florist)
- Rina Dona & Sinta Sabri
- Rinda Minda
- Sahabat-sahabat Curtin Ninda
- Salima, Dea, Febby, Tara, Jihan
- Samihal / Ayen
- Satya Nugraha
- Tasya dan Bayu JKT
- TEK SUN Panca Motor BKL
- Teman Ninda : Amel,Ricka,Niela
- Tia Homemazuka & Kel
- Tyas , Syaima
- Waty Liman CNI BKL
- Willy & Vira Po Putra Rafflesia
- Yuni & Keluarga
- Zuhandi Sekeluarga (Asisten Intelijen Denpasar – Bali)

INFO KULINER BENGKULU

FORTUNA CAFÉ DAN RESTO
Alamat: Jl. Rafflesia Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Reservasi: HP. 0813-9841-5974

SOTO #CAKKHAFI
Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511

SAMBEL MERCON 3
Alamat : Simpang Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu

KEDAI KOPI GADING CEMPAKA
Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511

Reunion Resto
Alamat: Jalan Pariwisatan Pantai Panjang Kota Bengkulu Reservasi Hub : HP. 085366962224

Bakso O'Boss
Jl. Raya Rafflesia No.42 Nusa Indah - Kec. Ratu Agung - Kota Bengkulu

dailycious all things delicious
Alamat: Jln. Merapi Raya No.107 Kebun Tebeng - Kota Bengkulu HP. 082333338251

King's Bakso King Bakso Bkl
KING BAKSO BENGKULU RAJANYA BAKSO
Alamat: Jln. Soeprapto No.92 Kebun Geran - Kota Bengkulu

Syarah BAKERY
Alamat: Jln. Mahakam 4 Lingkar Barat No.15 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 081367285252

Kampoeng Wisata Muara Jenggalu Outbound, Resto & Live Musik
LIVE MUSIC
BUKA MULAI PUKUL 10.00 WIB S/D 22.00 WIB
Alamat: Jln. Jenggalu 1 Ujung Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 082374702196 / 081273487999

Dapur Senandung
OPEN NEW NORMAL
Jl. ADAM MALIK (SAMPING BENGKEL BLEBONG) PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

Ruang Promosi Kuliner

Ruang Promosi Kuliner

Rakyat Bengkulu
METROPOLIS
SELASA, 29 DESEMBER TAHUN 2020 I HALAMAN 9

114 Guru Gagal Dapat TPG

Baru Dibayarkan 2 Bulan

BENGKULU – Sebanyak 114 guru pemilik sertifikat pendidik gagal mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mayoritas dikarenakan kekurangan jam mengajar. Meliputi, guru SLB ada 2 orang, guru SMA ada 80 orang, dan guru SMK sebanyak 32 orang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd melalui Operator SIM Pembayaran Arfian Fitriadi, MM, mengatakan untuk pencairan TPG triwulan IV baru dibayarkan 2 bulan. Yakni untuk bulan Oktober dan November. Sementara bulan Desember akan dibayarkan serentak dengan pencairan TPG triwulan I tahun 2021.

☞Baca ***114 GURU...***Hal 15

ILHAM/RB

HEARING: Perwakilan pengelola pasar malam yang tergabung dalam P3MI mendatang DPRD Kota Bengkulu terkait larang beroperasi, Senin (28/12).

Pengelola Pasar Malam Minta Tetap Beroperasi

BENGKULU – Perwakilan pengelola pasar malam yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pasar Malam Indonesia (P3MI), Senin (28/12) mendatangi DPRD Kota Bengkulu. Kedatangan mereka ini terkait adanya Surat Edaran (SE) Walikota tentang penghentian keramaian atau kerumunan. Dengan adanya SE tersebut mereka merasa dirugikan karena dilarang beroperasi.

☞Baca ***PENGELOLA...***Hal 15

Hujan Petir Landa Bengkulu

Dipicu Penumpukan Awan

BENGKULU - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fatmawati Bengkulu kembali memprediksi peluang terjadinya hujan deras disertai petir dan angin kencang sesaat di Bengkulu. Prediksi ini muncul mengingat gangguan berupa belokan angin dan konvergensi atau penumpukan awan-awan pembentuk hujan masih terjadi di wilayah Bengkulu.

Forcaster BMKG Fatmawati Bengkulu Dyah Rizki mengatakan memasuki Rabu (30/12) besok seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu mulai dari Kaur sampai ke Mukomuko, lalu Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong akan dilanda hu-

☞Baca ***HUJAN...***Hal 15

Teras

Tiga Raperda Ditingkatkan

BENGKULU – Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bengkulu menjalang penutup tahun akan melakukan pengesahan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) jadi Peraturan Daerah (Perda), Diantaranya, Raperda Kesbangpol, Raperda perubahan nama PDAM Tirta Dharma menjadi Perumda Tirta Hidayah dan Raperda RTRW. Ketiga Raperda akan disahkan dalam sidang paripurna.

☞Baca ***TIGA...***Hal 15

Program Keringanan Pajak Diperpanjang

Khusus BBN KB I

BENGKULU – Program keringanan pajak kendaraan yang dikeluarkan Pemprov Bengkulu berakhir 11 Desember lalu. Namun dari beberapa program keringanan pajak daerah ini, pemprov memperpanjang pemberian keringanan pajak khusus Bea Balik Nama (BBN) KB I atau pajak bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan pertama.

Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Sepraagusri, program keringanan pajak BBN KB I yang seharusnya berakhir 11 desember diperpanjang sampai 31 Desember. Keringanan BBN KB I ini terkait daya beli masyarakat karena biasanya di akhir tahun para pemegang merk kendaraan bermotor memberikan diskon dan sebagainya.

☞Baca ***PROGRAM...***Hal 15

2021, Ekonomi Bangkit

Bengkulu Ikut Terdampak

BENGKULU - Pengamat Ekonomi Universitas Bengkulu Prof. Dr. Kamaludin, SE, MM yang juga Rektor Universitas Dehasen (Unived) menyatakan optimisnya Indonesia akan menjemput masa ekonomi yang lebih baik memasuki tahun 2021.

Seiring dengan sudah tersedianya vaksin Corona di Indonesia, pada tahap pertama ini mencapai 1,2 juta dosis. Kemudian akan disusul dengan vaksin-vaksin berikutnya. Ini menambah dereten optmisme yang lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonomi akan semakin bersinar. ''Keadaan yang sama juga bakal terjadi di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini,'' ujar Kamal sapaan akrabnya kepada **RB**.

Membaiknya harga komoditas ekspor seperti buah kelapa sawit yang salah satunya bisa dijadikan Crude Palm Oil (CPO) turut pula mempengaruhi, asalkan permintaan dari negara asing tinggi lantaran ini komoditas ekspor. "Kalau komoditi ekspor ada faktor lain lagi. Artinya walau kondisi ekonomi membaik di tahun 2021 tidak otomatis kenaikan komoditi ekspor seperti CPO dari kelapa sawit. Karena sangat tergantung permintaan dunia dan suplai negara-negara lain dan barang-barang subsitusi lainnya," ungkapnya.

Sementara itu paska terpilih menjadi Rektor di kampus milik Yayasan Dehasen itu, Profesor Kamaludin langsung menyatakan keinginannya untuk pembukaan beberapa Program pascasarjana dan S1 serta program profesi yang prospektif alias dibutuhkan di Pasar kerja. **(iks)**

Gelar Resepsi Pernikahan, Langsung Dibubarkan

BENGKULU – Mulai hari ini (29/12) resepsi pernikahan dilarang oleh Pemkot Bengkulu. Seiring dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu tentang Penghentian Keramaian atau Kerumunan di Masa Pandemi Covid-19. Kemarin (28/12) merupakan hari terakhir warga boleh menggelar resepsi pernikahan di Kota Bengkulu.

"Sampai tanggal 28 diperboleh dengan menerapkan protokol kesehatan, selanjutnya sesuai SE walikota tidak diperboleh lagi," Kata Kasat PolPP Kota Bengkulu Yusrizal.

Pihaknya juga akan melakukan pembubaran ketika masih ada masyarakat yang nekat menyelenggaran resepsi pernikahan. Demi kebaikan bersama dan menjaga kesehatan bersama. Bersama Satgas Covid akan dilakukan operasi yustisi.

☞Baca ***GELAR...***Hal 15

TIRTA DHARMA

LAYANAN SMS
PDAM
KOTA BENGKULU

Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.
Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.

UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke **0821 8613 4569** sbb:
a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan / keluhan

Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

Raperda Covid-19, Jadi Prioritas

BENGKULU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 jadi prioritas DPRD Provinsi Bengkulu. Ikut mendukung Pemprov Bengkulu dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Bengkulu.

"Pembahasan raperda untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini kita masukan dalam agenda masa sidang I tahun 2021, jadi prioritas kita untuk dibahas," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah.

Menurut Samsu, dijadikan prioritas dan akan dibahas sesegera mungkin karena raperda ini dibutuhkan cepat untuk menekan kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Dirinya juga sependapat jika raperda ini harus segera dituntaskan pembahasannya di DPRD bersama pihak eksekutif mengingat angka kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu masih terus bertambah.

"Untuk penegakan protokol kesehatan, sebagai payung hukum bagi satgas saat menegakan protokol kesehatan yang ada," tegas politisi Golkar ini.

Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri, menerangkan pemprov sudah menyerahkan usulan draft Raperda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ke DPRD provinsi Bengkulu. Selanjutnya, pemprov tinggal menunggu jadwal tahapan pembahasan raperda ini.

"Draft sudah kita serahkan, dan tinggal menunggu pembahasan di DPRD saja. Sudah pasti ada sanksi, seperti denda dan lain-lain termasuk sanksi hukum. Kalau melanggar prokes," jelasnya.

Sementara itu, per Senin (28/12) kembali terdapat penambahan kasus positif Covid-19. Dari 50 sampel swab yang keluar hasil pemeriksaannya diantaranya terdapat 20 sampel dinyatakan positif Covid-19. Sehingga total kasus positif di Bengkulu menjadi 3.472 kasus. Penambahan berasal dari 12 kasus di Kabupaten Mukomuko, di Kota Bengkulu ada 7 kasus, dan Bengkulu Tengah 1 kasus.

Terdapat juga penambahan kasus meninggal, yaitu kasus 3.434 asal Bengkulu Selatan. Sehingga total kasus meninggal dunia sebanyak 115 orang. "Untuk penambahan kasus sembuh, ada 50 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 berdasarkan hasil evaluasi swab sudah dinyatakan negatif. Total kasus sembuh 2.311 orang dari jumlah kasus positif," papar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni. (**key**)

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

Surya Ofiana, SE, M.Si
Pit Kadis Perindag Provinsi Bengkulu

	KOMODITI		SATUAN	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	BERAS	- IR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000	
		- IR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000	
		- Manggis Manis (Premium)	kg	12.500	
		- Kembang Koi (Premium)	kg	11.500	
		- Termurah	kg	9.375	
		- Cap Bulog/ Dolog	kg	9.375	
2	GULA PASIR	- DN	kg	12.500	
3	MINYAK GORENG	- Bimoli Kemasan	1 liter	15,000	
		- Tanpa Merk	1 liter	12.150	
4	DAGING	- Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000	
		- Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000	
		- Sandung Lamur	kg	80.000	
		- Tetelan	kg	60.000	
		- Has Luar	kg	120.000	
		- Has Dalam	kg	120.000	
		- Daging Ayam Broiler	kg	34.000	Turun
		- Daging Ayam Kampung	kg	65.000	
5	TELUR	- Telur Ayam Broiler	kg	25.000	Naik
		- Telur Ayam Kampung	kg	52.500	
6	Cabe Merah Keriting		kg	42.000	
	Cabe Rawit Hijau		kg	25.000	
7	Bawang	- Merah	kg	35.000	
		- Putih	kg	26.000	
8	Susu Kental Manis	- Bendera	370 gr	11.000	
		- Indomilk	370 gr	10.000	
9	Garam	Beryodium Halus	kg	13.000	
10	Kacang	- Kedelai Eks Impor	kg	8.600	
		- Tanah	kg	25.000	
		- Hijau	kg	23.000	
12	Mie Instan	- Kari Ayam	bks	3.000	
13	Ikan	- Asin Teri	kg	60.000	
		- Kembung	kg	35.000	
		- Segar Tongkol/ Tuna	kg	25.000	
14	Ketela Pohon		kg	4.000	
15	Jagung Pipilan Kering		kg	7.000	

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

	KOMODITI	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	Semen 3 Roda	57.000	
2	Semen Holcim	57.000	
3	Semen Merah Putih	55.000	
4	Semen Padang	58.000	
5	Besi Beton 6 mm	30.000	
6	Besi Beton 8 mm	45.000	
7	Besi Beton 10 mm	67.000	
8	Besi Beton 12 mm	97.000	
9	Triplek 6 mm	95.000	
10	Kayu Balok 7/14 Bawang	100.000	
11	Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12	Paku 2 cm (1 inch)	20.000	
13	Paku 3 cm (1 1/2 inch)	20.000	
14	Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15	Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16	Paku 7 cm (3 inch)	17.000	
17	Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18	Pupuk KCL	7.000	
19	Pupuk NPK (Mutiara)	10.000	
20	Pupuk SP36	2.000	
21	Pupuk Urea	7.000	
22	Pupuk ZA	1.400	
23	Gas LPG 3 KG	18.000	
24	Baja Ringan	91.000	

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

Ingat, 31 Desember Batas Akhir Tukar Poin

BENGKULU - Para member Ace Hardaware Bencoolen Mall diingatkan batas akhir menukar poin adalah 31 Desember 2020. Poin yang telah terkumpul sejak bulan Oktober lalu segera manfaatkan untuk mendapatkan diskon dan belanja-belanja menarik lain di toko.

Manager Ace Hardware Bencoolen Mall Syarifullah mengatakan penukaran poin bisa digunakan untuk ditukar dengan voucher belanja Ace online. Selain itu, membayar transaksi juga bisa menggunakan cara menukar poin. "Kita dapat menukar poin dengan merchandise khusus," ungkapnya.

Untuk mengetahui jumlah poin dan masa aktif kata Syarifullah bisa dengan cara login di mobile Apps Miss Ace yang anda miliki. Selanjutnya melakukan cek di menu profile. Buruan tukarkan poin sebelum waktunya habis,'' ingatnya.

Selain itu anda bisa pula belanja online dengan di Ace Hardware dengan mendownload aplikasinya dengan nama MISS ACE. Melalui aplikasi ini kita bisa berbelanja di Ace seperti layaknya belanja di aplikasi-aplikasi Lazada, Shoppe. Nikmati pula keuntungannya berupa diskon 10 persen semua produk.

Maksimum diskon sampai dengan 100 ribu, kode kupon hanya dapat digunakan satu kali per user, masa berlaku kode kupon ''MISSACE" sampai dengan 31 Desember dan tidak berlaku untuk produk flash sale, lowest price, dan produk dengan keterangan produk tidak berlaku. (**iks**)

Hujan Petir Landa Bengkulu

Sambungan dari hal 9

jan disertai petir dan angin kencang sesaat yang bisa mengancam keselamatan manusia. ''Masyarakat tetap diminta waspada akan kemungkinan adanya potensi banjir, tanah longsor dan angin kencang sesaat akibat hujan deras ataupun hujan dengan durasi yang lama, ''jelasnya kepada **RB**.

kejadian ini kata Dyah efek dari belokan angin dan penumpukan awan pembuat hujan berimbas kepada tingginya gelombang laut akibat pergerakan air yang lebih banyak dibanding saat tidak ada hujan. Gelombang diperkirakan mencapai 2,5 meter di Peraiaran Bengkulu dan mencapai 3 meter di Peraiaran Enggano hingga Peraiaran Samudera Hindia Barat Bengkulu.

Meski begitu kata Dyah saat memasuki Selasa (29/12) potensi yang sama berupa hujan deras ditambah petir dan angin kencang sesaat diperkirakan akan melanda seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Sementara untuk jalur penyeberangan berlaku sampai pukul 19.00 WIB diperkirakan jalur Bengkulu-Enggano akan terjadi hujan ringan dengan arah angin dari Barat Laut menuju Timur Laut dengan kecepatan 2 – 10 knot. Arus diperkirakan bergerak dari Barat Daya menuju Barat laut dengan kecepatan 5 – 40 cm per detik. Tinggi gelombang laut sedang **(iks)**

Program Keringanan Pajak...

Sambungan dari hal 9

Sehingga diharapkan dengan perpanjangan keringanan pajak BBN KB I ini dapat mempermudah masyarakat memiliki kendaraan baru.

"Masih ada waktu untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan khusus pajak BBN KB I ini. Sampai 31 Desember ini," ujar Sepra.

Sepra menerangkan, hingga 11 Desember lalu dari target Rp 10,1 miliar tercapai Rp 7,14 miliar atau sekitar 71 persen wajib pajak yang memanfaatkan program keringanan pajak BBN KB I ini. Sementara untuk capaian keringanan pajak BBN KB II dari target Rp 6 miliar tercapai Rp 2,017 miliar atau sekitar 30 persen.

"Iya cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan program ini. Mudah-mudahan dengan masih adanya waktu sampai akhir bulan ini, target untuk capaian dari program keringanan pajak kendaraan BBN KB I ini, bertambah lagi," paparnya.

Selain program keringanan pajak kendaraan BBN KB I dan BBN KB II, terdapat juga program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Dari target 56.686 unit kendaraan sebanyak 46.090 unit kendaraan memanfaatkan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Dengan nominal pajak yang terkumpul dari program ini, mencapai Rp 38,9 miliar dari target target Rp 61,8 miliar.

"Program keringanan pajak kendaraan ini selain untuk membantu meringankan masyarakat dimasa pandemi Covid-19, juga untuk mendorong pemasukan PAD," demikian Sepra. (**key**)

Gelar Resepsi Pernikahan,...

Sambungan dari hal 9

"Kita ada tim yustisi ada TNI Polres akan melakukan pembubaran resepsi pernikahan," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga akan melakukan penertiban pedagang pasar Panorama yang berjulan di badan jalan karena beberapa waktu lalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengeluarkan surat imbauan untuk pedagang agar kembali berjulan di auning. Agar tidak menggangu lalu lintas dan keselamatan pedagang itu sendiri,

"Nanti kita akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban itu," sampainya.

Surat Edaran Walikota

Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramain/kerumunan, seperti resepsi, pernikahan, aqiqah, sunantan, sykuran, h akbar, tabligh tabligh musibah, dan perayaan natal.

Tidak mengadakan kegiatan penyambutan tahun baru 2021

Tidak mengadakan pasar malam dan konser musik

Rumah-rumah ibadah, pemilik/pengelola tempat hiburan , pusat perbelanjaan, restoran, kafe, rumah makan, agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti setiap pengujung wajib memakai masker, menyediakan, tempat cuci tangan/sabun, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengujung maksimal 50 persen dari kapasitas ruang yang tersedia.

Kusus restoran dan kafe jam bukan dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB

Seluruh ASN Pemkot Bengkulu untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home) kecuali ASN yang bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti RSHD, pukesmas, , perizinan, dukcapil, pemadamserta menghimbau kepada BUMD dan perusahan swasta untuk meyusuaikan.

Bagi masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi terhadap Covid-19 seperti ibu hamil/menyusu dan warga yang berusia lanjut (lansia) dianjurkan agar menghindari keramain, keluar rumah, dan lebih baik berdiam diri di rumah.

Dengan keluarkan SE ini maka SE Walikota Bengkulu nomor 450/18/B. Kesbangpol tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masa pola hidup baru tidak berlaku lag; dan

SE Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai pemberitahuian berikutnya bilamana pandemi Covid-19 sudah dinyatakan terkendalai. (**juu**)

Surat Edaran Walikota

1. Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramain/kerumunan, seperti resepsi pernikahan, akikah, sunatan, sukuran akbar, tabligh musibah, dan perayaan Natal.
2. Tidak mengadakan kegiatan penyambutan Tahun Baru 2021.
3. Tidak mengadakan pasar malam dan konser musik.
4. Rumah-rumah ibadah, pemilik/pengelola tempat hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, rumah makan, agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti setiap pengujung wajib memakai masker, menyediakan, tempat cuci tangan/sabun, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengujung maksimal 50 persen dari kapasitas ruang yang tersedia.
5. Kusus restoran dan kafe jam bukan dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB.
6. Seluruh ASN Pemkot Bengkulu untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home) kecuali ASN yang bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti RSHD, pukesmas, perizinan, Dukcapil, pemadam kebakaran. Serta menghimbau kepada BUMD dan perusahan swasta untuk meyesuaikan.
7. Bagi masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi terhdap Covid-19 seperti ibu hamil/menyusui dan warga yang berusia lanjut (lansia) dianjurkan agar menghindari keramain, keluar rumah, dan lebih baik berdiam diri di rumah.
8. Dengan keluarkan SE ini maka SE Walikota Bengkulu nomor 450/18/B. Kesbangpol tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan dalam Masa Pola Hidup Baru tidak berlaku lagi dan
9. SE Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai pemberitahuan berikutnya bilamana pandemi Covid-19 sudah dinyatakan terkendali.

bank bengkulu
tangguh dan tumbuh
Kantor Pusat :
Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu

TABUNGAN

NAMA BANK	JENIS	SALDO	BUNGA/TH	KRITERIA
Bank Bengkulu	Tabot		1,00%	
	Simpeda	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0,50%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 5 Jt	1,00%	
		> Rp. 5 Jt s.d Rp. 50 Jt	1,25%	
		> Rp. 50 Jt s.d Rp. 500 Jt	1,50%	
		> Rp. 500 Jt	2,00%	
	Tabunganku	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 1 Jt	0,25%	
		> Rp. 1Jt	1,00%	

DEPOSITO

NAMA BANK	1 BLN	3 BLN	6 BLN	12 BLN
Bank Bengkulu	5%	5%	5,25%	5,25%

114 Guru Gagal Dapat...

Sambungan dari hal 9

"Jadi karena anggaran dari pusat baru turun untuk pembayaran 2 bulan, kita ajukan dulu untuk pembayaran 2 bulan ini, dengan total anggaran sekitar Rp 22 miliar," ujar Arfian.

Pembayaran TPG triwulan IV ini, sambung Arfian, diberikan kepada guru pemilik sertifikat yang memiliki Surat Keputusan Penerima TPG (SKPT). Terdiri dari, yaitu guru SLB sebanyak 63 orang, guru SMA 1.751 orang, SMK ada 996 guru, dan pengawas sebanyak 84 orang. Semuanya yang diusulkan untuk pencairan ini lulus verifikasi dan validasi penerbitan SKPT oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"SK yang digunakan untuk syarat pengajuan pencairan ini sama yang digunakan untuk pencairan TPG triwulan III. Ada 114 yang gagal karena tidak memenuhi syarat, seperti kekurangan jam mengajar dan ada juga yang siswanya kurang," jelasnya.

Untuk guru pemilik sertifikat pendidik tingkat SMA/SMK/SLB ini tersebar se Provinsi Bengkulu. Meliputi, yaitu di Bengkulu Selatan sebanyak 378 guru, 15 pengawas. Lalu Rejang Lebong ada 426 guru dan 11 pengawas, Bengkulu Utara sebanyak 387 guru dan 3 pengawas, Kaur ada 130 guru dan 8 pengawas.

Kemudian, Seluma ada 202 guru dan 5 pengawas, Mukomuko ada 194 guru dan 8 pengawas, di Lebong sebanyak 165 guru dan 4 pengawas, Kepahiang ada 229 guru dan 10 pengawas, Bengkulu Tengah ada 204 guru dan 8 pengawas. Terbanyak di Kota Bengkulu ada 898 guru dan 24 pengawas.

"Tahun depan jumlah guru pemilik sertifikat tidak bertambah karena tahun ini tidak ada PPG. Bagi guru pemilik sertifikat pendidik yang gagal mendapatkan TPG tahun ini, masih berkesempatan untuk mendapatkan tahun depan, selama memnuhi syarat," demikian Arfian. (**key**)

Tiga Raperda Ditingkatkan

Sambungan dari hal 9

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bengkulu Sholihin Adnan, SH mengatakan, pembahasan ditingkat pertama sudah selesai bersama Tim Legislasi Pemerintah Kota Bengkulu. Tinggal diparipurnakan sebelum berakhirnya tahun ini. "Untuk rapieda sudah saya usulakan disahkan menjadi Perda diparipurna menjalang penutup tahun ini," jelasnya.

Raperda perubahan nama dari BUMD menjadi Perumda Tirta Hidayah, selain itu juga diatur momenklatur dan tugas organisasi perumda, ada komitmen dari perumda untuk penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat, pelayan mulai dari hulu sampai hilir, air semakin kualitas dan usaha dari Perumda membuat air kemasan.

"Yang paling penting pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan dikuti dengan peningkatan PAD," ujarnya.

Selain itu, pembahasan revisi Perda RTRW pihaknya melakukan dengan sangat detail karena ini menyakut masa depan penataan Kota Bengkulu kedepan. Konsep yang dilakukan investasi tetap maju dan tidak merusak lingkungan hidup dan dilengkapi mitigasi bencana serta kelestarian lingkungan hidup.

"Kita masih dalami kawasan lindung dimana, kawasan budidaya, kawasan barang dan jasa, kawasan industri dan rasio dari pemanfaat ini berpotensi tidak terhadap kerusakan lingkungan ini yang menjadi konsen kami," jelasnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu Sjobirin Hasan, SE, MBA mengatakan, Perda ini merupakan amanah dari PP Nomor 54 Tahun 2017 dimana bentuk perusahan daerah sudah harus beruba menjadi perusahan umum daerah.

"Untuk operasional yang sifatnya rutin tidak ada perubahan ini hanya amanat PP (Peraturan Pemerintah) agar perusahan daerah sudah berubah statusnya menjadi perusahan umum daerah," jelasnya.

Selain itu perubahan nama juga mejadi ciri khas PDAM Kota Bengkulu. Kerena Kota Bengkulu identik dengan religius dan bahagia. Untuk jenis usaha selain perpipaan, juga pengelolaan air limbah dan air minum dalam kemasan.(**juu**)

Pengelola Pasar Malam...

Sambungan dari hal 9

Berapa orang perwakilan dari mereka melakukan hearing bersama anggota DPRD yang berlangsung sekitar 2 jam. Dalam hering tesebut mereka meminta pasar malam tetap diperbolehkan beroperasi.

dan mereka membandingkan seperti tempat hiburan malam kafe, karoke, restoran, musik dan lainnya juga diperbolehkan beroperasi namun tetap menerapkan sesuai dengan prtokol kesehatan.

"Jika kami dilarang beroperasi, kemana kami memenuhi kebutuhan seharihari. Akibat larang ini kami kesulitan menuhi kebutuhan sehari-hari," kata perwakilan pengelola pasar malam Gatot Royadi.

Dia menjelaskan, jika pasar malam tetap dilarang beroperasi, bukan hanya satu dua orang saja yang terdampak perekonomiannya. Namun ratusan pengelola dan pedagang yang terdampak. Maka dari itu pihaknya meminta pemerintah memperbolehkan beroperasi dan mereka akan mematuhi semua protokol kesehatan.

"Kami ingin seperti tempat hiburan lainnya diperboleh beroperasi dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu pun kami telah dulu menerapkan protokol kesehatan sebelum adanya SE ini," ujarnya.

Dia mengatakan, jadwal operasi pasar malam dari 15 hari sampai 20 hari. Pihaknya juga akan tetap beroperasi meskipun tidak diperboleh karena tempat lain juga diperboleh beroperasi. "Lebih baik mati berjuang dari pada, tidak melakukan apa-apa," jelasnya.

Sementara itu Kasat PolPP Kota Bengkulu Yusrizal mengatakan, agar pengelola pasar malam untuk memahami. Karena SE walikota dikeluarkan demi kebaikan bersama. Jika covid sudah menurun tentunya walikota akan kembali mengeluarkan kebijakan.

"Mereka harus punya izin dari satgas covid, kalau tidak ada izin maupun tidak kita bersama-sama akan melakukan penertiban, selagi mereka punya izin tidak ada masa," ujarnya.

Sementara itu Wakil I DPRD Kota Bengkulu Marliadi, mengatakan pihaknya akan mengundang OPD terkait untuk mencari solusi atas dampak dari larangan beroperasi pasar malam. Karena mereka juga butuh penghasilan.

"Kita sudah dengar semua tuntutan mereka, mereka merasa dianak tirikan oleh SE walikota yang melarang pasar malam beroperasi. sedangkan mereka mengantungkan hidupnya di usaha pasar malam tersebut. Sedangkan tempat lain seperti kafe, terus berjalan. Artinya mereka menuntun keadilan," terangnya.(**juu**)

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN **Pemimpin Umum**: HM.MUSLIMIN (nonaktif), **General Manager/Penanggung Jawab**: MARSAL ABADI, **Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia**: MUTIA AMPERIANA, **Pemimpin Perusahaan**: Hj. NURBAITI, **Wakil Pemimpin Perusahaan**: -, **Pemimpin Redaksi**: RIKY DWI PUTRA, **Redaktur Pelaksana**: PATRIS MUWARDI, **Redaktur**: SUMARLIN, HERI APRIZAL, FAZLUR RAHMAN, ADE HARYANTO **Wartawan Kota**: ANUGERAH WAHYU, IKSAN AGUS ABRAHAM, HASRUL, YUNIKE KAROLINA, WINDI JUNIUS, JIAFNI RISMAWARNI, ILHAM JULIANDI, **Wartawan di Daerah**: PERI HARYADI (Mukomuko), ARIE SAPUTRA WIJAYA (Kepahiang), M. RIZKI WAHYUDI (Seluma), ALBERTUS YUDI PRATAMA (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Lebong), WANDA FEBRIANDA (Rejang Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), **Sekretaris Redaksi**: ANNA MARIYOHANA. **Pracetak**: SUTAMRIN (Kabag), FRAN SINATRA, ARI WIDARYANTO, HENDRA IRAWAN PUTRA, REFDIANTO, HEFFY JUNAIDI, **Teknologi Informasi (TI)**: ZULHAMDI, RUSDIYANTO **Manajer Iklan**: KOMI KENDY, **Account Executive (AE)**: WILMAN SITUMORANG, M. IRFANSYAH, DEVI ASTIKA, ADAM MALIK, RIKO PUTRA, AMALUDIN HAKIM, **Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran**: MARSAL ABADI, **Staf**: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, **Design iklan**: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, **Manajer Pemasaran**: HAZRIM, **Deputi**: MASRIYADI, **Staf Pemasaran**: SULISTI HARTINI, SIRHANUDIN, SAMRISMAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI. **Manajer Keuangan**: Hj. NURBAITI, **Deputi Manajer Keuangan**: AGUS SUWARSONO, **Accounting**: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, **Event Organizer (EO)**: TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, **Divisi Anak Perusahaan**: SUKATNO, M FIRDAUS, JEFRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA, **Penerbit**: PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, **Komisaris Utama**: HM ALWI HAMMU, **Komisaris**: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. **Direktur Utama**: H SUPARNO WONOKROMO. **Direktur**: HM. MUSLIMIN, MH, **Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu**: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, **Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan**: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P Natadirdja No. 69 KM 6,5 Bengkulu. **Telepon** (0736) 20882, 22060, 341694, 344754, 346771 **Faximile** (0736) 346770 **Perwakilan Jakarta**: Graha Pena Jakarta Lantai 6 JalanRaya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021)-53699581 **Fax** (021) 53651427 **Percetakan**: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, **Manajer Percetakan**: - , **Operasional Percetakan**: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, **Alamat Percetakan**: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.**Tarif Iklan**: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154

ARIS/RB

PERSIAPAN: KPU Lebong meminta PPK menyiapkan bahan evaluasi selama pelaksanaan tahapan Pilkada.

31 Januari, Tugas PPK PPS Berakhir

PELABAI - Masa tugas 60 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 312 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Lebong akan berakhir 31 Januari. Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong akan menggelar evaluasi kinerja PPK dan PPS. Intinya membahas permasalahan yang ditemukan di tingkat PPS maupun PPK selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidr, SE meminta seluruh PPK dan PPS menyiapkan bahan evaluasi. Khususnya temuan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Hasil evaluasi itu akan disampaikan ke KPU Provinsi Bengkulu dan akan diteruskan hingga ke pusat. ''Tujuan evaluasi untuk menemukan ramuan baru dalam pelaksanaan Pemilu yang lebih baik lagi ke depannya," ungkapnya.

Masa kerja PPS dan PPK sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS. Untuk PPK masa tugasnya 9 bulan. Sedangkan masa tugas PPS 8 bulan. ''Sebelum masa tugasnya berakhir, setiap PPK dan PPS harus melaporkan hasil kerjanya untuk bahan evaluasi," terang Shalahuddin.

Selain itu, dia juga memastikan akan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong untuk memastikan adanya kelalaian penyelenggara Pemilu. Tidak dipungkirinya, masih ditemukan adanya kelalaian pihak penyelenggara dari hasil pelaksanaan Pilkada yang telah dilewati. ''Diantaranya kekeliruan pembagian surat suara di TPS 2 Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis," jelasnya.

Namun temuan itu sudah ditindaklanjuti KPU melalui PPK Kecamatan Pinang Belapis dengan pemberian sanksi teguran kepada KPPS di TPS terkait. Agar kejadian serupa tidak terulang, evaluasi harus dilakukan. **(sca)**

ARIS/RB

RAKOR : Diskominfo mengundang seluruh operator OPD membahas kesiapan e-Absensi 2021.

Absen Manual, PNS Malas

PELABAI - Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan absensi PNS dengan sistem elektronik (e-Absensi) kembali diberlakukan per Januari 2021. Pemberlakuan e-Absensi harus diterapkan kembali mengingat banyak PNS yang malas kerja ketika absensi dilakukan manual. ''Dua bulan ini, sejak absensi dikembalikan manual saya perhatikan banyak PNS yang bolos, kata Mustarani.

Dia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) proaktif mengecek absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Juga meminta Inspektorat turun langsung ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan tingkat disiplin PNS. ''Tindakan PNS yang bermalas-malasan kerja itu tidak beralasan," tutur Mustarani.

Setiap PNS sudah disumpah untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal melayani masyarakat sesuai tugas pokok yang diberikan. Jika PNS yang datang telat atau sama sekali tidak masuk kerja, sama saja melanggar sumpahnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). ''PNS yang malas-malas ini sudah pasti akan kami sanksi tegas," tegas Mustarani.

Mengatasi PNS yang mulai malas kerja, Sekda meminta setiap kepala OPD memberi contoh yang baik. Artinya harus datang dan pulang kerja tepat waktu. Jika memang berhalangan ke kantor harus jelas alasannya agar tidak menimbulkan fitnah yang berujung menurunkan semangat kerja PNS yang dipimpinnya. ''Kalau bukan urusan dinas atau hal yang darurat, saya ingatkan pimpinan OPD stay di kantornya," ungkap Mustarani.

Terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, Jauhari Candra, SP, MM memastikan pihaknya tetap mengawasi disiplin PNS secara rutin. Baik ketika absensi menggunakan sistem digital maupun manual, pengawasan tetap dilakukan ekstra. ''Yang pasti kalau absensi kembali elekteonik, pengawasan lebih ringan karena terkoneksi ke server Diskominfo," tutup Jauhari. **(sca)**

Pilkades Tunggu Kepastian APBD 2021

PELABAI - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk 17 desa di Kabupaten Lebong yang direncanakan 2021, belum tentu bisa terlaksana. Sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 belum ketok palu. Jika usulan dana Rp 1,5 miliar yang diusulkan Dinas Pemberdayaan MAsyarakat Desa da Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong disetujui, Pilkades dijadwakan Oktober.

Namun jika usulan anggaran tidak diakomodir, Pilkades serentak yang seharusnya dilaksanakan 2020 itu kembali ditunda tahun 2022. ''Kalaupun di APBD 2021 nanti tidak terakomodir, anggaran Pilkades akan kami usulkan lagi dalam APBD Perubahan," ujar Kepala Dinas PMDS Kabupaten Lebong, Reko Hariyanto, S.Sos, M.Si.

Dijelaskannya, sesuai usulan tahapan Pilkades akan dimulai sejak Januari. Meliputi pembentukan panitia Pilkades, pendataan mata pilih hingga pemungutan suara. Dana yang diusulkan tidak bisa lagi dirasionalisasi karena sudah sesuai kebutuhan. ''Mudah-mudahan usulan kami diakomodir," tukas Reko.

Diketahui, Pilkades 17 desa itu tersebar di 10 kecamatan. Masing-masing Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Desa Talang Baru dan Talang Baru I, Kecamatan Topos serta Desa Turang Tiging dan Desa Kota Donok, Kecamatan Lebong Selatan. Kemudian Desa Semelako II dan Desa Tanjung Bunga I, Kecamatan Lebong Tengah.

Lainnya, Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Desa Ladang Palembang dan Desa Kampung Dalam, Kecamatan Lebong Utara. Termasuk Desa Suka Marga, Kecamatan Amen, Desa Embong, Kecamatan Uram Jaya serta Desa Ketenong I, Desa Tambang Sawah dan Desa Air Kopras, Kecamatan pinang Belapis. Terakhir, Desa Talang Leak II, Kecamatan Lebong Sakti.

Masa jabatan Kades tersebut terhitung berakhir dalam kurun waktu 31 Mei 2019 hingga 4 April 2020. Pilkades serentak 2020 itu batal dilaksanakan menyusul Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 141/4528/SJ yang ditujukan kepada bupati dan walikota se Indonesia. Seluruh daerah diminta fokus menyukseskan Pilkada. **(sca)**

ARIS/RB

TINJAU: Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah saat meninjau hasil kerja PTM Muara Aman belum lama ini.

PTM Bakal Dikelola Pihak Ketiga

PELABAI - Pengelolaan Pasar Tradisional Modern (PTM) Muara Aman, rencanaya dipihak tigakan. Tujuannya agar pemanfaatan PTM lebih maksimal karena dikelola secara profesional. ''Kalau dipihak tigakan sudah pasti pengelolaannya leboh terjamin," kata Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si.

Mulai dari segi kebersihan hingga penataan pedagangnya, lanjut Bupati, akan diatur secara sistematik. Berbeda jika dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pengelolaannya dikhawatirkan amburadul. ''Sudah banyak contoh aset yang dikelola pemerintah namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan," tukas Bupati.

Pekerjaan fisik bangunan PTM yang tahun 2021 kembali diusulkan anggarannya Rp 15 miliar itu ditarget selesai akhir tahun 2021. Item pekerjaan tinggal finishing lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Termasuk taman dan area parkir di lantai dasar. ''Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya para pedagang yang telah mendukung pembangunan PTM," ujar Bupati.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, Joni Prawinata, SE, M.Si mengatakan, PTM baru bisa ditempati 2022. Lantai bawah diperuntukan dagangan basah atau kebutuhan bahan pokok. Lantai 2 untuk pusat kuliner. ''Sedangkan lantai tiga dan empat untuk dagangan elektronik dan tekstil," terang Joni. **(sca)**

Final, Dana Kelurahan Ditiadakan

PELABAI - Sebelas kelurahan di Kabupaten Lebong, dipastikan tidak akan menerima dana mandiri untuk tahun 2021. Peniadaan Dana Kelurahan (DK) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang berakibat terhadap turunnya penerimaan negara. ''Ini sesuai Undang-Undang APBN 2021 yang disahkan pusat," kata Kabid Anggaran, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Riswan Efendi, SE, MM.

Namun peniadaan DK hanya berlaku untuk tahun 2021. Itu sesuai edaran Menteri Keuangan yang menginformasikan soal peniadaan DK untuk tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Pemerintah daerah diminta menginformasikan ke seluruh kelurahan yang ada di wilayahnya. ''Kalau memang berlanjut ke tahun berikutnya, tentunya akan dilanjutkan dengan edaran susulan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sejak pemerintah pusat menggulirkan DK mulai tahun 2019, Kabupaten Lebong telah menerima suntikan dana dengan total Rp 8,4 miliar. Soalnya DK tahap II tahun ini sudah ditransfer oleh pusat. Prosesnya tinggal menunggu pengajuan pencairan dari masing-masing kelurahan. ''Per tahun Lebong terima DK Rp 4,2 miliar yang teknis pencairannya dibagi dua tahap," papar Riswan.

Tidak dipungkiri, peniadaan DK jelas ikut berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah. Soalnya DK yang disalurkan pusat terbukti sangat membantu Kabupaten Lebong dalam percepatan pembangunan daerah. Tidak hanya bidang fisik, namun sangat membantu peningkatan sumber daya manusia. ''Namun mengingat penerimaan negara minim karena Covid-19, tentu saja daerah tidak bisa protes terkait kebijakan pusat," ungkapnya.

Dengan pagu DK yang 2 tahun ini digelontorkan Rp 4,2 miliar, masing-masing dari 11 kelurahan yang ada di Lebong menerima dana Rp 384 juta. **(sca)**

LINTAS

Pemprov Tidak Transfer DBH

Berdampak ke Hak Honorer dan TPP

MUKOMUKO - Akibat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum kunjung mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH), Mukomuko kembali terguncang diakhir tahun. Pasalnya, ribuan honorer di lingkungan Pemkab Mukomuko terancam tidak mendapatkan pembayaran gaji terhitung tiga bulan terakhir.

Begitupun ribuan PNS. Terancam tidak mendapatkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), selama dua bulan terakhir.

Hak mereka terancam tidak diperoleh didalam tahun ini. Pembayaran hak honorer dan PNS, sangat bergantung dari uang transfer DBH dari Pemprov Bengkulu. Sampai kemarin, Pemprov bergeming. Sementara Pemkab Mukomuko sudah heboh bahkan mulai terkesan kurang kondusif. Karena hampir setiap hari selalu dihebohkan dengan aksi para tenaga honorer menuntut hak.

Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan mengatakan, pembayaran honor maupun TPP PNS melihat kondisi keuangan yang ada di kas daerah. Pihaknya menunggu transfer DBH dari Pemprov yang belum kunjung masuk.

Dari DBH yang semestinya mencapai sekitar Rp 24 miliar pihaknya sangat berharap dapat direalisasikan oleh Pemprov setidaknya sekitar Rp 12 miliar. Jika dana sejumlah itu bisa masuk sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020, maka Pemkab Mukomuko sudah sangat terbantu. Honor dan TPP dapat dibayarkan seluruhnya. "DBH dua triwulan saja masuk, masalah akan teratasi. Nah ini satu rupiahpun belum masuk," tukas Sekda.

Pihaknya sudah berusaha menyampaikan permohonan agar Pemprov dapat membayar utang DBH ke Kabupaten Mukomuko. Tapi belum kunjung ada kejelasan. ''Tanpa uang itu, TPP PNS juga tidak terbayar," sebutnya.

Kini Pemkab Mukomuko masih berharap adanya uang pengembalian dari seluruh OPD. Tentunya uang sisa dari pembayaran kegiatan dan operasional di OPD. Namun itupun belum dapat dipastikan, apakah jumlah pengembaliannya besar, atau malah sebaliknya nihil. "Kita masih melihat apakah masih ada pengembalian dari masing-masing OPD. Di APBD Perubahan 2020, sebenarnya sudah dirasionalkan, sudah kita atur. Tapi memang dana bagi hasil dari provinsi saat itu kita masukkan lagi di APBD Perubahan. Malah yang terjadi, dana ini belum juga terealiasasi," terang Sekda.

Pemkab Mukomuko juga tengah menyiapkan opsi lain. Jika DBH dari Pemprov tidak juga masuk di akhir tahun ini dan pengembalian uang dari OPD nihil, maka honor dan TPP menjadi utang daerah. Dengan syarat, kondisi tersebut menjadi catatan dan masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(**hue**)

14 Ribu Hektare Jadi Kebun Sawit

1.502 Bangunan di Hutan Kawasan

MUKOMUKO – Sekitar 1.502 unit bangunan diduga sudah berdiri di kawasan hutan negara yang ada Kabupaten Mukomuko. Kemudian sekitar 14 ribu hektare hutan kawasan sudah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Ini dinyatakan Manager Analis Data Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra, kemarin.

"Data itu kami dapatkan berdasarkan analisis kami atas tutupan hutan di Kabupaten Mukomuko. Kami menggunakan metedologi polygonisasi tutupan lahan yang terlihat pada citra satelit terbaru yang tersedia pada aplikasi pengindraan jauh Google Earth. Yang kemudian dikombinasikan dengan data Tree Cover Loss Global Forest Watch," papar Egi.

Atas kondisi tersebut, pihaknya pun membagi kawasan hutan produksi di Kabupaten Mukomuko menjadi empat kategori. Yakni, kategori hutan primer, kini luasannya sekitar 41.207,55 hektare. Lalu kategori hutan sekunder, dengan luasan hanya sekitar 20.057,53 hektare. Berikutnya sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit sekitar 14.447,28 hektare. Terakhir, kategori kawasan hutan sudah menjadi lahan terbuka seluas 3.132,89 hektare.

"Kami juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan analisis yang kami lakukan. Ini penting diketahui publik, agar semua tahu fakta sebenarnya kondisi hutan kita," kata Egi.

Sementara itu Direktur Genesis Bengkulu, Uli Arta Siagian menyatakan, setidaknya diduga ada lima perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mukomuko melakukan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan. Diantaranya, PT. PATI, PT. Mitra Puding Mas, PT. Alno, PT. Agromuko dan PT. Daria Dharma Pratama (DDP). "Bahkan kita menduga adanya perumahan atau mess pekerja perusahaan berada di dalam kawasan hutan produksi konservasi Air Manjuto," sampai Uli.

Diprediksi pihaknya lima perusahaan itu jika ditotalkan menguasai lahan sekitar 2.891 hektare. Lahan itu kini diduga sudah menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Pihaknya pun menduga ada upaya pelepasan kawasan tersebut. Sehingga menjadi sah untuk digarap secara hukum. "Dugaan kita itu setelah melihat usulan pelepasan hutan yang diminta Gubernur Bengkulu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari 2018 lalu. Jika ini sampai terwujud, lima perusahaan itu diuntungan dari proses pelepasan hutan," tandasnya.(**hue**)

Peri/rb

AKSI: Puluhan honorer Dinas Satpol PP dan Damkar Mukomuko menghadang mobil Sekda di Kantor BKD Mukomuko, kemarin (28/12).

Tuntut Gaji, Honorer Hadang Mobil Sekda

MUKOMUKO – Aksi menuntut pembayaran gaji selama tiga bulan, digelar puluhan tenaga honorer daerah (honda), kemarin (28/12). Khususnya honorer di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Mukomuko.

Demo kali ini terbilang ekstrem. Karena para honorer ini turut memboyong satu unit mobil Damkar milik Pemda Mukomuko. Dengan mobil tersebut, mereka menyalakan sirinenya. Sehingga sempat mengundang perhatian masyarakat dan menimbulkan suara bising.

Pertama mereka menyasar gedung DPRD Mukomuko. Setelah itu, berlanjut ke Kantor BKD Mukomuko. Aksi mereka makin emosional, setelah melihat kedatangan Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan. Sikap Sekda yang setelah tiba langsung rapat di BKD, tanpa terlebih dahulu menemui massa, membuat mereka geram.

Sehingga, tindakan menghadang mobil dinas Sekda pun dilakukan massa. Mobil sekda dihadang dengan satu unit mobil Damkar. Bertujuan agar Sekda tidak dapat meninggalkan lokasi sebelum ada kepastian pembayaran gaji mereka.

Alhasil, mobil pun tidak dapat keluar saat Sekda menyelesaikan rapat di BKD Mukomuko. Meski sempat diminta mobil Damkar digeser, agar Sekda bisa keluar, permintaan itu idak digubris. "Kuncinya sudah tidak tahu dimana pak. Sudah hilang mungkin pak," teriak salah satu peserta aksi.

Meski sebelum Sekda tiba, honorer ini sudah mendapatkan penjelasan dari Sekretaris BKD Mukomuko, Kasimin, SH. Hasilnya tetap mengecewakan. Mereka pun meminta bertemu langsung dengan Sekda dan Kepala BKD Mukomuko, Agus Sumarman, MM, MPH.

Sekda sendiri baru tiba di Kantor BKD Mukomuko untuk rapat sekitar pukul 11.00 WIB. Menggunakan mobil dinas Toyota Fortuner warna hitam, dengan nomor polisi BD 1516 PS. Mobnas langsung parkir dekat tangga menuju ruang Kepala BKD atau menuju Aula BKD. Turun dari mobil, Sekda langsung berjalan menuju ruang Kepala BKD untuk rapat yang sudah ditunggu Waka I DPRD Mukomuko, Nursalim.

Melihat mobil Sekda parkir, salah seorang petugas langsung menghidupkan mobil damkar. Kemudian memundurkan mobil dan diparkirkan tepat di depan mobnas Sekda.

Usai mengikuti rapat, saat turun dan hendak pergi, Sekda yang sudah didesak-desa terus oleh massa, tampak kaget melihat mobil dinasnya dihadang. Apalagi permintaannya agar mobil damkar digeser, mendapat penolakan dari massa. "Saya sedang mencari solusi. Bagaimana saya mau cari solusi kalau dihadang begini," ujar Sekda.

Sempat terjadi adu mulut antara rombongan tenaga honorer tersebut dengan Sekda. Walaupun Sekda menyampaikan mau rapat dengan anggota DPRD Mukomuko guna membahas permasalahan gaji para honorer. Tapi mobil damkar tidak kunjung digeser. Sehingga mobil dinas sekda tertahan hingga pukul 12.00 WIB di Kantor BKD Mukomuko.

Salah satu perwakilan pengunjuk rasa, Riyesdi menyatakan apa yang mereka lakukan hanya untuk meminta kejelasan pembayaran gaji mereka. "Intinya, hari ini ada kejelasan bagaimana gaji kami. Kami minta kejelasannya hari ini," tegasnya.

Tetap tanpa kepastian akhirnya massa membubarkan diri, dan mobil Sekda lepas dari penghadangan. Informasinya hari ini para honorer Damkar dan Satpol PP akan kembali melakukan aksi damai.(**hue**)

Masih Tersedia Kuota 1.700 Orang

Rapid Test Gratis

MUKOMUKO – Rapid Test Antigen gratis yang digelar Polres Mukomuko dan relawan, diluncurkan kemarin. Layanan ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2020, khusus masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Dari kuota untuk 2.000 orang, masih tersedia sekitar 1.700 kuota lagi. Ini setelah sebanyak 300 orang warga Mukomuko meminta dilakukan rapid test.

Peri/rb

CEGAH COVID-19: Kapolres Mukomuko melakukan rapid test antigen dalam kegiatan pemeriksaan cepat akan dugaan Covid-19 yang digelar gratis oleh Polres Mukomuko.

Peluncuran perdana dilaksanakan langsung oleh Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH. Hadir Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan dan pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Mukomuko.

"Syukur Alhamdulillah, bisa dilihat bagaimana animo masyarakat. Rapid test antigen ini gratis. Lumayan walaupun belum sampai target 2.000 orang yang itu merupakan satu persen dari jumlah masyarakat Mukomuko. Hari perdana ini baru daftar 300 orang," kata Kapolres.

Dijelasnya, Rapid Test yang digelar di Pos 24 Satlantas Polres Mukomuko salah satu upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mukomuko. Dari hasil ini, kemudian akan jadi bahan evaluasi bagi Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka penanganan yang lebih efektif.

"Silakan masyarakat manfaat ini sampai 31 Desember nanti. Tidak perlu menunggu lama. Hanya sekitar 15 menit, hasilnya sudah bisa langsung diketahui. Hasilnya rahasia, tidak untuk diumumkan ke public," sampai Kapolres.

Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan menyambut positif. Ini akan membantu Satgas dalam menekan penyebaran Covid-19. Banyak kegiatan tes demikian, sangat penting. Oleh sebab itu, Pemkab Mukomuko telah menjalin kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat untuk mendapatkan hasil tes swab yang cepat.

Saran dari pihak Unand, bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan swab. Dan tidak perlu juga panik angka Covid-19 nantinya menjadi meningkat. Belajar dari pengalaman Sumatera Barat, peningkatan angka positif hanya sekitar sebulan. Setelah itu di Sumatera Barat menunjukkan tren menurun untuk jumlah warga yang terpapar Covid-19. "Makin banyak swab, makin bagus. Sehingga mudah terpetakan. Kalau didiamkan saja, nanti malah jadi gunung es," kata Marjohan.

Kemampuan Unand dalam uji sampel swab, bisa diketahui hasilnya 1X24 jam. Sebab sekarang ini, Unand punya kapasitas memeriksa 5.000 sampel dalam sehari. Rutin terpakai setiap hari hanya 1.500. Sehingga Mukomuko berkesempatan bekerja sama selama lima tahun ke depan.

"MoU kita dengan Fakultas Kedokteran Unand selama 5 tahun. Sehingga tidak perlu MoU setiap tahun. Terkecuali untuk RSUD dan Dinas Kesehatan Mukomuko. Untuk kecepatan hasil uji sampel swab, ini yang ketiga kalinya, dalam 1X24 jam, hasilnya sudah sampai ke saya," demikian Marjohan.(**hue**)

Peri/rb

PENGANGKATAN HONORER: Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan menerangkan mengenai perpanjangan SK pengangkatan honorer daerah untuk tahun depan.

Selagi Bupati Huda, 1.300 Honda Tidak Diperpanjang

MUKOMUKO - Final sudah, 1.300 lebih pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau honorer daerah, tidak akan diperpanjang SK penangkatannya di tahun 2021. Selagi Bupati Mukomuko masih dijabat H. Choirul Huda, SH.

Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan menjelaskan, sikap bupati saat ini demikian, bukan karena tidak peduli dan tidak ingin memperjuangkan ribuan honorer daerah. Itu lebih dikarena Hida tidak ingin setelah berakhir masa jabatannya, honorer yang sudah diangkat kembali berdasarkan surat keputusan (SK), terkatung-katung. Tentu ini akan jadi beban bagi bupati periode selanjutnya.

Bupati menyadari, bahwa masa jabatannya di tahun 2021 kurang dari dua bulan. Yang jika dipaksakan dikhawatirkan berimbas buruk pada Honda yang diperpanjang SK pengangkatannya.

Bupati saat ini mempersilakan pengangkatan kembali ribuan Honda oleh bupati selanjutnya. Karena Bupati periode berikutnya yang punya kewenangan dan waktu banyak untuk mengurusi pemerintahan berikutnya. ''Bukan berarti dirumahkan. Bupati yang baru nanti silakan untuk melanjutkan," ungkap Sekda.

Tentunya pengangkatan kembali itu akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Serta melihat kemampuan keuangan daerah. ''Kalau Bupati terpilih mau lakukan sesuai mekanisme yang ada, akan kita konsultasikan," sebut Sekda.

Terkait menyambut Bupati Mukomuko periode berikutnya, Sekda mengklaim belum ada persiapan apapun. Setelah ditetapkan oleh KPU Mukomuko nanti, pihaknya akan langsung mengusulkan penerbitan SK Bupati terpilih. Namun semuanya baru dilakukan sesuai petunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. "Kita ajukan usulan penerbitan SK Bupati terpilih. Sekarang ini kita tunggu arahan dari Provinsi," pungkasnya.(**hue**)

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Meles Atas
CURUP - 39153

Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sarden	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

2.279 Sampel Warga Rejang Lebong Diperiksa

CURUP – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) mencatat, hingga kemarin setidaknya sudah ada 2.279 sampel warga Kabupaten RL yang diperiksa untuk uji swab. Dimana dari jumlah tersebut ada 478 sampel yang dinyatakan positif dan 1.801 sampel dinyatakan negatif.

''Hingga hari ini sudah ada 2.279 sampel yang dilakukan uji swab di laboratorium. Hasilnya ada 478 sampel positif dan 1.801 sampel negatif. Selain itu, hari ini (kemarin, red) tidak ada penambahan kasus baru maupun tambahan selesai konfirmasi alias sembuh," terang Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kepada RB kemarin.

Dijelaskan Syamsir, hingga kemarin tercatat jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 478 kasus. Dengan jumlah yang selesai kasus konfirmasi atau sembuh sebanyak 425 kasus. Sedangkan jumlah konfirmasi positif masih dalam pengawasan mencapai 53 kasus. ''Total sembuh sudah mencapai 425 kasus dan yang masih pengawasan tinggal 53 kasus lagi," sambung Syamsir.

Ditambahkan Syamsir, untuk jumlah warga Kabupaten RL yang menjadi pelaku perjalanan tercatat sudah mencapai 13.612 orang. Dengan jumlah suspek tercatat 275 orang dan suspek discarded sebanyak 173 orang. ''Sedangkan jumlah suspek di isolasi teracatat sebanyak 6 orang dan jumlah probable sebanyak 6 orang," demikian Syamsir.**(dtk)**

PUJI PRAYITNO

Dampak Covid-19, Pelanggaran dan Lakalantas Menurun

CURUP – Kondisi pandemi Covid-19 sepertinya juga mempengaruhi masyarakat dalam beraktivitas serta menggunakan kendaraan. Ini bisa dilihat dari trend penurunan jumlah pelanggaran lalulintas serta kejadian kecelakaan selama tahun 2020 yang dicatat Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres RL.

Seperti yang dijelaskan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH didampingi Kasat Lantas Iptu Aan Setiawan, S.Sos, MM kepada RB kemarin (28/12). Selama tahun 2020 tercatat oleh Satlantas, ada 3.582 tilang dan 569 teguran yang diberikan kepada pengendara yang melanggar. Jumlah tersebut sangat turun drastis dari catatan mereka pada tahun 2019 lalu. Dimana jumlah tilang mencapai 6.074 lembar dan 1.568 teguran.

''Jumlah tilang dan teguran sangat turun drastis dari tahun sebelumnya. Untuk tilang mengalami penurunan hingga 2.492 tilang dan teguran turun mencapai 999 teguran. Sedangkan untuk pelanggaran lalulintas didominasi pengendara usia 22-30 tahun yang jumlahnya mencapai 1.085 pelanggar," sampai Kapolres.

Tidak hanya pelanggaran, lanjut Kapolres, jumlah angka kecelakaan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2020 tercatat ada 50 kasus kecelakaan yang ditangani Satlantas Polres RL, sedangkan tahun 2019 sebanyak 54 kasus. Begitu juga untuk korban meninggal dunia (MD) dan Luka Berat (Lurat) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun ini tercatat ada korban MD 20 orang dan tahun lalu mencapai 27 orang.

''Sedangkan untuk korban LB tahun 2020 mencapai 14 orang dan tahun 2019 mencapai 25 orang. Untuk kerugian material sendiri, total tercatat tahun ini mencapai Rp 339,3 juta. Sedangkan tahun lalu kerugian materil mencapai Rp 1,024 miliar atau turun sebanyak Rp 625,6 juta," lanjut Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, kondisi tersebut salah satunya memang dipengaruhi faktor pandemi Covid-19 saat ini. Dimana Satlantas Polres RL sepanjang tahun lebih banyak melakukan sosialisasi kepada pengendara terkait protokol kesehatan (prokes) Covid-19. ''Meskipun untuk tindakan tetap kita lakukan terhadap pelanggar, namun kita lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya sosialisasi. Khususnya terkait disiplin prokes Covid-19 kepada pengendara," imbuh Kapolres.**(dtk)**

Wanda/rb

RELEASE: Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH saat menggelar release akhir tahun bersama jajarannya.

Kasus Narkoba Tertinggi

CURUP – Kapolres Rejang Lebong (RL) AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH bersama jajarannya kemarin menggelar kegiatan release akhir tahun di Aula Polres RL. Kegiatan dihadiri seluruh Pejabat Utama (PjU) Polres RL serta personel masing-masing satuan. Dari hasil release, diketahui ada 10 kasus teratas dimana kasus narkoba menduduki posisi paling tinggi atau ranking pertama.

Dalam releasenya, Kapolres menyampaikan 10 kasus teratas selama tahun 2020 yaitu, narkoba sebanyak 57 kasus, perlindungan anak sebanyak 27 kasus dan kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan (Curas) sebanyak 26 kasus. ''Jadi di posisi pertama kasus narkoba, kedua kasus perlindungan akan dan ketiga kasus curas," sampai Kapolres.

Dilanjutkan Kapolres, selain tiga kasus tersebut, diikuti kasus lainnya yaitu penggelapan sebanyak 21 kasus, penganiayaan berat sebanyak 21 kasus, pencurian disertai pemberatan sebanyak 20 kasus dan curanmor sebanyak 18 kasus. Selanjutkan sajam sebanyak 17 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 13 kasus dan pencurian sebanyak 7 kasus.

''Dari sepuluh laporan kasus teratas selama 2020 yang mencapai 227 kasus tersebut, kita berhasil mengungkap sebanyak 116 kasus. Atau jika dipersentasekan mencapai 73,12 persen. Untuk sisanya masih dalam proses penyelidikan maupun masih dalam proses penyidikan," lanjut Kapolres.

Dibagian lain, Kapolres juga menyampaikan, untuk Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) selama tahun 2020, menangani setidaknya 313 kasus dengan jumlah penyelesaian mencapai 234 kasus. Atau jika dipersentasekan mencapai 74,76 persen. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 317 kasus, kasus yang selesai mencapai 280 kasus atau mencapai 88,32 persen.

Sedangkan untuk Satuan Reserse Narkoba (satresnarkoba), tambah Kapolres juga mengalami penurunan. Dari 57 kasus yang ditangani selesai sebanyak 47 kasus atau 82,4 persen. Menurun dari tahun sebelumnya dimana 47 kasus yang ditangani sudah selesai 44 kasus atau mencapai 93 persen. Dari kasus yang ditangani selama tahun 2020, Satresnarkoba berhasil menyita berbagai barang bukti narkoba berbagai jenis.

''Untuk barang bukti sabu seberat 113,49 gram dan barang bukti ganja seberat 3.561,63 gram. Untuk barang bukti obat-obatan sendiri yaitu ekstasi sebanyak 25 butir. Selain barang bukti, kita juga berhasil mengamankan tersangka selama tahun 2020 sebanyak 83 tersangka dengan rincian, 78 laki-laki dewasa ditambah 2 tersangka perempuan dan tiga orang tersangka anak-anak," demikian Kapolres. **(dtk)**

Wanda/rb

MENURUN : Jumlah pengunjung di lokasi objek wisata suban air panas menurun saat liburan Nataru, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam momen yang sama.

Liburan Nataru, Jumlah Kunjungan Menurun

Objek Wisata Pemandian Suban Air Panas

CURUP TIMUR – Pandemi Covid-19 memang sangat mempengaruhi segala sektor usaha, salah satunya usaha wisata di Kabupaten Rejang Lebong (RL). Dimana terlihat, jumlah kunjungan di lokasi wisata sangat menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya pada liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satunya terlihat di objek wisata pemandian suban Air Panas Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur. Jika tahun-tahun sebelumnya baik pada tanggal merah 25 Desember maupun hari minggu, pengunjung yang datang lebih dari 1.000 orang, sedangkan saat ini hanya berkisar 200 orang pengunjung saja.

''Penurunan jumlah pengunjung sangat drastis, dari tahun-tahun sebelumnya mencapai ribuan orang dan saat ini, baik saat hari natal maupun hari minggu lalu, jumlah pengunjung hanya kisaran 200 orang pengunjung saja. Faktor nya jelas, karena saat ini masih dalam massa pandemi Covid-19," sampai Robert Bastian salah satu pengelola objek wisata Suban Air Panas kemarin.

Pengunjung yang datang, sambung Robert, memang bukan hanya dari lokal Kabupaten RL saja. Melainkan juga banyak dari Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan maupun dari Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang. Mereka datang dengan membawa serta keluarganya menggunakan kendaraan roda empat. ''Dari luar, pengunjung berasal dari Lubuklinggau dan Kota Bengkulu, serta beberapa kabupaten tetangga," sampai Robert.

Ditambahkan Robert, terkait kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, mereka sagat ketat. Para pengunjung diwajibakan mencuci tangan pakai sabun ditempat yang disediakan, serta wajib menggunakan masker sebelum masuk ke objek wisata. Bahkan jika ada pengunjung yang tidak membawa masker, akan mereka berikan secara gratis.

''Kita tetap menegakan kedisplinan protokol kesehatan selama pengunjung berwisata. Kalau ada yang tidak membawa masker, maka akan kita berikan masker. Karena jangan sampai objek wisata menjadi salah satu cluster penyebaran Covid-19. Meskipun memang tingkat kunjungan tidak sepadat seperti biasanya," demikian Robert.**(dtk)**

Pelaku Curanmor Sudah Dua Kali Masuk Penjara

CURUP – Penyidik Satuan reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rejang Lebong (RL) terus mendalami aksi curanmor yang dilakukan SA (28) warga Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur. SA sendiri tertangkap tangan saat beraksi mencuri motor milik Rudi Hartono (42) warga Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup.

Dari hasil penyidikan sementara, diketahui bahwa SA merupakan seorang residivis dan sudah dua kali masuk penjara sebelumnya dalam kasus yang berbeda. Masing-masing masuk penjara karena kasus jambret dan karena kasus narkoba. Seperti yang disampaikan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kasat Reksrim AKP Ahmad Musrin Muzni, SH, S.Ik kemarin.

''Tersangka ini merupakan residivis dan sudah dua kali masuk penjara, masing-masing kasus jambret dan kasus narkoba. Jadi ini ketiga kalinya tersangka masuk penjara dan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Kita masih mendalami apakah pelaku ini sudah pernah beraksi di TKP lain sebelumnya," sampai Musrin.

Ditambahkan Musrin, dari keterangan pelaku, saat beraksi dirinya sebenarnya tidak sendirian melainkan berdua. Hanya saja saat dirinya beraksi mengambil motor korban, rekannya sudah terlebih dahulu pergi sesaat sebelum dia tertangkap. ''Berdasarkan keterangan pelaku, dia tidak sendirian melainkan bersama satu rekannya. Tapi saat dia beraksi, rekannya sudah duluan pergi. Kita sudah kantongi identitasnya dan sedang melakukan pengejaran terhadap rekan tersangka," demikian Musrin.**(dtk)**

Perangkat Desa dan Tomas Diminta Berperan

Perangi Narkoba

CURUP – Kondisi peredaran narkoba sepertinya sudah sangat mengkhawatirkan di Kabupaten Rejang Lebong (RL). Pasalnya peredaran barang haram tersebut bukan hanya ada di kawasan pusat kabupaten atau perkotaan saja, melainkan sudah tembus dan menyebar luas di lingkungan desa/kelurahan. Salah satunya yang beberapa waktu lalu terungkap oleh Satuan Reserse Narkoba (satresnarkoba) Polres RL, adanya pengedar sabu tingkat desa.

Wakil Bupati RL H. Iqbal Bastari, S.Pd, MM mengetahui hal tersebut merasa sangat prihatin. Apalagi jika penggunanya atau yang membeli narkoba tersebut rata-rata di kalangan remaja dan pemuda. Sehingga jelas ini merusak generasi penerus bangsa dan butuh kepedulian semua pihak untuk mengatasinya.

Wabup meminta, peran perangkat desa dan tokoh masyarakat (tomas) lebih ditingkatkan. Terutama terhadap aktivitas dan kegiatan-kegiatan negatif dari masyarakat dilingkungannya. Guna mendeteksi dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan, salah satunya soal peredaran narkoba.

''karena perangkat desa dan tokoh masyarakat lebih memahami dan mengetahui karakter dan kegiatan warga dilingkungannya. Jangan sampai narkoba ini merajalela dan menyebar luas hingga ke tingkat desa. Kalau memang mendeteksi adanya peredaran narkoba, segeralah melapor kepada pihak kepolisian, jangan dibiarkan saja," sampai Wabup.

Ditambahkan Wabup, orang tua juga diharapkan ikut waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. Jika memang diketahui menggunakan narkoba, segera mencari bantuan agar anaknya bisa direhabilitasi sebelum terjerumus semakin dalam. ''Tidak perlu takut melapor, karena mereka tetap bisa diselamatkan sebelum terjerum semakin dalam. Apalagi kalau mereka masih usia sekolah dan kuliah, harus diselamatkan," imbau Wabup.

Sementara itu, Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH menyampaikan bahwa perangkat desa dan tokoh masyarakat bisa berkoordinasi dengan babinkamtibmas masing-masing wilayah. Apalagi jika memang ada potensi gangguan kamtibmas, termasuk adanya peredaran narkoba di wilayah mereka.

''Tidak perlu takut untuk melapor, apalagi mereka sebagai perangkat desa dan tokoh masyarakat sama-sama memiliki kewajiban beban moral untuk mengantisipasi warganya terjerat narkoba. Jangan hanya diam saja melihat warganya terjerumus ke dalam limbah hitam narkoba, karena yang terancam bukan orang lain saja, tapi juga keluarga kita sendiri," demikian Kapolres. **(dtk)**

Iklan Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.
KOTA BENGKULU : GRAHA PENA, Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7 Telp (0736) 22060 & (0736)-20882
CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria), Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516
MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

• KEHILANGAN •
SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No.00001/Tj Agung, NIB 07.06.11.1200002, A/n Drs Buyung Jundran, Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

• RUANG USAHA •
DIJUAL, 2 Ruko skaligus, co2k utk kntor, Jl.S.Parman No.19, Kota Bkl, Masing 2,3 Lantai, LT 282m2, LB 408m2, Hrg 3M, Rumi 081804057800 / 08112959596

DIJUAL RUMAH
Lokasi di UNIB Belakang Gang Melati (persis depan Gedung Rektorat UNIB)
beserta dengan 10 kamar kosan aktif.
dari jalan Raya Kandang Limun hanya berjarak 100m
ukuran tanah 20x20m.
lokasi strategis untuk investasi kos-kosan
buka harga 1.1milyar (nego)
Hubungi:
Ibu Eti 081317567743

DI JUAL RUKO 2 LANTAI
LOKASI STRATEGIS
Lokasi. JL. M.T. Haryono Penggantungan, Kec. Ratu Samban, Ruko 2 tingkat di dekat simpang Sentiong, Kota Bengkulu. UK. 3,7m x 14m Harga nego
Minat Hub. April
0813 7347 7299

JUAL RUKO
Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Kompi Bengkulu (pas didepan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RM padang dan sebelah kanan warung Bakso
fasilitas : 1 kamar, kamar mandi, ruang masak, sumur bor & tedmon, cocok untk usaha apa saja.
Harga 360 Juta nego
Minat hubungi :
082179363606 / 082375706151

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM,
Rumah Fas :
3 Kmr Tidur, 1 R. Tamu,
1 R. Tv/Keluarga,
2 Teras Muka dan Belakang,
1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak
Tanah Sudah Dipagar Keliling,
Pagar Besi dan Tembok
Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34
Kel. Padang Harapan Bkl
Hubungi :
0878 9496 1917
0819 1931 8688
(Berminat silahkan cek lokasi)

ARIE/RB

BAGI BERAS: Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP membagikan 1 karung beras kepada masyarakat terdampak Covid-19, kemarin (28/12).

Salurkan 80 Kg Beras Bansos

KEPAHIANG – Setelah menyalurkan sekitar ratusan kilogram beras kepada warga terdampak Covid-19, Polres Kepahiang kembali menyalurkan beras bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan pada penyaluran sebelumnya.

Kalini sebanyak 80 Kg beras disalurkan Polres Kepahiang bekerja sama dengan Koramil Kepahiang. Berlangsung di depan Puskesmas Pasar Kepahiang, tak jauh dari Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru Polres Kepahiang.

Sebanyak 16 karung yang masing-masing berisi 5 kg beras disalurkan kepada para tukang becak yang berada di sekitar pos pengamanan tersebut. Bantuan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban para tukang becak di masa pandemi Covid-19 saat ini, dimana pada situasi sekarang memberikan dampak terhadap perekonomiannya.

Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.IK, M.AP mengungkapkan penyaluran bantuan ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan Polri di seluruh Indonesia. Selain melakukan pengamanan Tahun Baru, Polres Kepahiang juga menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat Kepahiang yang terdampak Covid-19.

"Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri dan TNI kepada masyarakat terdampak Covid-19, khususnya di Kabupaten Kepahiang. Selain itu juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Kepahiang," terang Kapolres.

Diakui Kapolres, sasaran dari penerima bantuan ini adalah warga yang benar-benar secara ekonomi merasakan dampak dari Covid-19, sesuai dengan hasil survey dan pendataan yang dilakukan oleh jajaran Polres Kepahiang.

"Selain itu juga kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas antara Polri, TNI dan Pemkab Kepahiang bersama masyarakat, sehingga terciptanya kerjasama yang solid dalam menjaga kamtibmas kedepannya," demikian Kapolres. **(sly)**

ARIE/RB

PENGESAHAN: Bupati Kepahiang Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU dan Waka I DPRD Andrian Defandra, SE, saat penandatangan lembar pengesahan Perda RP3KP, kemarin (28/12).

Perda RP3KP Sah Berlaku

KEPAHIANG – Setelah melakukan pembahasan hampir 2 bulan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), sah menjadi perda. Disahkan dalam rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Kepahiang, kemarin (28/12).

Dalam rapat yang dihadiri 15 dari 25 orang anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan 25 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang, Bupati Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja DPRD Kabupaten Kepahiang.

Menurut Bupati, Perda RP3KP ini sabagai payung hukum bagi kegiatan multi sektor yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Perda ini, Pemkab mulai bertugas menyusun dan merencanakan pembangunan perumahan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bupati menambahkan, perda yang dibentuk ini dengan tujuan pengembangan perumahan di Kabupaten Kepahiang tertata dengan baik. Itu wajib ditaati oleh developer. Tidak lagi ada lagi developer membangun perumahan di sembarangan tempat yang menyebabkan permasalahan ke depannya, seperti banjir dan lain sebagainya.

"Kita belum bisa sebutkan sekarang kecamatan mana saja atau desa mana saja yang akan dijadikan lokasi untuk pengembangan permukiman masyarakat. Semoga saja melalui penerapan perda ini nanti, bisa memenuhi kebutuhan Kabupaten Kepahiang dalam jangka panjang di sektor perumahan," demikian Bupati.**(sly)**

Anjab dan BK Sudah di KemenPAN-RB

Perekrutan PPPK dan CPNS 2021

KEPAHIANG – Rencana Pemkab Kepahiang melakukan perekrtutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2021 mendatang, tampaknya ada lampu hijau. Tampak dari hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dilakukan Pemkab Kepahiang, saat ini sudah di tangan KemenPAN-RB untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Hanya saja berapa banyak kuota PPPK dan CPNS yang akan dibuka di tahun 2021 mendatan, masih menunggu hasil evaluasi Anjab dan ABK tersebut oleh KemenPAN-RB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Kepahiang, Ardiansyah, SH mengungkapkan, rencana perekrutan PPPK dan CPNS di tahun 2021 mendatang akan lebih difokuskan pada tenaga guru dan tenaga kesehatan.

"Untuk formasi masih menunggu kepastian dari KemenPAN-RB berdasarkan evaluasi Anjab dan ABK yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang jelas akan ada penerimaan CPNS dan PPPK," ungkap Ardiansyah.

Untuk anggaran, Ardiansyah mengatakan, dalam APBD 2021 Pemkab Kepahiang sudah menyampaikan usulan anggaran rekrutmen PPPK dan CPNS yang masuk dalam anggaran belanja pegawai. Hanya saja untuk angka pastinya ia belum mengetahui lantaran bukan kewenangan pihaknya. "Kalau untuk anggaran, dibawah kewenangan Badan Keuangan Daerah (BKD). Kalau kita (BKD-PSDM, red) hanya pada usulan rekrutmennya saja," jelasnya. **(sly)**

ARIE/RB

DUA JALUR: Beberapa titik jalan di pusat Kota Kepahiang diberlakukan dua jalur guna menghindari penumpukan kendaraan di momen liburan Tahun Baru.

Polres Rekayasa Lalin

Antisipasi Kemacetan Arus Kendaraan

KEPAHIANG – Mengantisipasi kemungkinan penumpukan kendaraan hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan di libur Tahun Baru 2021 mendatang, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kepahiang menerapkan rekayasa lalu lintas. Dilakukan di beberapa titik di pusat Kota Kepahiang. Khususnya di ruas jalan satu jalur, yang direkayasa menjadi dua jalur.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Lantas Iptu. Fery Octaviari, S.IK mengatakan telah berkoordinasi bersama forum komunikasi lalu lintas dan jalan. Seperti BPBD, Dishub, Jasa Raharja, Satpol PP dan lainnya dalam melakukan rekayasa jalan dan lalu lintas tersebut.

"Rekayasa jalan dan lalu lintas ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan maupun kamacetan yang disebabkan parkir liar dan aktivitas masyarakat serta lalu lintas kendaraan pada momen libur tahun baru ini," terangnya.

Untuk itu Polres Kepahiang sudah melakukan sosialisasi di beberapa titik jalan yang mulai diberlakukan satu jalur atau forboden. Seperti di simpang Kampung Bogor Pasar Pagi, Terminal Pasar Kepahiang dan beberapa titik lainnya yang berpotensi mengalami kemacetan dan kepadatan kendaraan.

"Salah satu inisiatif kita adalah dengan membuat median dua jalur dengan traffic cone dan barrier yang bertujuan untuk memecah kepadatan dan mencegah pengendara, pejalan kaki, maupun tukang becak melawan arus dan parkir sembarangan," ungkap Fery.

Pantauan RB, semenjak mulai diberlakukannya forboden di beberapa titik jalan, kondisi arus lalu lintas di pusat Kota Kepahiang tampak teratur. Kendati sejak Senin (28/12) lalu arus kendaraan mulai menunjukkan perubahan. Melihat kondisi ini, Satlantas Polres Kepahiang mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas libur Tahun Baru agar bisa memanfaatkan beberapa pos pelayanan yang telah disediakan oleh Polda Bengkulu dan jajaran di wilayah Kabupaten Kepahiang.

"Kita ada pos pelayanan dan pos pengamanan di depan BPBD Kepahiang. Masyarakat bisa memanfaatkan pos tersebut untuk berkoordinasi dan pelayanan terkait arus lalu lintas," demikian Fery.**(sly)**

Dewan Sarankan Ganti Kontraktor

Bupati: Tidak Semudah Itu

KEPAHIANG – Pekerjaan 3 item pembangunan melalui penyertaan modal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hingga saat ini belum menunjukkan progress yang signifikan. Karena itu DPRD Kabupaten Kepahiang menyarankan kepada Pemkab untuk kembali melakukan evaluasi terkait pekerjaan yang sedang berjalan tersebut.

Dikemukakan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, Eko Guntoro, SH, pinjaman ke PT SMI tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan. Fakta saat ini, pembangunan belum menunjukkan progress yang sesuai harapan di sisa waktu pinjaman yang hampir berakhir.

"Besar kemungkinan pekerjaan tersebut tidak akan selesai. Untuk itu kita minta kepada Bupati terpilih kembali, untuk melaksanakan MoU terkait perpanjangan tenor pinjaman kepada PT SMI. Sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik," jelasnya.

Selain itu, Eko juga menyarankan kepada Pemkab Kepahiang untuk mengevaluasi pihak rekanan yang saat ini mengerjakan ketiga proyek percepatan pembangunan tersebut. Jika memang pekerjaan yang dilakukan pihak rekanan dinilai tidak maksimal, maka Pemkab tidak usah sungkan untuk memutuskan kontrak dan menggantinya dengan rekanan lain yang bonafit.

"Untuk apa ambil kontraktor luar, kalau pekerjaan tidak beres. Carilah kontraktor lain yang bonafit, walaupun kontraktor lokal. Toh di lokal kita pun banyak kontraktor yang bagus," tegas politisi Gerindra ini.

Disisi lain, Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak semudah itu mengganti rekanan yang saat ini sedang bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi dengan kondisi saat ini baru 1 rekanan yang mencairkan uang muka pekerja. Sementara 2 rekanan lainnya walaupun belum mencairkan uang muka sudah mulai melakukan pekerjaan.

"Tidak semudah itu mengganti rekanan, apalagi kondisinya berbeda dengan pekerjaan umumnya, yakni tidak ada pencairan uang muka dalam melakukan pekerjaan," tegas Bupati.

Ia mengatakan, lambannya pekerjaan percepatan pembangunan tersebut lantaran sebelumnya dalam perencanaan diketahui bahwa para rekanan ini hanya mengerjakan pembangunan, dengan akses yang sudah selesai dibangun atau dibuka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah didapat Pemkab Kepahiang tahun 2020 lalu.

"Namun karena DAK kita seluruhnya dipangkas, jadi para rekanan ini memulai pekerjaan benar-benar dari awal, yakni dari pembukaan akses hingga akhirnya memulai pembangunan. Dan saat ini kita masih dalam proses usulan penambahan waktu pinjaman kepada pihak PT SMI. Karena saat ini memang sulit untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Selain faktor akses, juga pekerjaan terkendala faktor cuaca sehingga progresnya belum sesuai harapan," demikian Bupati.**(sly)**

TELEPON PENTING

Call Center Polsek Karang Tinggi :

Perwira PengHubung	:	081278617339
RSUD Benteng	:	081368965552
Pos A Nakau	:	085279125960
Pos B Meringgi Sakti	:	085279125930

2 Pengelola Wisata Akui Tak Mampu Bayar Pajak

BENTENG – Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng mengklaim saat ini pencapaian pajak hiburan berkisar Rp 30 juta dari target sebesar Rp 46,2 juta. Masih minimnya Wajib Pajak (WP) hiburan membayar pajak ini karena ada dua WP yang hingga saat ini belum membayar pajak.

Namun saat dikonfirmasi pada dua objek wisata tersebut, diketahui dua objek wisata bersangkutan merasa tak mampu membayar pajak hiburan karena minim pendapatan akibat Covid-19. Pemilik objek wisata Taman Wisata Family (TWF) Desa Pekik Nyaring, Dharma Fitrah mengakui pihaknya belum mampu untuk membayar pajak hiburan. Sejak April lalu TWF tidak lagi beroperasi karena wabah Covid-19.

Selain itu, dampak wabah Covid-19 ini, dari 12 karyawan yang ada, saat ini hanya tinggal 2 karyawan lagi. "Dengan kondisi saat ini, kami sangat berat untuk membayarkan pajak hiburan ke Pemkab Benteng. Semua ini bukan karena faktor kesengajaan, namun kondisi saat ini. Kita meminta Pemkab Benteng tidak hanya sekedar menagih pajak kepada para pemilik wisata, namun juga turut melakukan pengecekan ke lokasi untuk melihat langsung pengelolaan wisata," keluhnya.

Dia juga berharap Pemkab untuk bisa menggunakan aula yang ada di TWF. Sehingga TWF bisa mendapatkan pemasukan dan usaha miliknya tidak mati. "Kita sangat berharap kepada Pemkab Benteng agar bisa peduli dengan kami pelaku usaha wisata. Bisa melaksanakan acara, bisa memanfaatkan aula di wisata tempat kami. Tidak selalu harus menyewa di hotel," harap Dharma.

Hal senada diungkapkan Pengelola Buana Alit, Yanto didampingi Mustakim. Ia mengungkapkan saat wabah Covid-19 menyebar, jumlah pengunjung di wisata miliknya tersebut mengalami penurunan drastis. Pada hari biasa, pengunjung mencapai 70-100 orang. Sedangkan saat ini hanya mencapai 30 orang.

"Sejak Juni kami mulai buka, tapi karena pandemi Covid-19 maka ditutup selama dua bulan. Kemudian pada Oktober hingga sekarang mulai dibuka kembali. Tapi untuk pendapatan mengalami penurunan drastis. Jika soal pajak, itu kewenangan dari pemilik," ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng, Dessy Aprianti, SH membenarkan kedua tempat wisata tersebut belum melakukan pembayaran. Namun dalam waktu dekat pihaknya akan mengecek langsung ke lokasi untuk memastikan kebenarannya.

"Belum ada pembayaran, tetapi dalam waktu dekat kita akan cek langsung ke lokasi. Kita mengerti kondisi saat ini, namun kita meminta kepada mereka untuk mengerti juga posisi kita," ucap Dessy.**(jee)**

Bagikan Makanan Bergizi

BENTENG - Sebagai bentuk kepedulian, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Elva Hartati Murman, S.IP, MM memberikan makanan tambahan bergizi kepada tim medis di lima puskesmas. Paramedis puskesmas yang mendapatkan bantuan tersebut yakni Puskesmas Pekik Nyaring, Sri Kuncoro, Sidodadi, Tanjung Dalam dan Puskesmas Bentiring.

Elva mengatakan tim medis pantas mendapat perhatian di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya memberikan mereka bantuan agar mereka tetap semangat dan tetap sehat dalam menjalankan tugas. Bantuan yang diberikan meliputi minyak goreng, biskuit, sarden, susu dan makanan bergizi lainnya.

"Selain tim medis di Kabupaten Benteng, kegiatan sosial seperti ini juga dia lakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Bantuan kepada tim medis Insya Allah tidak hanya sebatas ini saja, namun akan tetap dilanjutkan pada tahun depan," jelas anggota DPR dapil Provinsi Bengkulu ini.

Di tempat sama, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesahatan (Dinkes) Benteng menyampaikan terima kasih karena sudah memberikan bantuan kepada tim medis di lima puskesmas yang ada di Benteng. Dengan adanya bantuan ini tim medis yang ada merasa terbantu dan diperhatikam atas kerja keras mereka dalam melakukan penanganan penyebaran Covid-19.

"Kita berharap sekali, bentuk perhatian kepada tim medis ini tidak hanya dilakukan satu kali ini saja, namum bisa dilakukam terus menerus. Selain itu kita berharap pada pihak lainnya juga bisa memberikan support kepada tim medis dalam bentuk apapun. Sebab sama-sama kita ketahui kerja dan beban yang tim medis tanggung ini sangat berat, sehingga memang sangat diperlukan support makanan bergizi," jelas Heri.**(jee)**

JERI/RB

DAPAT SK: CPNS Benteng menerima SK yang diberikan langsung bertempat di BKPSDM Benteng, Senin (28/12).

Pengunjung Lapor Polisi Saja

Soal Pungli di Danau Gedang

BENTENG - Dinas Perhubungan (Dishub) Benteng memastikan punggutan yang dilakukan oknum di kawasan wisata Danau Gedang merupakan pungutan liar (pungli). Hal ini dikarenakan sesuai perda yang ada untuk punggutan retribusi parkir hanya Rp 1000 untuk sepeda motor, dan Rp 3 ribu untuk mobil.

Kepala Dishub Benteng, Durani mengatakan Dishub ada MoU dengan petugas yang melakulan pungutan parkir di wisata Danau Gedang, sebagai retribusi parkir untuk PAD ke Dishub. Akan tetapi apabila nominalnya sampai Rp 5 ribu hingga 10 ribu, itu tidak benar. Sebab mereka hanya diizinkan memungut biaya parkir sesuai perda. Apabila di luar angka yang sudah ditetapkan maka itu pungli.

"Selain itu, mekanisme memunggut parkir di wilayah wisata Danau Gedang, tidak mengambil uang saat orang mau masuk atau pintu masuk. Akan tetapi saat orang mau keluar, baru diambil uang parkirnya dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Kalau saat ini mereka mengambil uang dengan nominal Rp 5 ribu ribu untuk motor dan Rp 10 ribu untuk mobil, itu sangat menyalahi aturan dan itu tidak benar," tegas Durani.

Durani menambahkan, dengan kondisi seperti ini berarti sudah sangat meresahkan. Karena itu ia meminta kepada pemerintah desa (Pemdes) dan semua pengunjung wisata Danau Gedang untuk melapor ke polisi perihal pungli tersebut atau melapor ke Dishub agar nanti bisa diproses untuk ditindaklanjuti.

"Yang pasti kita hanya menerima setoran PAD retribusi Rp 1,2 juta dan nominal mereka memunggut parkir sudah diatur hanya Rp 1.000 untuk motor dan Rp 3 ribu untuk mobil. Apabila nantinya dalam pungli ini terbukti ada staf dan pegawai saya yang bermain, maka saya pastikan yang bersangkutan akan menerima konsekuensinya, dan akan tetap kita laporkan. Apabila ada yang sudah bermain atau melanggar, maka wajib untuk ditindak tegas," ungkapnya.

Lanjut Durani, pengelola parkir Danau Gedang hanya menyetorkan uang retribusi parkir kepada Dishub selama satu tahun sebesar Rp 1,2 juta atau satu bulan Rp 100 ribu. Saat ini mereka sudah melunasi semua pembayaran retribusi PAD parkir tersebut kepada Dishub.

Untuk diketahui, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Benteng, Sandarman mengungkapkan adanya pungutan tersebut Dispar memastikan tidak ada izin atau rekomendasi perihal penarikan uang untuk pengunjung yang ingin berwisata ke Danau Gedang. Sebab Dispar hingga saat ini tidak meminta mereka menyerahkan pajak atau retribusi kepada Dispar.**(jee)**

JERI/RB

MUSNAHKAN: Kejari Benteng melakukan pemusnahan barang bukti di halamam kantor kejari.

Kejari Musnahkan Barang Bukti

BENTENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng melaksanakan pemusnahan barang bukti (BB) tindak pidana umum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemarin (28/12). Dalam pemusnahan tersebut sebanyak 11 BB yang salah satunya merupakan satu paket sabu.

"Pemusnahan BB sesuai dengan putusan pengadilan, yakni dirampas untuk dimusnahkan Jadi masyarakat mengetahui kinerja kita terhadap perkara-perkara yang berasal dari penyidik kepolisian," kata Kajari Benteng, Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, SH, MH, melalui Kasi Barang Bukti dan Barang Perampasan, Netanya Margareth, SH, MH, kemarin.

Dia menambahkan pemusnahan 11 BB ini terdiri dari satu lembar celana pendek warna kuning motif bunga-bunga, satu lembar baju kaos warna pink lengan pendek dan terdapat tulisan di bagian dada depan "I Love Bengkulu", satu lembar celana panjang jeans warna hitam, satu lembar baju kaos warna putih, satu lembar baju kaos berkerah warna putih merek American Eagles dan robek pada bagian depan dada.

Selanjutnya, satu egrek atau alat pemanen sawit yang terbuat dari besi melengkung, satu pasang fiber atau tangkai egrek terbuat dari almunium panjang 6,5 meter, satu bilah pisau kecil dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 15 cm, panjang mata pisau cm, dengan menggunakan sarung senjata yang terbuat dari kertas sampul yang digulung dan terdapat lilitan isolasi bening. Selain itu, satu besi linggis warna hitam yang dimodifikasi, satu buah kunci yang sudah dimodifikasi berbentuk "Y", satu paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah. "Narkotika sudah tidak ada dengan alasan habis digunakan saat uji lab. Sehingga total keseluruhan BB yang dimusnahkan berjumlah 11 BB," ujar Neta.**(jee)**

2021, Ajukan 300 Formasi CPNS

BENTENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah mengajukan 300 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk penerimaan tahun 2021. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Benteng, Apileslipi, S.Kom, M.Si kemarin.

Ia mengatakan ratusan formasi CPNS tersebut diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Usulan sebanyak 300 formasi ini sesuai kebutuhan yang diperlukan di jajaran Pemkab Benteng. "Formasi yang diusulkan sesuai kebutuhan kita saat ini. Terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga teknis dan tenaga pendidikan. Semoga usulan kita ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Saat ini kita masih kekurangan tenaga ASN/PNS dalam memaksimalkan kinerja jajaran Pemkab Benteng," jelasnya.

Apileslipi menambahkan di Benteng saat ini yang sangat dibutuhkan yakni tenaga pendidikan dan kesehatan. Khusus tenaga kesehatan, saat ini masih kekurangan dokter spesialis untuk RSUD Benteng. Pada penerimaan CPNS tahun 2019 lalu ada tiga formasi dokter spesialis yang tidak terisi yakni dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis penyakit dalam. Tidak terisi karena tidak ada pendaftar di tiga formasi tersebut.

"Untuk dokter spesialis yang hingga saat ini masih kosong akan kembali kita usulkan untuk tahun 2021. Sebab ini sudah menjadi kebutuhan di RSUD kita saat ini. Selain itu untuk tenaga pendidikan memang setiap tahunnya selalu mendominasi," jelasnya.

Apileslipi menambahkan BKPSDM sudah memberikan SK kepada 129 CPNS formasi 2019 yang lulus, bertempat di halaman kantor BKPSDM Benteng, kemarin (28/12). Sambungnya, selain itu, pansel juga sudah menyerahkan SK kepada 129 CPNS 2019. Terhitung 4 Januari 2021, CPNS baru ini sudah siap bekerja. SK 129 CPNS ini terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020, sehingga mereka sudah menerima gaji pertama pada bulan Januari nanti.

"CPNS yang sudah menerima SK sudah diwajibkan untuk melakukan legalisir SK mereka, dan melapor ke OPD sesuai dengan formasi yang mereka pilih untuk memperkenalkan diri dan menerima instruksi langsung dari setiap Kepala OPD masing-masing," terangnya.(jee)

115 Warga Positif Covid-19 Sembuh

BENTENG – Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Benteng, hingga saat ini sudah 131 warga Benteng yang terkonfirmasi terpapar Covid-19. Namun, 115 warga diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19 serta 3 warga meninggal dunia.

Kepala Dinkes Benteng, Gusti Miniarti, S.Kep, MH melalui Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes), dr. Heri Kurniawan mengatakan untuk 13 warga lagi yang masih positif Covid-19, hingga saat ini masih dalam proses isolasi mandiri. "Dalam melakukan isolasi ini kita tetap melakukan pemantauan dan dirawat oleh petugas medis kita dari puskesmas. 13 orang ini akan dipantau hingga mereka sembuh dan sudah tidak ada lagi gejala Covid-19 di dalam tubuh," jelasnya.

Heri menambahkan, dengan kondisi seperti saat ini, ia meminta seluruh warga Benteng untuk benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Sebab apabila warga selalu acuh dan tidak disiplin dalam penerapan prokes akan berdampak bagi dirinya sendiri.

"Kita berharap dan meminta kepada warga untuk mematuhi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan (Prokes). Kita juga mengimbau warga untuk tidak mengadakan acara dalam menyambut malam tahun baru nantinya. Semua ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Benteng," katanya.

Heri menambahkan apabila warga sudah bisa disiplin dalam menerapkan prokes, maka kasus Covid-19 di Benteng diharapkan bisa berkurang bahkan hilang. "Apabila sudah hilang, maka semua aktivitas sudah bisa dilakukan dengan normal meskipun dengan tetap menerapkan prokes," ujarnya.(jee)

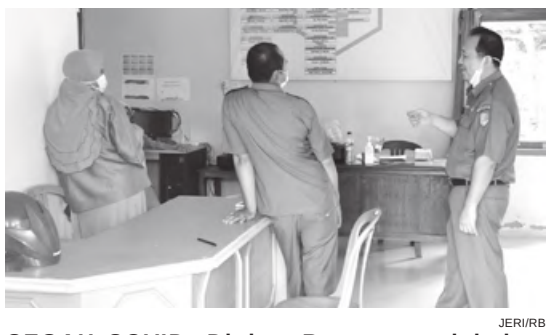

JERI/RB

CEGAH COVID: Dinkes Benteng melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk memberikan edukasi kepada warga agar disiplin menerapkan prokes.

Rapid Tes Antigen Personel Samapta

BENGKULU –Beban tugas dengan mobilitas tinggi dari kalangan personel kepolisian membuat mereka berisiko tinggi tertular Covid-19. Untuk mengantisipasi hal itu, Bid Dokkes Polda Bengkulu kembali menggelar rapid tes antigen di lingkungan internal Polda Bengkulu.

Dalam pelaksanaan pada Senin (28/12), Satker Samapta Polda mendapat giliran untuk dilakukan pengecekan. "Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan status penularan Covid-19 di Polda Bengkulu mengingat tingginya risiko tertular Covid-19 bagi anggota Polri, akibat beban tugas yang diemban. Personel Samapta yang setiap hari mobilitas tinggi kontak dengan masyarakat menjadi perhatian khusus untuk dilakukan rapid tes," kata Kabid Dokkes Polda Bengkulu, Kombes Pol dr. G.A.A. Diah Yamini D, Sp.THT-KL melalui Ipda Tongan Ansyah, S.KM.

Dipaparkan Tongan Ansyah, rapid tes ini akan dilaksanakan hingga ke polres-polres dengan melibatkan urkes kewilayahan bekerjasama dengan gugus tugas setempat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan berupa 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. "Petugas juga wajib melindungi diri dengan menggunakan APD lengkap," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan kepada personel yang sedang melaksanakan tugas untuk selalu disiplin dan patuh terhadap prokes.**(zie)**

HASRUL/RB

DIPERIKSA: Personel Samapta Polda Bengkulu dilakukan pemeriksaan melalui rapid test antigen untuk memastikan terpapar Covid-19 atau tidak.

PERKEMBANGAN COVID-19
DI PROVINSI BENGKULU

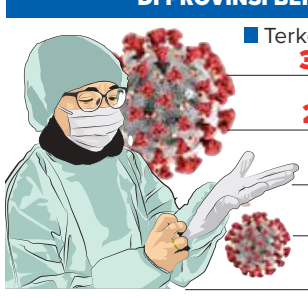

- Terkonfirmasi Covid-19: **3.472 KASUS**
- Sembuh: **2.311 KASUS**
- Meninggal: **115 KASUS**
- Suspek: **6.164**
- Spesimen: **17.767**

Waspada Mutasi Virus

BENGKULU – Adanya varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris beberapa waktu lalu sempat mengejutkan banyak pihak. Kini berbagai negara semakin memperketat berbagai protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus varian baru tersebut.

HERWAN ANTONI

Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa varian baru ini akan menyebar ke seluruh Inggris. "Inggris sudah berhadapan dengan jenis baru Covid-19. Varian baru SARS-Cov-2 ini bahkan diduga sementara ini lebih menular dibanding versi sebelumnya," katanya.

Ia juga mengatakan varian tersebut memiliki sejumlah mutasi yang mengkhawatirkan, yang berarti upaya mengontrol penularan melalui pembatasan sosial sementara harus dilakukan, sambil ilmuwan bekerja untuk mempelajari lebih lanjut tentang dampak mutasi ini pada bagaimana virus berperilaku. Ia menegaskan penargetan regional dari vaksin untuk mengendalikan penyebaran harus dipertimbangkan secara serius. "Informasinya virus ini sudah sampai ke negara Singapura," jelasnya.**(hkm)**

Bubarkan Kerumunan

BENGKULU – Tim Satuan Tugas Pengamanan Penegakan Hukum (Satgas Pamgakkum) Bengkulu rutin menggelar patroli dalam rangka menegakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Minggu (27/12) malam, Tim Satgas Pamggakkum kembali membubarkan kerumunan tanpa prokes.

"Kita rutin setiap malam patroli. Ada kerumunan tanpa protokol kesehatan kita bubarkan, ada masyarakat tidak memakai masker, kita ingatkan," kata Kasatpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar.

Lanjutnya, patroli ini selain untuk menegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 di Bengkulu, juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Covid-19 saat ini masih mengintai. Untuk itu meskipun sudah kembali beraktivitas, namun masyarakat tidak boleh abai dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

"Selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak itu dibuat guna melindungi kita dari paparan Covid-19, termasuk keluarga kita di rumah. Covid-19 masih ada, kasus pun terus bertambah, jadi kita tidak boleh lengah," imbau Murlin.

Murlin menambahkan, patroli setiap malam ini akan terus dilakukan termasuk ketika malam pergantian tahun baru nanti. Apabila ada perayaan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian serta tidak patuh dengan protokol kesehatan maka pihaknya akan membubarkan kerumunan tersebut. "Raperda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sudah diusulkan ke dewan. Kita berharap raperda ini segera disahkan, tapi juga paling penting itu kesadaran masyarakat untuk disiplin," pungkas Murlin.**(key)**

Pendapatan Rumah Sakit Swasta Turun

BENGKULU- Rumah sakit swasta di Kota Bengkulu sepi kedatangan pasien umum selama pandemi Covid-19. Akibatnya pemasukan rumah sakit swasta berkurang.

Humas Rumah Sakit (RS) Rafflesia Bengkulu, Ria mengatakan sampai akhir tahun masyarakat khawatir berobat ke rumah sakit sehingga rumah sakit sepi pasien umum. Apalagi saat ini angka kasus Covid-19 di Kota Bengkulu mengalami peningkatan hingga ruangan isolasi pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit penuh. "Saat ini praktis rumah sakit swasta hanya melayani sedikit sekali pasien non-Covid-19, padahal untuk perawatan pasien yang terpapar Covid-19 langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan," jelasnya.

Dijelaskannya, rumah sakit swasta dari sisi bisnis terkena imbas dari wabah Covid-19. Kapasitas rumah sakit tidak terisi secara umum, meski daya tampung pasien umum tetap ada.

Selama pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan jumlahnya bertambah, menurut Ria, jumlah masyarakat yang datang ke rumah sakit swasta malah sepi. Kebanyakan masyarakat takut untuk mengunjungi rumah sakit. Termasuk rumah sakit swasta. "Dari itu pemasukan uang rumah sakit kini berkurang hingga 50 persen," ujarnya.

Sejumlah rumah sakit swasta di Bengkulu mengeluhkan biaya operasional yang membengkak di tengah pandemi Covid-19. Sementara pemasukan rumah sakit makin minim karena sepi pengunjung, mengingat adanya instruksi penundaan pemeriksaan kecuali kondisi gawat darurat. "Masyarakat takut datang ke rumah sakit, sehingga terjadi penurunan kunjungan. Termasuk pasien rawat inap. Dampaknya berat bagi rumah sakit untuk operasionalnya. Karena pendapatan turun," ungkapnya.

Diakui Ria, tak hanya rumah sakit swasta saja yang terdampak. Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan rumah sakit milik pemerintah. "Seluruh rumah sakit mengalami penurunan kunjungan pasien. Kami meminta agar seluruh rumah sakit di Bengkulu makin mendekatkan layanan dengan masyarakat. Akses masyarakat dipermudah. Pertolongan kesehatan lebih mudah. Nanti muaranya pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat," tuturnya.**(hkm)**

HASRUL/RB

DISINFEKTAN: Personel Sat Brimob Polda Bengkulu melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di tempat ibadah.

Semprot Disinfektan di Tempat Ibadah

BENGKULU – Personel Unit KBR Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di beberapa tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.

Kegiatan dilaksanakan guna menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas di wilayah Provinsi Bengkulu. "Penyemprotan pada tempat-tempat umum di wilayah Bengkulu ini bertujuan sebagai langkah untuk menekan angka penyebaran Covid-19," kata Dansat Brimob Polda Bengkulu Kombes Pol. Susnadi, S.IK.

Kegiatan terbaru, Unit KBR Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu yang tergabung dalam Ops Aman Nusa II Satgas Pencegahan Covid-19 yang dipimpin Iptu Ulil Soffian melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al-Hikmah Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu. "Kegiatan penyemprotan ini dilakukan secara rutin di tempat ibadah dan fasilitas umum serta tempat–tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Hal ini bertujuan guna mencegah penyebaran Covid-19. Agar masyarakat dapat menjalankan ibadah serta kegiatan rutinitas dengan aman," jelasnya.

Menurut Susnadi, selain melaksanakan penyemprotan disinfektan juga dilaksanakan patroli imbauan dan teguran penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan patroli bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19, dan mengajak masyarakat bersama-sama saling mengingatkan untuk tetap mematuhi dan pentingnya melaksanakan prokes.

Susnadi menambahkan, Satuan Bimob Polda Bengkulu akan terus bekerja keras dalam melakukan pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19 di wilayah Provinsi Bengkulu. "Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam memutus mata rantai Covid-19 yaitu dengan bersama-sama saling mengingatkan akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan," tutupnya.**(zie)**

Lingkungan dan Hunian Sehat

BENGKULU- Di masa pandemi Covid-19, menjalankan protokol kesehatan dengan ketat serta tinggal di lingkungan dan hunian sehat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat. Rumah terbukti menjadi tempat teraman dan ternyaman di tengah-tengah penyebaran Covid-19 saat ini.

AHMAD YULIANSAH

Kasi Kesling dan Kesjaor Dinkes Provinsi Bengkulu, Ahmad Yuliansah mengatakan konsep rumah tidak sebatas bangunan fisik saja. Rumah adalah 'benteng' tempat kita mengisi kembali energi dan menjernihkan pikiran setelah bekerja serta menjadi tempat berlindung terbaik bagi keluarga.

Saat sebagian besar orang harus menghabiskan waktu di kediamannya untuk bekerja di rumah, maka pemilihan lokasi, kondisi lingkungan, dan fasilitas pendukung yang tersedia menjadi faktor krusial. Ahmad mengatakan, lingkungan dan hunian sehat sebagai wahana efektif untuk berlindung, khususnya bagi masyarakat usia lanjut yang relatif lebih rentan dan memiliki risiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

Menurut Ahmad, tinggal di lingkungan yang baik serta menempati hunian sehat dan nyaman sangat membantu sebagai tempat berlindung dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini.

Ahmad juga mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan menjalankan langkah-langkah preventif. Penggunaan masker dan menjaga jarak adalah cara termudah untuk melindungi diri dan keluarga di masa pandemi.

Ia juga mengatakan, penerapan protokol kesehatan serta menjaga daya tahan tubuh dengan senantiasa menjalankan pola hidup sehat, asupan gizi yang baik, rutin berolahraga, menghindari stres, serta istirahat yang cukup adalah kunci dalam mencegah diri terinfeksi Covid-19. Faktor penting lainnya ialah memahami secara benar pola-pola penularan di masa pandemi dan risiko-risiko utama khususnya bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi, seperti penderita penyakit jantung, darah tinggi, dan penyakit degeneratif lainnya.**(hkm)**